



Tegar Berdiri

Badai membawa angin, menggulung ombak menoreh luka
namun tekad tak pernah terdiam, mengokohkan kaki tegar berdiri.




BAGIAN 2

KETAHANAN MAKROEKONOMI INDONESIA

Di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian nasional tetap kokoh dan menunjukkan kinerja yang membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 tetap dalam tren meningkat dan mencapai 6,5%, tertinggi selama satu dekade terakhir, diiringi oleh laju inflasi IHK yang sangat rendah yaitu 3,79%. Angka ini berada dibawah kisaran sasaran inflasi 5%+1% sehingga diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi menuju sasaran jangka panjang pada level yang lebih rendah, level yang setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun ini disumbang oleh kuatnya kegiatan ekspor ditengah melambatnya ekonomi global dan investasi yang perannya semakin meningkat. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju inflasi IHK yang menurun terjadi di hampir seluruh daerah. Dibandingkan dengan negara kawasan, di tengah perlambatan pertumbuhan di negara-negara emerging markets secara keseluruhan maupun di negara-negara ASEAN, perekonomian Indonesia justru tumbuh meningkat. Begitu pula dengan perkembangan inflasi yang dalam satu dekade terakhir termasuk yang tertinggi di kawasan, pada tahun 2011 inflasi IHK mencapai level yang relatif sama dengan negara di kawasan.

Kuatnya daya tahan perekonomian domestik tercermin dari meningkatnya ekspor ditengah melambatnya ekonomi global dan kuatnya permintaan domestik. Sejumlah faktor mendukung kuatnya daya tahan ekspor Indonesia. Pertama, diversifikasi pasar tujuan ekspor ke negara-negara emerging markets Asia seperti China dan India yang pertumbuhan ekonominya masih relatif tinggi didukung oleh permintaan domestiknya yang tetap kuat. Kedua, karakteristik komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut yang didominasi komoditas seperti energi dan komoditas pangan terutama digunakan untuk konsumsi domestiknya sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan volume perdagangan dunia. Sementara itu, ketahanan ekonomi Indonesia dari sisi domestik didukung oleh beberapa faktor. Pertama, kuatnya konsumsi yang didukung oleh meningkatnya daya beli seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita terutama segmen penduduk dengan penghasilan menengah ke atas. Kedua, meningkatnya jumlah usia produktif dan tenaga kerja di sektor formal. Ketiga, bertambahnya sumber pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi semakin merata. Keempat, tingginya konsumsi domestik direspons oleh peningkatan investasi untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional.

Kuatnya daya tahan dan membaiknya prospek ekonomi Indonesia meningkatkan kepercayaan investor sehingga



mendorong semakin meningkatnya peran FDI. Pada tahun 2011, peran FDI dalam struktur aliran masuk modal jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan yang sangat pesat pada sektor pertambangan dan industri. Peningkatan peran FDI tersebut mampu mendukung tetap kuatnya kinerja NPI di tengah menurunnya aliran modal dalam bentuk portofolio terkait meningkatnya ketidakpastian global sejak semester kedua. Bersamaan dengan kuatnya kinerja ekspor, perkembangan tersebut menghasilkan surplus pada NPI yang relatif besar dan meningkatkan cadangan devisa sehingga mampu menjadi penyangga dalam meredam gejolak eksternal. Sejalan dengan kinerja NPI 2011 yang kuat, perkembangan nilai tukar rupiah dapat dijaga relatif stabil dan dalam kecenderungan menguat, sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara regional. Secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2011 mengalami apresiasi sebesar 3,56%, meskipun cenderung melemah pada semester II-2011.

Inflasi IHK pada tahun 2011 berhasil ditekan pada level yang sangat rendah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi, mengelola permintaan domestik dan mengurangi dampak kenaikan inflasi global akibat kenaikan harga komoditas pangan internasional. Hal ini tercermin dari inflasi inti yang tetap terjaga pada level

yang rendah di tengah akselerasi kegiatan ekonomi domestik. Dari sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan terjaganya harga energi seperti BBM, listrik dan gas. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan dalam menurunkan inflasi volatile food yang sangat signifikan dan inflasi administered prices yang terjaga pada level yang cukup rendah. Rendahnya inflasi volatile food juga dibantu oleh mulai menurunnya harga komoditas pangan global sejak triwulan II-2011. Di tingkat daerah peningkatan koordinasi melalui forum TPID juga cukup efektif dalam membantu penurunan tekanan inflasi sebagaimana tercermin dari penurunan inflasi di hampir semua daerah di Indonesia.

Optimisme yang tetap tinggi terhadap berlanjutnya akselerasi kegiatan ekonomi dan terjaganya stabilitas makro didukung oleh perbaikan struktural. Hal ini antara lain tercermin dari perkembangan positif dalam penyelesaian permasalahan infrastruktur dan keberhasilan Indonesia masuk dalam peringkat layak investasi (investment grade). Disahkannya Undang Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan berbagai program Pemerintah dalam mendukung kegiatan infrastruktur seperti Program Penjaminan Infrastruktur dan peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mengakselerasi laju investasi pada tahun-tahun mendatang.



Bab III

PERTUMBUHAN EKONOMI



PERTUMBUHAN EKONOMI



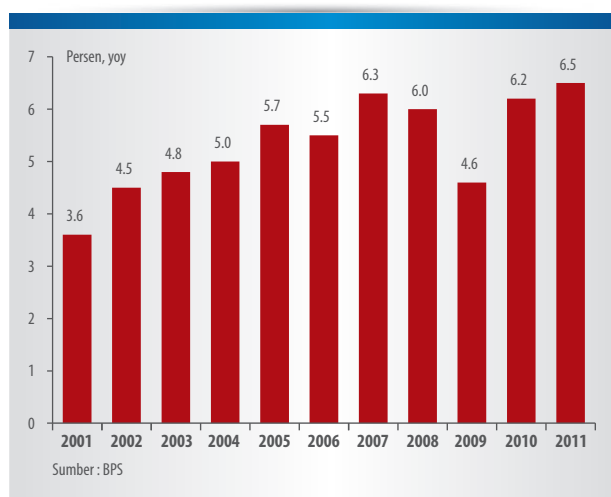
Ekonomi pada tahun 2011 tumbuh tinggi mencapai 6,5%, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan mencapai angka pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Di sisi permintaan peningkatan tersebut terutama disumbang oleh meningkatnya kinerja konsumsi dan investasi (PMTB), sementara di sisi penawaran oleh meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pertumbuhan yang meningkat tersebut diikuti oleh membaiknya kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya peran investasi dan tetap tingginya peran ekspor, turunnya pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya peran pertumbuhan ekonomi dari luar Jawa. Kemampuan perekonomian Indonesia untuk tumbuh tinggi di tengah ekonomi dunia yang melemah didukung baik oleh meningkatnya kinerja ekonomi domestik maupun kinerja ekspor yang masih tinggi. Peningkatan kinerja ekonomi domestik khususnya konsumsi didukung besarnya potensi pasar domestik yang diantaranya bersumber dari peningkatan daya beli, bertambahnya penduduk kelas menengah ke atas, dominannya penduduk usia produktif, dan meningkatnya porsi pekerja di sektor formal. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan optimisme dunia usaha baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mendorong peningkatan kinerja investasi. Sementara itu, tetap kuatnya kinerja ekspor Indonesia didukung oleh kemampuan memanfaatkan peningkatan perdagangan intra-regional, khususnya dengan negara-negara yang orientasi ekonominya pada perekonomian domestik.



3.1 KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI

Di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia tumbuh menguat. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh meningkat dari 6,2% pada tahun 2010 menjadi 6,5% pada tahun 2011 (Grafik 3.1). Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan pencapaian tertinggi pascakrisis tahun 1997. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, seperti rendahnya inflasi, terjaganya volatilitas nilai tukar, serta relatif stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri menyokong tingginya kinerja perekonomian tersebut.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang

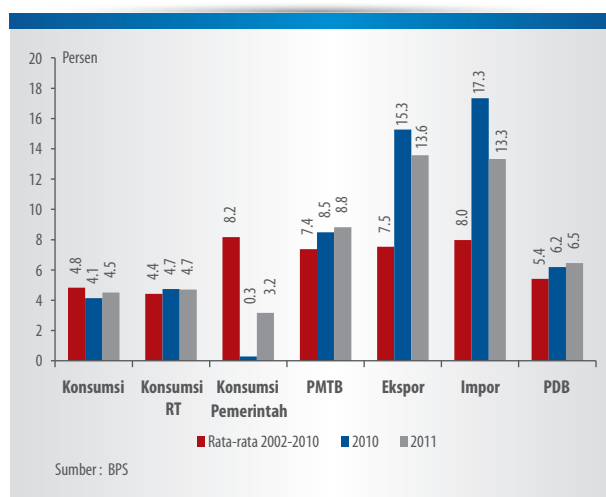


Grafik 3.1 Pertumbuhan PDB

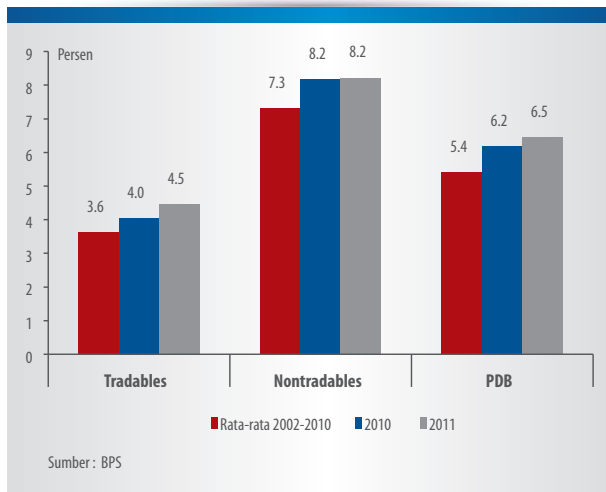
masih berdaya tahan dan investasi yang tumbuh cukup tinggi. Daya beli yang tetap terjaga, sejalan dengan tingkat inflasi yang cukup rendah serta pendapatan masyarakat yang meningkat menjadi faktor pendorong kuatnya konsumsi rumah tangga. Dengan kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh sebesar 4,7%, lebih tinggi dari rata-ratanya 4,4%. Sementara itu, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang cukup terjaga mendukung semakin kondusifnya iklim usaha dan meningkatkan optimisme dunia usaha sehingga mendorong aktivitas investasi. Dengan kondisi yang lebih kondusif tersebut, investasi tumbuh meningkat menjadi 8,8%, melampaui rata-rata historisnya 7,4%. Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor Indonesia yang tetap berkinerja baik, di tengah melemahnya ekonomi global, juga turut andil dalam membangun perekonomian Indonesia. Terjaganya kinerja ekspor tidak terlepas dari keberhasilan upaya diversifikasi negara tujuan ekspor, khususnya ke negara-negara *emerging markets* di Asia. Dengan diversifikasi tersebut ekspor mampu tumbuh tinggi mencapai 13,6%, jauh di atas historisnya 7,5% (Grafik 3.2).

Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor *tradables* mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan sektor *non-tradables* relatif stabil di tingkat pertumbuhan yang tinggi¹. Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor *tradables* mencapai 4,5%, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun

1 Sektor *tradables* terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Sementara sektor *non-tradables* terdiri dari sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.



Grafik 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan

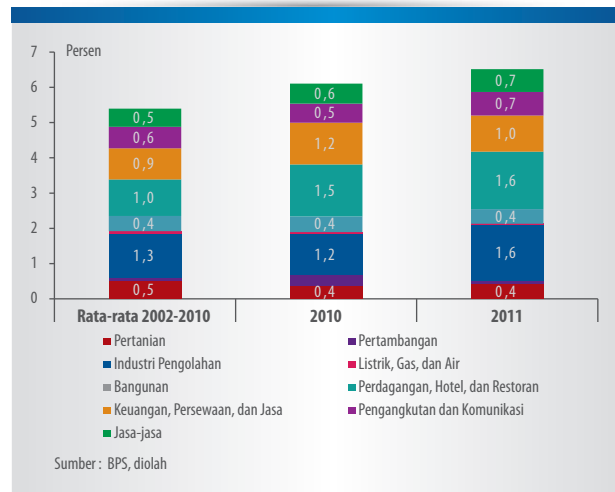


Grafik 3.3 Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran

sebelumnya sebesar 4,0%. Sementara itu, pertumbuhan sektor *non-tradables* tumbuh tinggi mencapai 8,2%, relatif sama dengan pertumbuhan tahun 2010 (Grafik 3.3). Seiring dengan peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat, peran sektor *tradables* pada pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat, meskipun masih tetap didominasi oleh sektor *non-tradables*.

Akselerasi pertumbuhan sektor *tradables* terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sebesar 6,2%. Permintaan yang tetap kuat, baik dari domestik maupun eksternal, serta iklim investasi yang semakin kondusif telah meningkatkan optimisme kegiatan di sektor industri. Sementara itu, meskipun pertumbuhannya relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan yang dicapai sektor *non-tradable* terbilang tinggi. Pertumbuhan tersebut terutama disumbang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 9,2% dan 10,7%. Dari sisi perannya terhadap pertumbuhan sektor *non-tradable*, kedua sektor ini juga memberikan andil yang cukup besar (Grafik 3.4). Tingginya pertumbuhan pada kedua sektor ini terkait dengan masih kuatnya permintaan domestik.

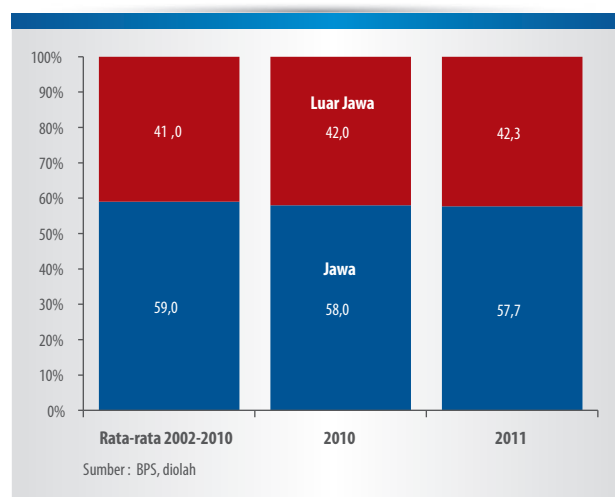
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai peningkatan peran daerah luar Jawa. Peranan daerah luar Jawa dalam perekonomian meningkat mencapai 42,3% dibandingkan dengan historisnya (Grafik 3.5). Peningkatan peran tersebut didorong oleh akselerasi sektor industri pengolahan dan perkebunan. Pemerataan pertumbuhan yang membaik terlihat



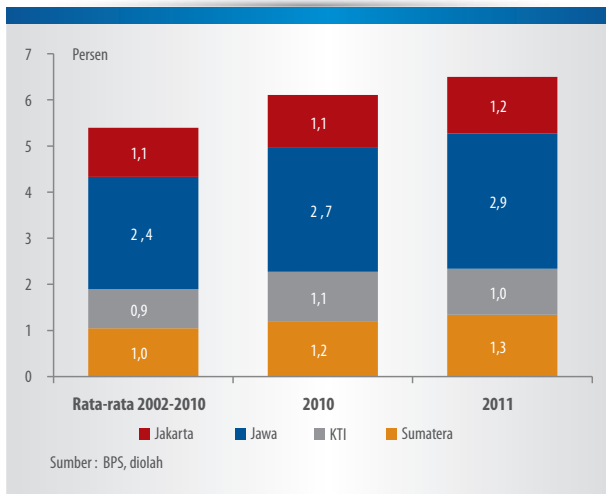
Grafik 3.4 Kontribusi PDB Sisi Penawaran

dari kontribusi provinsi-provinsi luar Jawa yang membaik dibandingkan dengan historis (Grafik 3.6). Membaiknya pertumbuhan di daerah, mendorong penguatan permintaan domestik yang tercermin dari konsumsi dan investasi yang perannya terus meningkat di seluruh daerah. Perkembangan pada tahun 2011 menunjukkan hampir semua daerah tumbuh meningkat kecuali kawasan yang mengalami gangguan teknis pertambangan, seperti dialami oleh kawasan Kalimantan dan Bali Nusa Tenggara (Tabel 3. 1).

Di antara negara-negara sekawasan, perkembangan perekonomian Indonesia tergolong yang berkinerja lebih baik. Di tengah perlambatan pertumbuhan negara-negara *emerging markets* secara keseluruhan maupun negara-negara ASEAN (Tabel 3. 2), perekonomian Indonesia justru tumbuh meningkat. Perlambatan pertumbuhan perekonomian negara-



Grafik 3.5 Pangsa Daerah Dalam Perekonomian Nasional



Grafik 3.6. Kontribusi Daerah Dalam Perekonomian Nasional

negara sekawasan tersebut berasal dari perlambatan kinerja ekspor, sementara kinerja ekspor Indonesia relatif terjaga baik.

3.2 PERMINTAAN AGREGAT

Kinerja permintaan agregat pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa dari sisi domestik maupun eksternal, perekonomian Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Kondisi ini didukung oleh pasar domestik yang besar, struktur demografi yang semakin didominasi oleh usia produktif, keyakinan konsumen, dan optimisme pengusaha yang tinggi, serta kegiatan ekspor yang terdiversifikasi antara

negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*.

KONSUMSI RUMAH TANGGA

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup kuat selama tahun 2011 didukung oleh perbaikan daya beli masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, sangat mendukung masih kuatnya konsumsi. Secara umum perbaikan penghasilan masyarakat tercermin dari meningkatnya pendapatan per kapita yang kini telah mencapai 3.543 dolar AS (Grafik 3.7). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan meningkatnya jumlah pekerja berpenghasilan menengah ke atas (Grafik 3.8 dan 3.9). Perbaikan penghasilan masyarakat juga didukung oleh membaiknya nilai tukar petani, terutama pada paruh pertama 2011, seiring dengan meningkatnya harga komoditas pertanian (Grafik 3.10). Peningkatan pendapatan juga terjadi pada upah buruh bangunan seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi di sektor konstruksi. Di samping itu, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) juga menjadi faktor pendukung kuatnya konsumsi rumah tangga. Rata-rata peningkatan UMP riil tahun 2011 di seluruh provinsi sekitar 5,0%, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sebesar 1%.

Ketahanan konsumsi rumah tangga dipengaruhi pula oleh tingginya tingkat keyakinan konsumen,

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Daerah

Kawasan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Rata-rata 2002-2010	2011
Sumatera	4,5	5,9
Sumatera Bagian Utara	4,1	6,3
Sumatera Bagian Tengah	4,6	5,4
Sumatera Bagian Selatan	5,0	6,3
Jawa	5,3	6,5
Jawa Bagian Barat	5,2	6,3
Jawa Bagian Tengah	5,1	5,9
Jawa Bagian Timur	5,5	7,1
Jakarta	5,7	6,7
Kawasan Timur Indonesia	4,3	5,0
Bali Nusa Tenggara	4,8	3,5
Kalimantan	3,7	3,8
Sulawesi Maluku Papua	5,0	7,2

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.2 Pertumbuhan Negara-negara Sekawasan

Negara	2009	2010	2011
PDB			
Indonesia	4,6	6,2	6,5
Negara-negara Maju	-3,7	3,1	1,6
Negara-negara <i>Emerging markets</i>	2,8	7,3	6,4
Malaysia	-1,6	7,2	5,2
Thailand	-2,4	7,8	3,5
Singapura	-0,8	14,5	5,3
Filipina	1,1	7,6	4,7
Vietnam	5,3	6,8	5,8

Sumber: World Economic Outlook September 2011.

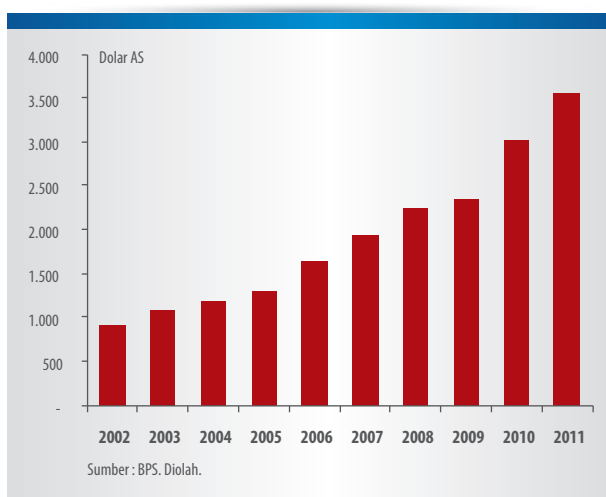
persen

sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi. Keberhasilan menjaga stabilitas makroekonomi dengan mencapai inflasi yang rendah dan volatilitas nilai tukar yang terkendali telah menjaga daya beli dan keyakinan masyarakat untuk tetap dapat melakukan konsumsi. Keyakinan konsumen tersebut semakin besar berkat dukungan ketersediaan pembiayaan baik dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang terus meningkat. Indikasi menguatnya keyakinan konsumen tersebut terekam dalam hasil survei konsumen yang dilakukan oleh beberapa lembaga (Grafik 3.11).

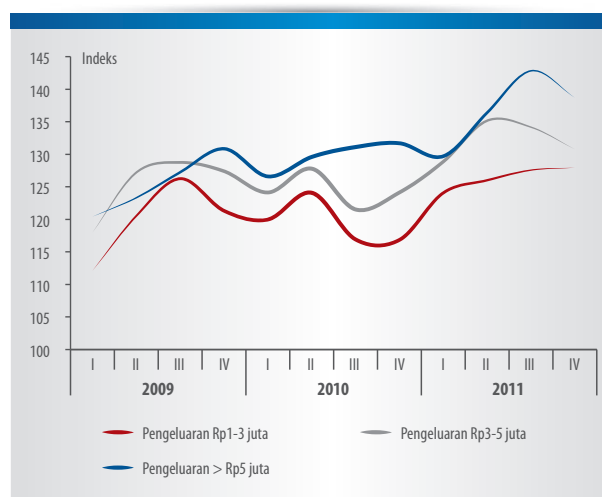
Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Indonesia kini berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia nonproduktif (Grafik 3.12). Struktur penduduk yang didominasi usia produktif sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih

besar dari usia nonproduktif. Hal itu juga didukung oleh kemampuannya menghasilkan pendapatan untuk berkonsumsi yang lebih besar.

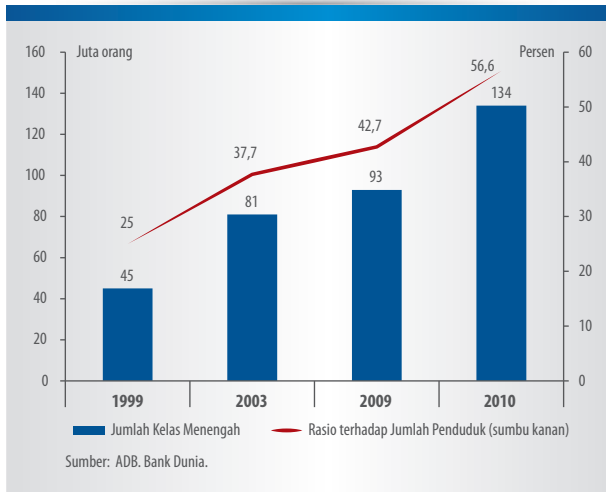
Secara spasial, menguatnya konsumsi rumah tangga terjadi merata di seluruh daerah. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terjadi di setiap daerah seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan terkendalinya inflasi. Optimisme tersebut terlihat dari hasil survei konsumen di berbagai daerah yang secara umum menunjukkan tren keyakinan konsumen yang meningkat (Grafik 3.13). Menguatnya konsumsi rumah tangga di berbagai daerah tercermin dari kenaikan indeks penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia sepanjang tahun 2011 (Grafik 3.14). Jenis barang eceran yang mengalami peningkatan permintaan selama tahun 2011 berupa barang tahan lama (*durable goods*) yang termasuk di dalamnya barang elektronik perlengkapan rumah tangga.



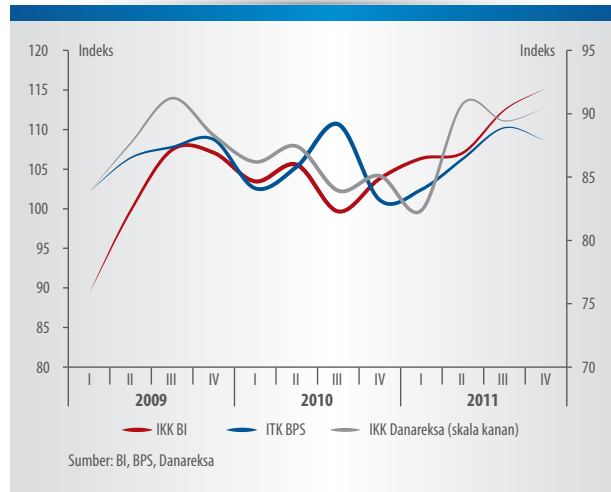
Grafik 3.7 Pendapatan per Kapita



Grafik 3.8 Indeks Penghasilan Menurut Kelompok Pengeluaran



Grafik 3.9 Perkembangan Kelas Menengah



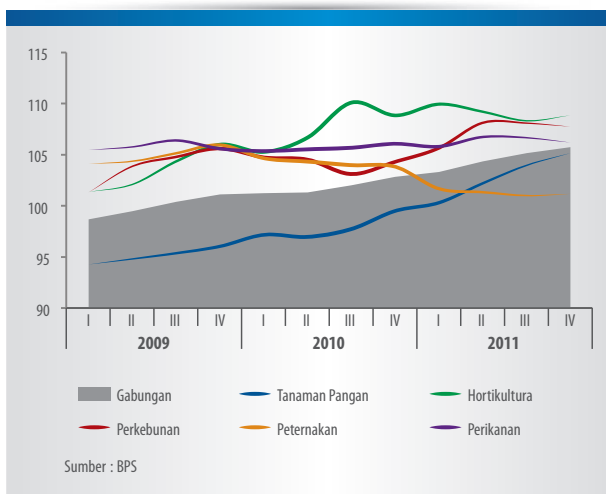
Grafik 3.11 Indeks Keyakinan Konsumen

KONSUMSI PEMERINTAH

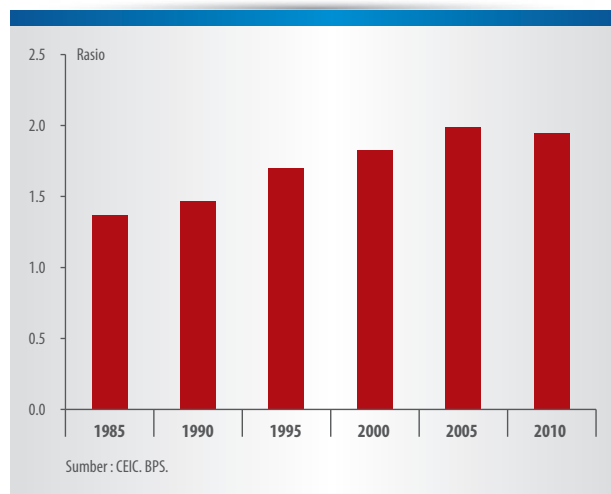
Kontribusi pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada pertumbuhan PDB tahun 2011 mengalami peningkatan. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 3,2%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,3%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya defisit Pemerintah dalam APBN dari 0,6% dari PDB pada 2010 menjadi 1,2% dari PDB pada 2011. Peningkatan konsumsi Pemerintah berasal dari penyerapan pengeluaran yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran belanja Pemerintah terutama ditujukan untuk belanja pegawai dan transfer ke daerah. Sementara itu, belanja barang baru terakselerasi pada akhir tahun.

INVESTASI

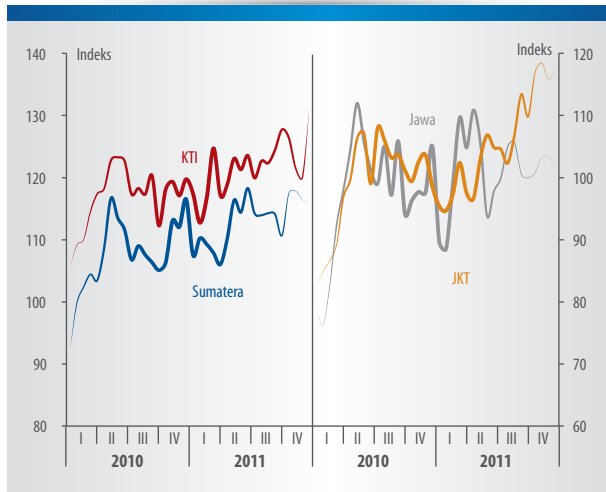
Kinerja investasi pada tahun 2011 semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 8,8%, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 8,5%. Dengan pertumbuhan ini, peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi sehingga kapasitas ekonomi semakin kuat dalam menopang permintaan. Daya topang tersebut semakin kuat lagi karena sifat investasi pada tahun ini lebih mengarah pada investasi baru dibandingkan dengan peremajaan terhadap investasi yang telah ada (Grafik 3.15). Berdasarkan jenis investasi, kenaikan investasi terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan investasi nonbangunan sementara investasi bangunan sedikit melambat (Grafik 3.16).



Grafik 3.10 Nilai Tukar Petani

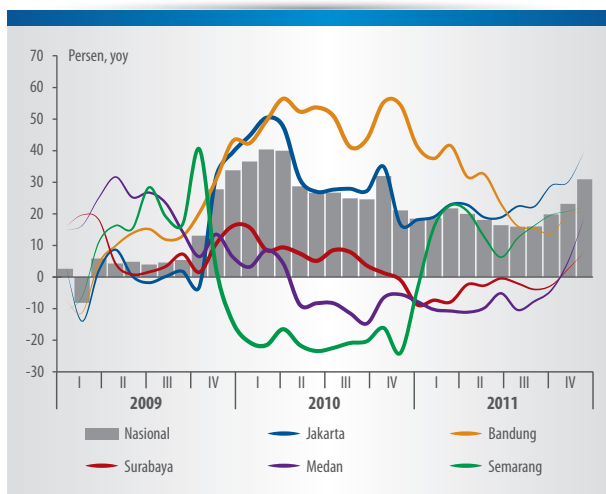


Grafik 3.12 Rasio Penduduk Usia Produktif terhadap Usia Non-produktif

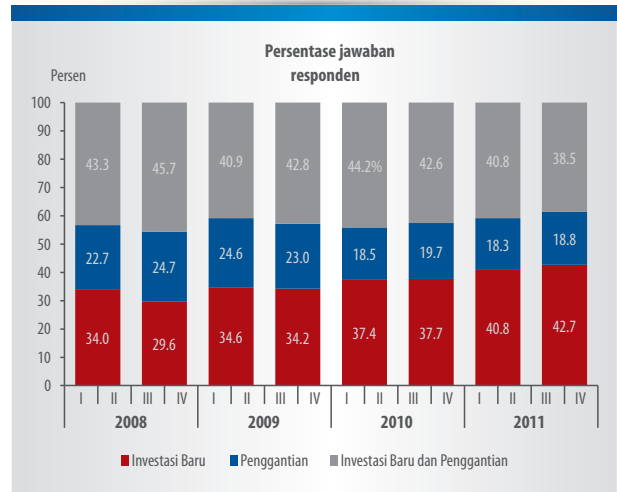


Grafik 3. 13 Indeks Keyakinan Konsumen berdasarkan Daerah

Tingginya investasi dipengaruhi oleh optimisme pelaku usaha dan semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Optimisme pelaku usaha yang positif terhadap prospek ekonomi Indonesia tercermin pada tren kenaikan Indeks Tendensi Bisnis BPS (Grafik 3.17). Kondisi yang disertai dengan semakin kondusifnya iklim investasi juga menjadi faktor pendorong masih tingginya kinerja investasi. Skor penilaian *Doing Business in Indonesia* menurut International Finance Corporation (IFC) pada hampir seluruh komponen mengalami perbaikan. Persepsi membaiknya iklim investasi Indonesia juga tercermin pada perbaikan *sovereign rating* Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat hingga mencapai level layak investasi pada akhir tahun (Grafik 3.18). Meningkatnya investasi tersebut juga merupakan respons dunia usaha terhadap tingginya utilisasi kapasitas seiring dengan kuatnya permintaan domestik maupun ekspor. Selain



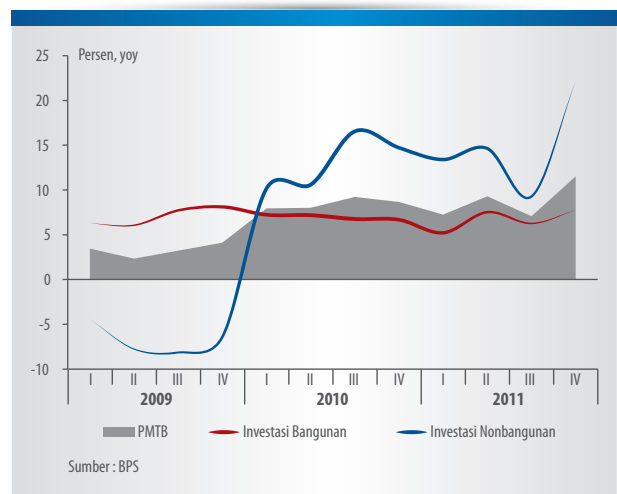
Grafik 3. 14 Indeks Penjualan Eceran berdasarkan Kota



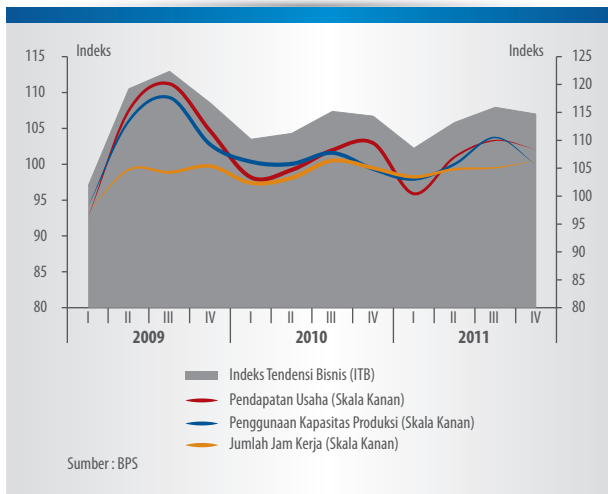
Grafik 3. 15 Survei Kegiatan Bisnis

itu, peningkatan investasi tahun ini dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah yang mendorong peningkatan impor barang modal.

Dari sisi pelaku dan sumber dana, investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri mengalami peningkatan. Optimisme terhadap prospek perekonomian domestik dan masih melimpahnya likuiditas global memberikan momentum kepada aliran masuk finansial yang semakin mengarah ke sektor riil sehingga berkontribusi positif pada kinerja investasi. Data penanaman modal asing (PMA) menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga masih tumbuh baik sejalan dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Grafik 3.19). Dari dalam negeri, aktivitas pembiayaan investasi yang masih baik juga ditandai oleh masih banyaknya perusahaan yang melakukan *initial public offering* (IPO) maupun *right*



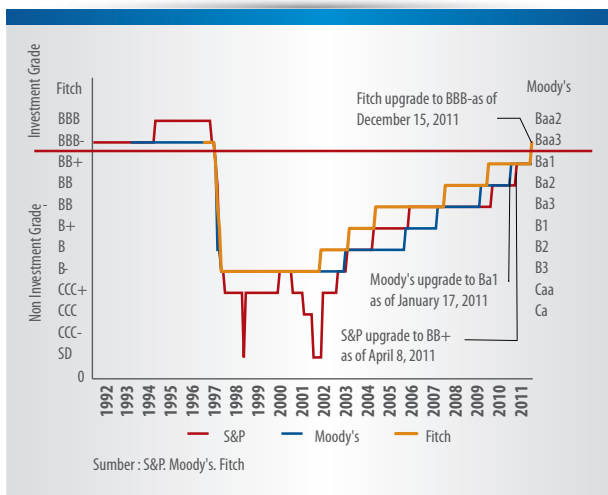
Grafik 3. 16 Investasi Bangunan dan Nonbangunan



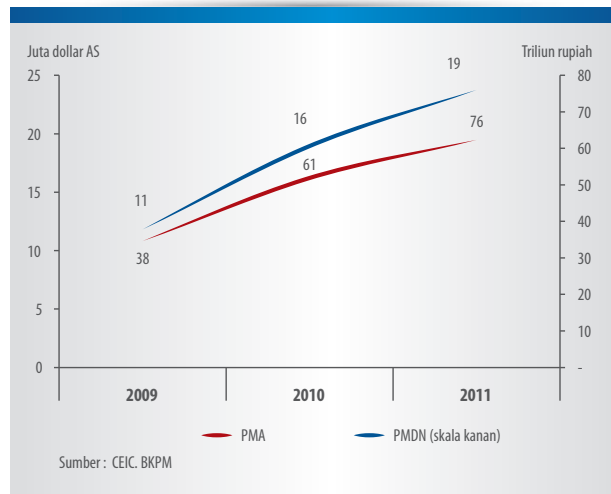
Grafik 3. 17 Indeks Tendensi Bisnis BPS

issue sepanjang tahun 2011. Selain itu, dukungan perbankan terhadap aktivitas investasi juga nampak dari pertumbuhan riil kredit investasi yang meningkat menjadi 23,1% pada tahun 2011 dari 10,3% pada tahun sebelumnya. Di samping itu, peran dana internal dalam membiayai investasi perusahaan juga masih kuat seiring terus meningkatnya laba ditahan perusahaan.

Relatif melambatnya investasi bangunan di antaranya disebabkan oleh kemajuan pembangunan infrastruktur yang tidak secepat yang diharapkan. Realisasi proyek 10.000 MW tahap I dan jalan tol tidak secepat yang diharapkan. Sementara itu, realisasi proyek 10.000 MW tahap II relatif sesuai rencana. Kendala klasik berupa pembebasan lahan merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur. Namun, disahkannya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan pada Desember 2011 diharapkan dapat mengakselerasi



Grafik 3. 18 Peringkat Utang Indonesia



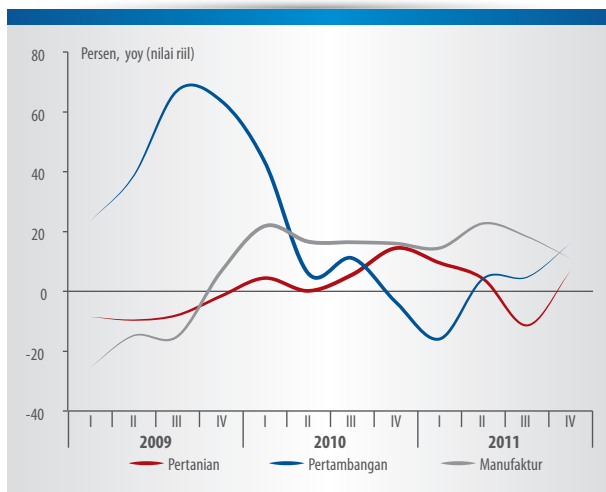
Grafik 3. 19 PMA dan PMDN

laju investasi pada tahun-tahun mendatang (Lihat Box 3.1). Selain itu, keberadaan UU Pengadaan Tanah tersebut diharapkan dapat semakin mengefektifkan dukungan Pemerintah dalam meningkatkan kegiatan investasi melalui Program Penjaminan Infrastruktur maupun peluncuran *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

EKSPOR

Kinerja ekspor tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang masih tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Ekspor dapat tumbuh sebesar 13,6%, jauh di atas rata-rata historisnya sebesar 7,5%, namun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang tinggi ini didukung oleh diversifikasi negara tujuan ekspor seiring dengan meningkatnya perdagangan intra-regional di kawasan Asia.

Berdasarkan sektornya, tingginya ekspor Indonesia terutama disumbang oleh kinerja ekspor pertambangan terkait dengan permintaan terhadap komoditas primer yang masih tinggi dari negara-negara *emerging markets* (Grafik 3.20). Sementara itu, ekspor manufaktur relatif stabil meskipun sedikit melambat pada akhir tahun 2011. Hal ini terkait dengan bertahannya ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan adanya pengalihan pasar tujuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan TPT dari pasar utamanya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, ekspor komoditas pertanian berada dalam tren yang menurun terkait menurunnya ekspor biji kakao dan kopi. Selain faktor musim yang kurang kondusif memasuki penghujung tahun 2011, penurunan ekspor biji kakao juga terpengaruh oleh



Grafik 3. 20 Ekspor Nonmigas Berdasarkan Sektor

berlanjutnya kebijakan bea keluar biji kakao sejak April 2010 guna memacu ekspor produk olahan kakao. Sementara itu, penurunan ekspor kopi terkait dengan tren harga internasional yang semakin rendah.

Penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang cukup signifikan, tidak diikuti oleh penurunan yang tajam pada ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan ketahanan kinerja ekspor Indonesia. Kondisi ini didukung oleh struktur ekspor yang semakin terdiversifikasi dengan semakin meningkatnya peran pasar negara-negara *emerging markets* terutama China dan India (Tabel 3. 3). Pengaruh diversifikasi negara tujuan ekspor semakin kuat dengan masih tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi China dan India yang masih kuat dilandasi oleh reorientasi perekonomian yang mengarah pada penguatan perekonomian domestik.

Kuatnya kinerja ekonomi domestik tersebut dapat menopang pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh risiko eksternal yang terbatas sehingga permintaan impor dari kedua negara tersebut tetap tinggi. Kondisi ini mendukung ketahanan ekspor Indonesia karena ekspor ke kedua negara tersebut didominasi oleh komoditas energi dan pangan yang digunakan untuk konsumsi domestik di kedua negara tersebut (Grafik 3.21).

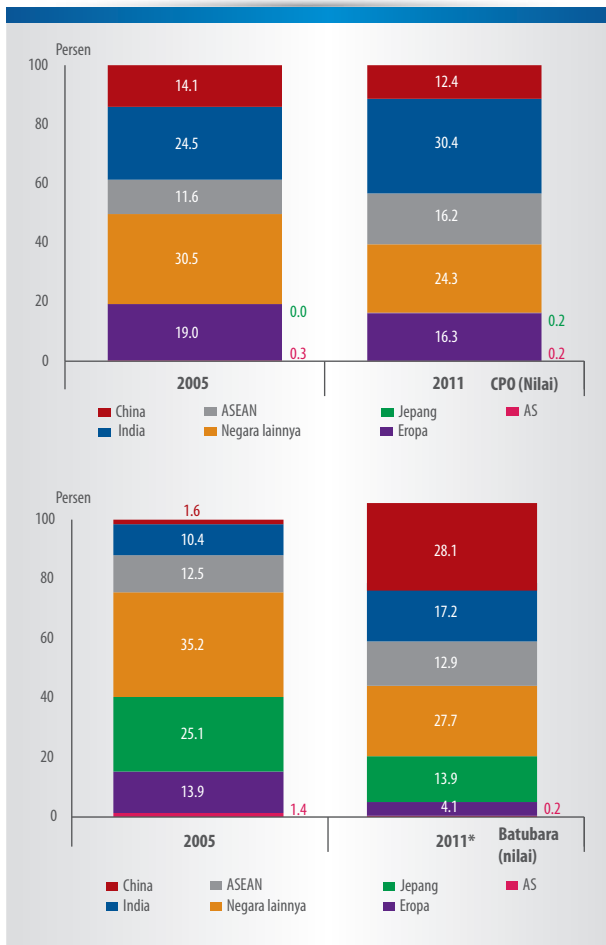
Terkait dengan perkembangan tersebut, permintaan komoditas batubara dari kedua negara tersebut meningkat tinggi. Permintaan tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang menggunakan energi batubara. Selain itu, peningkatan permintaan batubara dari China ke Indonesia juga dipengaruhi oleh keunggulan di sisi biaya pengangkutan yang lebih rendah dan lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya.

IMPOR

Sejalan dengan perkembangan ekspor, pertumbuhan impor juga melambat dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan impor melambat dari 17,3% pada tahun 2010 menjadi 13,3% pada tahun 2011 (Grafik 3. 22). Angka pertumbuhan impor tersebut masih tergolong tinggi untuk impor Indonesia yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 8%. Pertumbuhan yang tinggi tersebut berasal dari pertumbuhan impor barang konsumsi, diikuti impor barang modal, dan impor bahan baku. Tingginya pertumbuhan impor tersebut juga didukung oleh nilai tukar rupiah yang menguat dengan volatilitas yang rendah, meskipun agak melemah pada penghujung tahun 2011. Kenaikan impor barang konsumsi yang cukup tinggi, terutama berupa makanan jadi dan kendaraan penumpang, sejalan

Tabel 3. 3 Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Negara	2000		2005		2010		2011*	
	Miliar USD	Pangsa (%)	Miliar USD	Pangsa (%)	Miliar USD	Pangsa (%)	Miliar USD	Pangsa (%)
Asia	27.5	56.7	40.9	61.3	86.6	66.9	110.2	67.6
Jepang	7.6	15.7	9.7	14.6	16.1	12.4	18.4	11.3
China	1.8	3.7	4.0	5.9	14.0	10.8	21.8	13.3
India	1	2.1	2.9	4.3	9.6	7.4	13.4	8.2
ASEAN	9.8	20.2	14.4	21.6	27.3	21.1	32.4	19.8
AS	8.2	16.9	9.2	13.8	13.3	10.3	15.6	9.6
Erropa	9.2	19.0	10.1	15.1	16.8	13.0	20.2	12.4
Lainnya	3.6	7.4	6.5	9.8	12.8	9.9	17.1	10.5
Total	48.5	100.0	66.8	100.0	129.4	100.0	163.2	100.0

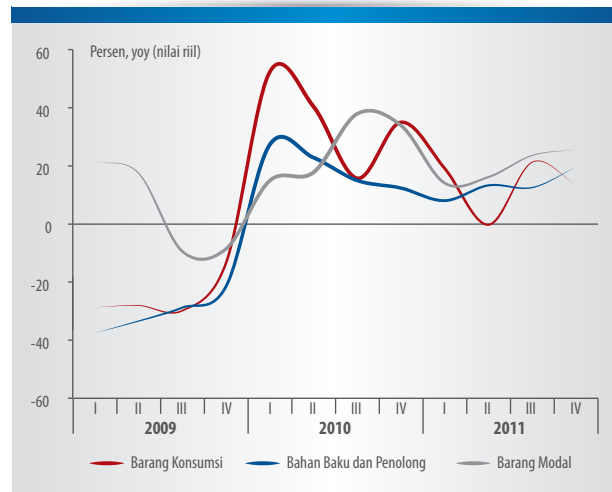


Grafik 3.21 Pangsa Negara Tujuan Ekspor Batubara dan CPO

dengan tingginya permintaan domestik. Sementara itu, tingginya permintaan ekspor mendorong naiknya kebutuhan impor bahan baku untuk *input* produksi barang industri pengolahan. Kegiatan produksi yang meningkat berpengaruh positif pada optimisme pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan merealisasikan investasi sehingga mendorong tingginya pertumbuhan impor barang modal.

3.3 PENAWARAN AGREGAT

Kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran mengalami perbaikan dengan meningkatnya kinerja sektor *tradables*. Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang meningkat mendorong meningkatnya pertumbuhan sektor *tradables* pada tahun 2011. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 6,2%, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,7% dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun tujuh tahun terakhir (Grafik 3.23). Namun, pertumbuhan sektor *tradables* belum cukup kuat untuk

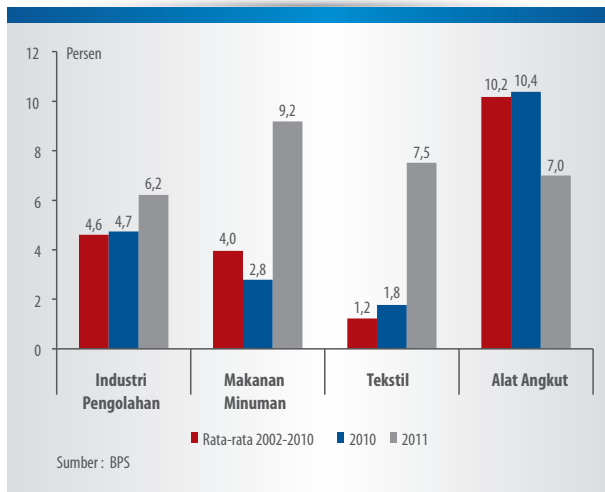


Grafik 3.22 Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang

melembi pertumbuhan sektor *non-tradables*. Hal ini disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor pertambangan dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, sementara kinerja sektor *nontradables* tetap bertahan di level pertumbuhan yang tinggi. Secara umum, sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

SEKTOR TRADABLES

Kinerja sektor *tradables* didukung oleh akselerasi pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berasal dari semakin tingginya pertumbuhan subsektor makanan dan minuman dan subsektor tekstil. Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman meningkat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi makanan yang meningkat. Sementara itu, pertumbuhan subsektor tekstil meningkat terkait dengan semakin kompetitifnya produk tekstil Indonesia. Kondisi ini didukung oleh Program Revitalisasi Mesin TPT dan adanya relokasi industri TPT dari China karena upah buruh di China yang semakin mahal. Meningkatnya kinerja subsektor TPT terlihat di sentra produksi di wilayah Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat yang tren pertumbuhan permintaannya meningkat terutama untuk wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kondisi tersebut menjadi penyeimbang terhadap penurunan permintaan dari perlambatan ekonomi AS dan Eropa. Sementara itu, kinerja subsektor alat angkut, khususnya di sentra otomotif di Jawa, diwarnai gangguan rantai pasokan otomotif akibat gempa Jepang pada triwulan II 2011 dan banjir Thailand pada triwulan IV 2011 sehingga pertumbuhannya mengalami perlambatan di tahun ini.

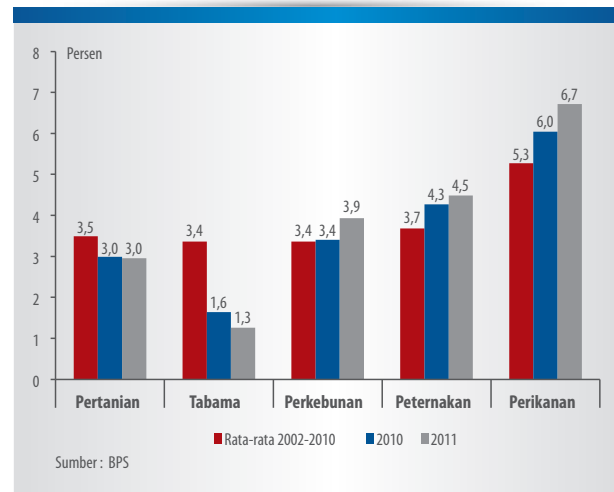


Grafik 3.23 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Prospek sektor industri pengolahan diperkirakan masih akan positif dengan dukungan kebijakan Pemerintah. Aturan baru *tax holiday* pada lima sektor terpilih yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2011 memberikan iklim yang semakin positif terhadap investasi di sektor riil ke depan. Kelima sektor terpilih tersebut adalah industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan telekomunikasi.

Kinerja sektor pertanian masih terbatas terutama karena permasalahan di subsektor tanaman bahan makanan. Sektor pertanian tumbuh stabil sebesar 3,0%, di bawah rata-rata historis 3,5% (Grafik 3.24). Kinerja subsektor tanaman bahan makanan masih mengalami permasalahan produksi terutama produksi padi yang berada dalam tren melambat akibat berkurangnya luas lahan dan terlambatnya musim hujan pada penghujung tahun. Sementara itu, kinerja subsektor perkebunan dan subsektor peternakan berada dalam tren meningkat sepanjang tahun. Demikian pula, kinerja subsektor perikanan yang lebih baik dari tahun lalu meskipun cenderung stabil sepanjang tahun.

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian tumbuh melambat akibat penyusutan alamiah, gangguan produksi, dan rendahnya investasi. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh melambat dari 3,6% pada tahun 2010 menjadi 1,4% pada tahun 2011, namun masih sedikit lebih tinggi dari historisnya 1,2% (Grafik 3.25). Penurunan kinerja tersebut berasal dari melambatnya kinerja pertambangan migas maupun nonmigas. Lemahnya kinerja pertambangan migas



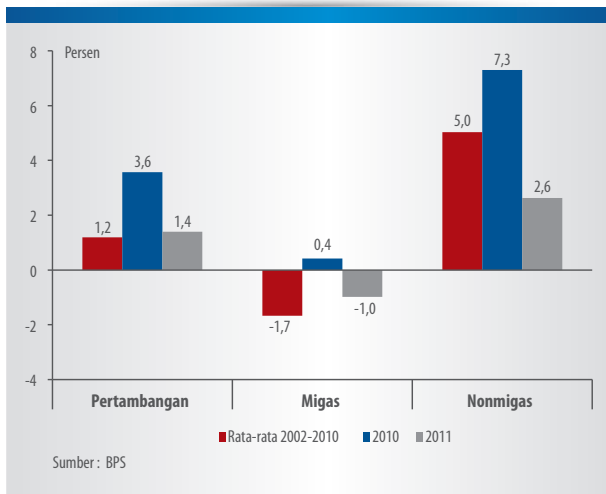
Grafik 3.24 Pertumbuhan Sektor Pertanian

terkait dengan lebih rendahnya realisasi produksi migas di bawah target yang ditetapkan BP Migas. Penyusutan alamiah tambang lama, beberapa gangguan produksi, dan tidak banyaknya eksplorasi tambang baru menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya produksi migas. Salah satu gangguan produksi tersebut adalah perbaikan infrastruktur pipa yang memengaruhi produksi migas di Riau sebagai sentra produksi migas.

Di sisi lain, kinerja subsektor pertambangan nonmigas juga tumbuh melemah. Produksi batubara masih tumbuh baik pada awal tahun, namun melambat sepanjang sisa tahun. Hal ini karena curah hujan tinggi yang membatasi kegiatan produksi seperti yang terjadi pada daerah produksi utama batubara di Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat gangguan produksi emas dan tembaga yang terjadi pada pertengahan dan penghujung tahun akibat aksi pemogokan karyawan yang berkepanjangan serta fase produksi rendah pada sentra produksi tambang tersebut di wilayah Papua dan Nusa Tenggara.

SEKTOR NONTRADABLES

Pada sektor *nontradables*, kinerja yang meningkat masih dapat dicapai oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Sektor ini tumbuh dari 8,7% pada tahun 2010 menjadi 9,2% pada tahun 2011 (Grafik 3.26). Peningkatan tersebut terkait dengan masih kuatnya aktivitas perekonomian domestik maupun masih tingginya impor yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan indeks penjualan eceran. Selain itu, beberapa momen libur panjang dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara terutama sejak triwulan II 2011 semakin mendorong



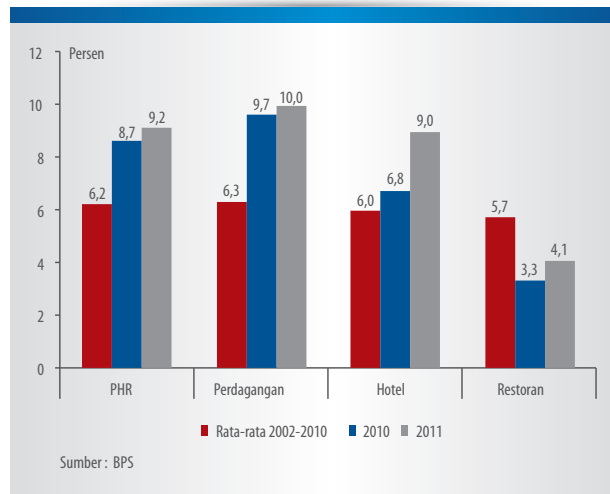
Grafik 3.25 Pertumbuhan Sektor Pertambangan

tingginya kinerja sektor tersebut, termasuk beberapa even terkait pelaksanaan ASEAN dan Sea Games 2011 di Jakarta dan Palembang.

Peningkatan kinerja juga terjadi pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa yang didukung oleh baiknya kondisi bisnis dan suku bunga yang relatif stabil. Sektor ini tumbuh dari 5,7% pada tahun 2010 menjadi 6,8% pada tahun 2011. Kredit perbankan dan pembiayaan perusahaan keuangan (*finance*) konsisten tumbuh tinggi sepanjang tahun. Kontribusi pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi perbankan yang meningkat pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 mencerminkan adanya dukungan sektor keuangan terhadap kegiatan dunia usaha yang meningkat. Sementara itu, jasa sewa bangunan tumbuh terus meningkat sepanjang tahun merespons meningkatnya permintaan ruang perkantoran dan usaha. Di sisi lain, jasa perusahaan terus mengalami perlambatan hingga akhir tahun.

Kinerja sektor *non-tradables* yang membaik juga terjadi pada sektor jasa-jasa yang tumbuh dari 6,0% pada tahun 2010 menjadi tahun 6,7% pada 2011. Membaiknya kinerja sektor ini berasal baik dari subsektor jasa swasta maupun jasa Pemerintahan. Jasa swasta terus tumbuh meningkat sepanjang tahun baik itu berupa jasa sosial, jasa hiburan, maupun jasa perorangan. Sementara itu, jasa Pemerintahan secara umum berada dalam tren yang meningkat meskipun sempat melambat pada triwulan II 2011.

Di sisi lain, kinerja sektor bangunan tumbuh sedikit melambat terkait pengaruh perlambatan investasi pada triwulan III 2011. Sektor bangunan tumbuh melambat

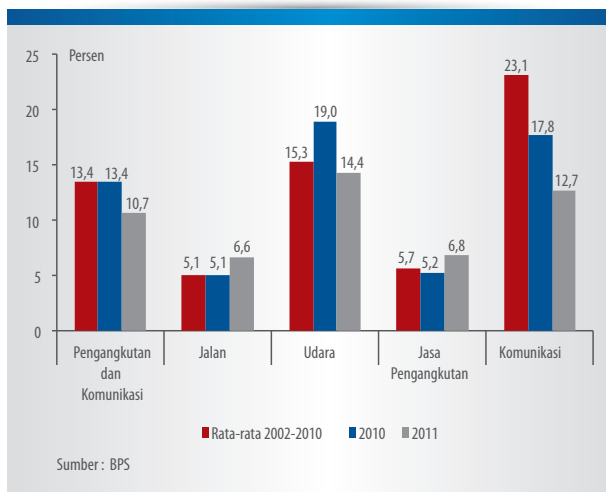


Grafik 3.26 Pertumbuhan Sektor PHR

dari 7,0% pada tahun 2010 menjadi 6,7% pada tahun 2011. Kinerja sektor ini masih meningkat pada paruh pertama dan triwulan akhir tahun 2011 dengan maraknya aktivitas konstruksi, namun melambat pada triwulan III 2011 karena pengaruh ketidakpastian global dan realisasi infrastruktur yang tidak secepat yang diharapkan.

Pelemahan kinerja juga terjadi pada sektor listrik, gas, dan air bersih akibat kendala pasokan dan kendala infrastruktur. Sektor ini tumbuh lebih rendah dari 5,3% pada tahun 2010 menjadi 4,8% pada tahun 2011. Menurunnya kinerja sektor tersebut berasal dari penurunan kinerja subsektor gas kota terkait kendala pasokan. Kinerja subsektor air bersih juga berada dalam tren yang melambat sepanjang tahun karena penambahan infrastruktur yang terbatas. Sementara itu, kinerja sektor listrik menunjukkan perbaikan meskipun terbatas seiring dengan tambahan pasokan beberapa pembangkit baru serta dukungan beberapa program penambahan pelanggan yang dilakukan PLN seperti program 1 juta sambungan sehari dan tambah daya gratis.

Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi masih terus mengalami perlambatan terutama pada subsektor komunikasi. Sektor ini tumbuh melambat dari 13,4% pada tahun 2010 menjadi 10,7% pada tahun 2011 (Grafik 3. 27). Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada subsektor komunikasi karena tingkat penetrasi pelanggan yang telah memasuki titik jenuh. Namun, perkembangan komunikasi data/internet yang cukup pesat dapat menjaga pertumbuhan subsektor tersebut tetap tinggi. Hal ini turut mendorong perbaikan kinerja subsektor ini di penghujung akhir

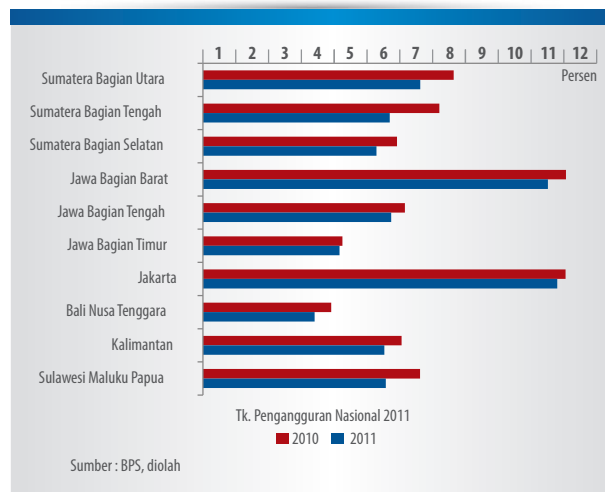


Grafik 3.27 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

2011. Di sisi lain, kinerja subsektor angkutan tumbuh membaik terutama ditopang oleh membaiknya kinerja angkutan jalan dan masih tingginya kinerja angkutan udara. Sementara itu, kinerja angkutan laut, angkutan danau, sungai, dan penyeberangan, serta angkutan rel cenderung melambat. Melemahnya angkutan rel terkait dengan penghapusan beberapa trayek kereta, kebijakan pembatasan penumpang yang meniadakan tiket berdiri khususnya pada kereta jarak jauh maupun adanya penghentian sementara beberapa perjalanan KRL Jabotabek pada penghujung tahun. Kinerja angkutan udara yang masih tinggi ditandai dengan maraknya pengadaan pesawat udara oleh beberapa maskapai maupun pembukaan rute-rute baru penerbangan.

3.4 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 juga disertai dengan peningkatan kualitas pertumbuhan dengan semakin membaiknya perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan.



Grafik 3.28 Tingkat Pengangguran berdasarkan Daerah

KETENAGAKERJAAN

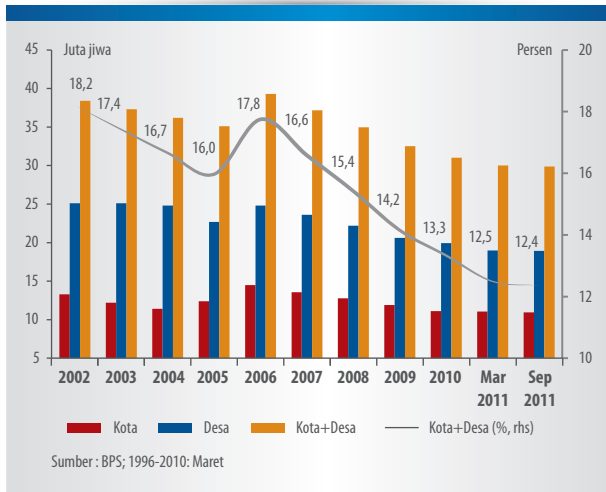
Perkembangan ketenagakerjaan membaik dengan menurunnya tingkat pengangguran. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,1% pada tahun 2010 menjadi 6,6% pada tahun 2011 (Tabel 3.4). Penurunan tersebut terjadi secara merata di seluruh daerah (Grafik 3.28). Selain itu, kualitas ketenagakerjaan juga mengalami perbaikan yang tercermin pada peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor formal dan yang berpendidikan di atas SD. Meningkatnya porsi sektor formal didukung oleh struktur ekonomi yang lebih *sustainable* yaitu meningkatnya sektor industri pengolahan, sebagai sektor yang banyak menyerap pekerja formal dan berpendidikan tinggi. Namun, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih tingginya pengangguran di Jakarta dan Jawa Barat yang bahkan di atas tingkat pengangguran nasional dan tingkat pekerja penuh waktu yang sedikit menurun di tahun ini.

Tabel 3.4 Angkatan Kerja dan Pengangguran

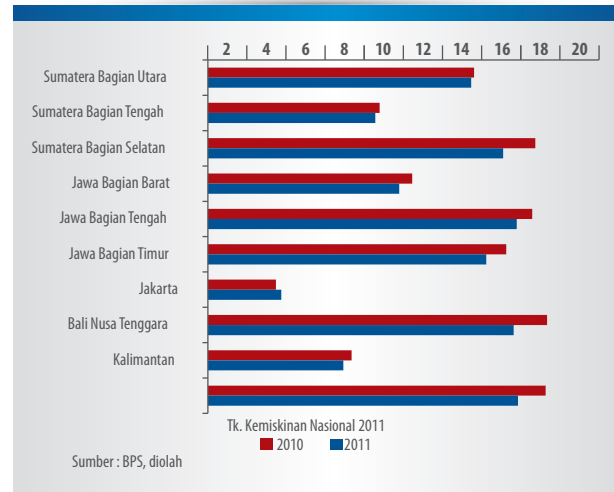
juta orang kecuali dinyatakan lain

No	Kegiatan Utama	2009	2010	2011
1	Penduduk Usia Produktif (15+)	169,3	172,1	171,7
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	67,2	67,7	68,3
2	Angkatan Kerja	113,8	116,5	117,4
	- Pekerja Penuh (persen)	64,4	64,3	64,0
	- Pekerja Paruh Waktu (persen)	14,2	15,5	17,9
	- Setengah Penganggur (persen)	13,5	13,1	11,5
	- Penganggur Terbuka (persen)	7,9	7,1	6,6

Sumber: BPS



Grafik 3. 29 Tingkat Kemiskinan



Grafik 3. 30 Tingkat Kemiskinan berdasarkan Daerah

KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan membaik dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin turun dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 12,36% pada tahun 2011 (Grafik 3. 29). Penurunan tersebut didukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang membaik, upah minimum yang naik, nilai tukar petani yang membaik, dan tingkat inflasi yang terjaga. Namun, penurunan penduduk miskin pada tahun laporan lebih rendah dibandingkan dengan penurunan pada tahun lalu meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun laporan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara antardaerah, tingkat kemiskinan tercatat masih tinggi di luar Jakarta (Grafik 3. 30). Selama tahun 2011, penurunan tingkat

kemiskinan terbesar terjadi di wilayah Sumatera bagian Selatan dan Wilayah Bali Nusa Tenggara, seiring dalamnya perlambatan inflasi di wilayah tersebut.

Kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin berkurang dengan menurunnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 2,21 pada tahun 2010 menjadi 2,05 pada tahun 2011 (Tabel 3. 5). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan. Hal yang sama terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang turun dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,53 pada tahun 2011 (Tabel 3. 6). Hal ini

Tabel 3. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2000	1,89	4,68	3,51
2001	1,74	4,68	3,42
2002	2,59	3,34	3,01
2003	2,55	3,53	3,13
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99
2008	2,07	3,42	2,77
2009	1,91	3,05	2,50
2010	1,57	2,80	2,21
Mar 2011	1,52	2,63	2,08
Sep 2011	1,48	2,61	2,05

Sumber: BPS, 2000-2010: Maret.

Tabel 3. 6 Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2000	0,51	1,39	1,02
2001	0,45	1,36	0,97
2002	0,71	0,85	0,79
2003	0,74	0,93	0,85
2004	0,58	0,90	0,78
2005	0,60	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1,00
2007	0,57	1,09	0,84
2008	0,56	0,95	0,76
2009	0,52	0,82	0,68
2010	0,40	0,75	0,58
Mar 2011	0,39	0,70	0,55
Sep 2011	0,39	0,68	0,53

Sumber : BPS, 2000-2010: Maret.

mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin menyempit. Disparitas antarpulau mengalami perbaikan meskipun masih terbilang besar yaitu dari 21,6% pada tahun 2010 menjadi 18,4% pada

tahun 2011. Persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan pada 2011 (6,9%) dan tertinggi di Maluku dan Papua (25,4%).

BOKS 3.1 | PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan investasi di Indonesia.

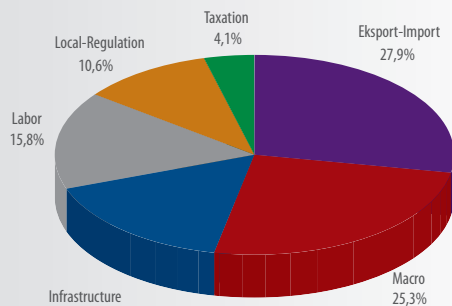
Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur tersebut, Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah proyek untuk memperbaiki kondisi infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 10.000 MW I dan II serta pembangunan jalan trans Jawa dan jalan tol di dalam kota Jakarta. Beberapa proyek tersebut menghadapi sejumlah kendala sehingga kemajuannya berjalan lambat. Secara umum, kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia masih dianggap rendah seperti yang ditunjukkan oleh *Global Competitiveness Index 2011*. Berdasarkan

indeks ini, kondisi infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 82 dari 139 negara yang disurvei, di bawah posisi negara-negara di kawasan, seperti Singapore peringkat 5, Malaysia peringkat 30, Thailand peringkat 35 dan China peringkat 50. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan MP3EI melalui salah satu pilarnya yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur fisik atau dikenal dengan program penguatan konektivitas nasional. Program ini mencakup rencana pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, kelistrikan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu kendala dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia adalah pengadaan lahan. Pengadaan tanah untuk membangun jalan, jembatan, waduk, transmisi listrik dan lain-lain seringkali mengalami kendala terkait pembebasan lahan. Sulitnya masalah pengadaan tanah tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum/non hukum. Selain itu, pelepasan tanah/aset yang diperlukan untuk pembangunan juga terkadang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Ketentuan pengadaan lahan telah ada namun implementasinya mengalami kendala. Salah satu kebijakan terkait dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun demikian, dalam prakteknya Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan proyek-proyek yang telah direncanakan karena terkendala masalah pembebasan tanah. Sehubungan dengan adanya berbagai proyek infrastruktur Pemerintah sebagaimana tertuang dalam MP3EI, kebutuhan akan penyempurnaan regulasi pengadaan tanah semakin meningkat. Melalui penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan *bottleneck* (sumbatan) berbagai proyek infrastruktur yang selama ini

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi



Sumber : Survei Daya Saing Perdagangan dan Investasi (Bappenas, 2008)

terjadi dapat diatasi. Selain itu, perselisihan antara Pemerintah atau pelaksana proyek dengan pemilik lahan akibat tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi, dapat diatasi secara layak dan adil serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Untuk mengatasi permasalahan pertanahan ini, DPR telah mengesahkan UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 14 Desember 2011. Selanjutnya, penerapan undang-undang tersebut ditargetkan akan berlaku efektif pada pertengahan tahun 2012 karena menunggu pembentukan aturan pelaksanaannya (Peraturan Presiden). Berdasarkan UU tersebut, proses pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan menjadi lebih transparan dan efisien. Sementara itu, kepentingan hukum pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut tetap dijamin dan mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.

Pengaturan pengadaan tanah melalui undang-undang juga umum diterapkan di negara-negara lain untuk menjamin kelancaran pembangunan. Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, dan Cina telah memiliki ketentuan terkait pengadaan lahan dan sebagian telah memberlakukan dalam bentuk undang-undang sejak tahun 1960. Pada prinsipnya pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di negara-negara tersebut relatif sama. Secara umum dalam UU tersebut antara lain diatur mengenai: (i) pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkena pengadaan tanah; (ii) penjelasan mengenai kepentingan umum yang dimaksud; (iii) ganti rugi/kompensasi terhadap pemilik hak secara layak dan adil; (iv) mekanisme banding yang adil dan transparan. Dengan pengaturan tersebut, masyarakat merasa terlindungi hak-haknya oleh hukum dan di sisi lain, pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan baik.

UU No. 2 Tahun 2012 pada dasarnya juga sejalan dengan praktek di negara-negara tersebut. Seluruh proses pengadaan lahan ditujukan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum masyarakat sebagai pihak yang berhak. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan dilalui dalam 4 (empat) tahapan. *Pertama*, dalam tahapan perencanaan, pengadaan tanah didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) instansi yang bersangkutan. *Kedua*, tahap persiapan meliputi pembuatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait yang membutuhkan lahan untuk pembangunan, yang mencakup pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan. *Ketiga*, dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pihak yang berhak atas tanah hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. *Terakhir*, pada tahap penyerahan hasil pengadaan tanah, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Pada proses pengadaan tanah tersebut, masyarakat sebagai pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat apabila terdapat ketidaksepakatan mengenai bentuk/besarnya ganti rugi tanah.

Implementasi UU No 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Walaupun diperkirakan baru akan efektif pada pertengahan tahun 2012 dan tidak berlaku surut namun peraturan ini akan menjadi salah satu kunci penyelesaian masalah klasik infrastruktur yaitu pembebasan lahan. Berbagai proyek infrastruktur yang telah direncanakan Pemerintah, sebagaimana tercermin dari rencana *ground breaking* empat proyek MP3EI pada tahun 2012, mulai dibangunnya beberapa ruas tol trans Jawa dan jalan tol area Jabodetabek serta rencana lelang tujuh pembangkit swasta pada tahun 2012 diharapkan dapat terlaksana setelah disahkannya UU No 2 Tahun 2012. Kedepan, undang-undang ini menjadi faktor penting bagi perekonomian Indonesia untuk

tumbuh tinggi dan berkesinambungan dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga melalui perbaikan infrastruktur dan selanjutnya perbaikan kapasitas dan produktivitas perekonomian domestik. Dengan dukungan undang-undang

tersebut, perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diharapkan mampu tumbuh sekitar 7% pada tahun 2016 diikuti oleh laju inflasi yang menurun secara gradual menuju $4,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2016.





Bab IV

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA



NERACA PEMBAYARAN INDONESIA



Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2011 menunjukkan kinerja yang relatif kuat dengan mencatat surplus sebesar 11,9 miliar dolar AS. Secara fundamental, kinerja NPI tersebut menggambarkan ketahanan perekonomian domestik terhadap gejolak eksternal sebagaimana tercermin dari meningkatnya kinerja neraca perdagangan dan peran investasi langsung asing (Foreign Direct Investments/FDI) dalam struktur aliran masuk modal asing. Surplus neraca perdagangan nonmigas meningkat tajam dari tahun sebelumnya, didorong oleh kinerja ekspor yang masih relatif kuat meski dihadapkan pada melemahnya permintaan dunia. Kuatnya kinerja ekspor tersebut antara lain ditopang oleh diversifikasi pasar tujuan ekspor ke negara-negara emerging Asia dengan karakteristik komoditas utama yang berbasis sumber daya alam. Sementara itu, meningkatnya peran investasi langsung asing didukung oleh tingginya kepercayaan investor atas kuatnya daya tahan dan membaiknya prospek ekonomi Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencatat peningkatan sehingga mampu menjadi penyangga dalam meredam gejolak eksternal.



4.1 KINERJA NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

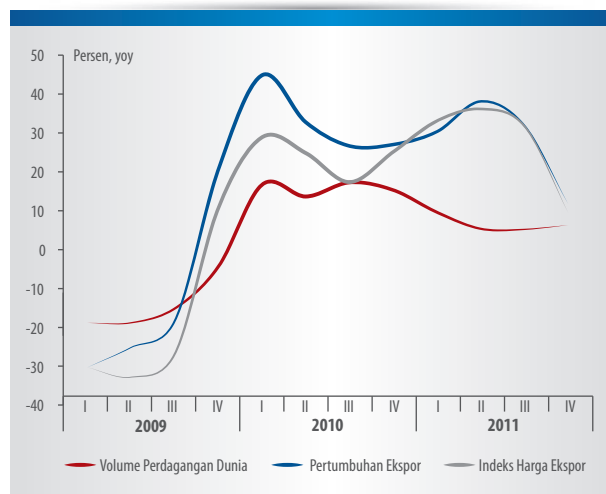
Kinerja NPI 2011 masih relatif kuat meskipun dihadapkan pada kondisi perekonomian dunia yang diliputi ketidakpastian. NPI secara keseluruhan mengalami surplus 11,9 miliar dolar AS, disumbang oleh surplus transaksi berjalan sebesar 2,1 miliar dolar AS dan surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai 14,0 miliar dolar AS. Secara kuartalan, NPI menunjukkan kinerja positif pada triwulan I dan II 2011 didukung kinerja neraca perdagangan, investasi langsung dan investasi portofolio. Namun pada paruh kedua 2011, NPI mengalami tekanan yang dipicu oleh keluarnya modal asing dari investasi portofolio dan terus meningkatnya impor.

Neraca perdagangan barang di 2011 mencatat surplus yang lebih tinggi dibanding surplus pada 2010. Permintaan dunia yang melemah, tercermin baik dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global maupun volume perdagangan dunia, belum berdampak signifikan pada kinerja ekspor Indonesia (Grafik 4.1). Pertumbuhan ekspor pada periode laporan masih cukup tinggi didukung oleh diversifikasi pasar tujuan ekspor ke negara-negara *emerging markets* Asia, karakteristik komoditas utama ekspor yang berbasis sumber daya alam, nilai tukar rupiah yang masih cukup kompetitif di kawasan, dan harga komoditas global yang masih tinggi. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama ekspor dan perkembangan harga komoditas global, kinerja ekspor yang meningkat tajam terutama terjadi pada semester I 2011. Sementara

itu, memasuki triwulan IV 2011, ekspor mengalami penurunan akibat permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah. Kondisi tersebut, disertai dengan terus meningkatnya impor sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, menyebabkan transaksi berjalan pada triwulan IV 2011 mengalami defisit.

Gejolak perekonomian dunia secara langsung memengaruhi dinamika transaksi modal dan finansial, khususnya investasi portofolio asing. Sejalan dengan perkembangan likuiditas global, investasi portofolio asing (sisi kewajiban) pada paruh pertama tahun 2011 mencatat surplus yang cukup signifikan. Namun, ketidakpastian penyelesaian krisis utang Eropa serta melambatnya perekonomian Amerika Serikat memberikan tekanan yang dalam pada kinerja investasi portofolio sehingga mencatat defisit pada triwulan III 2011. Defisit tersebut terutama bersumber dari dasarnya aliran keluar modal asing dari pasar saham domestik dan surat berharga sektor publik. Dalam perkembangan selanjutnya, persepsi pasar yang kembali positif mendorong kembalinya aliran masuk investasi portofolio pada triwulan IV 2011. Dengan dinamika tersebut, surplus investasi portofolio pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan surplus pada tahun 2010 sehingga berdampak pada menyusutnya surplus transaksi modal dan finansial.

Berbeda dengan kondisi perekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian, kondisi perekonomian domestik yang stabil dan semakin kondusifnya iklim investasi telah mendorong peningkatan peran investasi langsung asing dalam struktur aliran masuk modal



Grafik 4.1. Volume Perdagangan Dunia, Ekspor dan Harga Ekspor

Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

RINCIAN	2008	2009	2010	2011				Total **
				I*	II*	III*	IV**	
I. TRANSAKSI BERJALAN	126	10.628	5.144	2.072	473	468	-944	2.070
A. Barang, neto	22.916	30.932	30.627	8.684	9.637	9.586	7.440	35.347
- Ekspor, fob	139.606	119.646	158.074	45.818	51.797	52.476	51.382	201.472
- Impor, fob	-116.690	-88.714	-127.447	-37.134	-42.160	-42.890	-43.941	-166.125
1. Non-migas, neto	15.130	25.560	27.395	8.628	10.551	9.085	7.013	35.276
- Ekspor, fob	107.885	99.030	129.416	37.092	42.307	42.168	41.626	163.193
- Impor, fob	-92.755	-73.470	-102.021	-28.464	-31.756	-33.084	-34.613	-127.917
2. Minyak, neto	-8.362	-4.016	-8.653	-3.439	-5.098	-4.060	-3.712	-16.310
- Ekspor, fob	15.387	10.790	15.691	4.856	5.000	5.189	5.239	20.283
- Impor, fob	-23.749	-14.806	-24.344	-8.295	-10.098	-9.249	-8.952	-36.593
3. Gas, neto	16.147	9.388	11.886	3.495	4.184	4.562	4.140	16.381
- Ekspor, fob	16.333	9.826	12.968	3.870	4.490	5.119	4.517	17.996
- Impor, fob	-186	-438	-1.082	-375	-306	-557	-377	-1.615
B. Jasa, neto	-12.998	-9.741	-9.324	-2.122	-3.379	-2.818	-3.503	-11.823
C. Pendapatan, neto	-15.155	-15.140	-20.790	-5.518	-6.747	-7.344	-6.058	-25.667
D. Transfer Berjalan, neto	5.364	4.578	4.630	1.028	963	1.044	1.177	4.212
II. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL	-1.832	4.852	26.620	6.646	12.849	-4.107	-1.370	14.018
A. Transaksi Modal	294	96	50	1	0	0	0	1
B. Transaksi Finansial	-2.126	4.756	26.571	6.645	12.849	-4.107	-1.370	14.017
1. Investasi Langsung	3.419	2.628	11.106	3.461	3.249	1.661	2.066	10.437
1.1 Ke Luar Negeri	-5.900	-2.249	-2.664	-1.529	-2.526	-1.350	-2.317	-7.722
1.2 Di Indonesia (FDI)	9.318	4.877	13.771	4.990	5.775	3.011	4.383	18.160
2. Investasi Portofolio	1.764	10.336	13.202	3.588	5.537	-4.665	-261	4.198
2.1 Aset	-1.294	-144	-2.511	-521	-731	154	-318	-1.416
2.2 Kewajiban	3.059	10.480	15.713	4.109	6.268	-4.819	57	5.614
3. Investasi Lainnya	-7.309	-8.208	2.262	-404	4.062	-1.103	-3.174	-618
3.1 Aset	-10.755	-12.002	-1.725	-1.248	2.029	-3.203	-4.919	-7.341
3.2 Kewajiban	3.446	3.794	3.987	844	2.033	2.101	1.745	6.723
III. TOTAL (I + II)	-1.706	15.481	31.765	8.718	13.322	-3.639	-2.313	16.088
IV. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH	-238	-2.975	-1.480	-1.052	-1.446	-321	-1.413	-4.232
V. NERACA KESELURUHAN (III + IV)	-1.945	12.506	30.285	7.666	11.876	-3.960	-3.726	11.856
VI. CADANGAN DEvisa DAN YANG TERKAIT (A + B)	1.945	-12.506	-30.285	-7.666	-11.876	3.960	3.726	-11.856
Memorandum:								
Posisi Cadangan Devisa	51.639	66.105	96.207	105.709	119.655	114.502	110.123	110.123
(setara dengan bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah)	4,0	6,5	7,2	7,4	7,2	7,1	6,4	6,4

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

asing. Kuatnya daya tahan dan membaiknya prospek ekonomi Indonesia telah meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong peningkatan surplus investasi langsung, jauh melampaui surplus pada investasi portofolio. Peningkatan peran investasi langsung asing tersebut mampu menjadi bantalan

untuk mendukung kinerja NPI di tengah menurunnya surplus investasi portofolio akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global (Tabel 4.1).

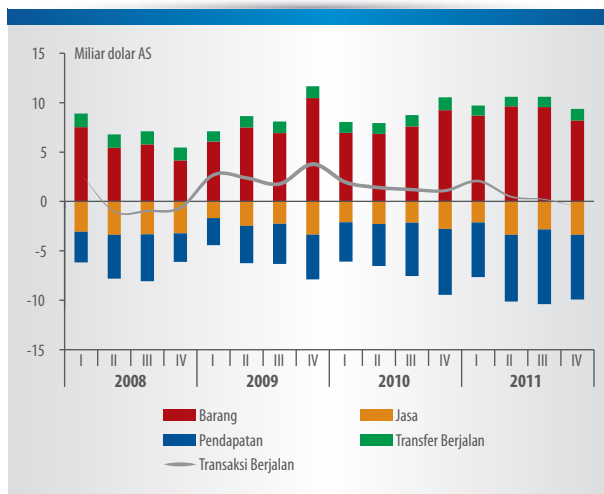
Sejalan dengan kinerja NPI 2011 yang relatif kuat, berbagai indikator kerentanan eksternal terpantau

membalik. Posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2011 meningkat hingga 110,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah. Di samping itu, beberapa indikator kerentanan eksternal lainnya juga membaik, seperti tercermin pada rasio utang luar negeri (ULN) terhadap PDB dan rasio ULN terhadap ekspor yang mengalami penurunan.

4.2 TRANSAKSI BERJALAN

Transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS (0,2% PDB), terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang tersebut didorong oleh kenaikan ekspor barang yang tinggi dan melampaui impor barang yang juga meningkat sejalan dengan akselerasi kegiatan ekonomi domestik. Surplus transaksi berjalan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya karena meningkatnya defisit neraca perdagangan jasa seiring peningkatan impor barang dan meningkatnya defisit neraca pendapatan terutama akibat besarnya pembayaran transfer keuntungan dan imbal hasil investasi kepada investor asing (Grafik 4.2).

Naiknya surplus neraca perdagangan barang ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas dan gas. Ekspor nonmigas yang tumbuh lebih tinggi dari impor menjadi penopang peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas. Adapun surplus neraca perdagangan gas meningkat didukung oleh kenaikan harga gas, seiring dengan naiknya harga minyak sedangkan volume ekspor gas mengalami penurunan. Di sisi lain, neraca perdagangan minyak



Grafik 4.2. Transaksi Berjalan

mengalami defisit yang melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor utama penyebab tingginya tekanan pada neraca perdagangan minyak yaitu penurunan produksi minyak mentah nasional yang diiringi oleh konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat di tengah peningkatan harga minyak.

PERKEMBANGAN EKSPOR

Ekspor barang mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi didorong oleh produk pertambangan dan industri berbasis sumber daya alam (SDA). Nilai ekspor tercatat sebesar 201,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 27,5% dari tahun sebelumnya (Tabel 4.2). Komoditas yang mencatat pertumbuhan tinggi masih didominasi oleh produk pertambangan dan industri berbasis SDA seperti batubara dan minyak sawit. Adapun pertumbuhan

Tabel 4.2. Perkembangan Ekspor

Rincian	Nilai (Juta dolar AS)		Pangsa (%)		Pertumbuhan (%)	
	2010	2011**	2010	2011**	2010	2011**
Pertanian	4.991	5.157	3,2	2,6	14,8	3,3
Manufaktur ¹⁾	101.740	127.269	64,4	63,2	32,9	25,1
Pertambangan ¹⁾	49.733	66.719	31,5	33,1	32,6	34,2
Lainnya ¹⁾	1.610	2.327	1,0	1,2	31,7	44,5
Total Ekspor	158.074	201.472	100,0	100,0	32,1	27,5
- Nonmigas	129.416	163.193	81,9	81,0	30,7	26,1
- Minyak	15.691	20.283	9,9	10,1	45,4	29,3
- Gas	12.968	17.996	8,2	8,9	32,0	38,8

¹⁾ Termasuk Migas

***) Angka sangat sementara

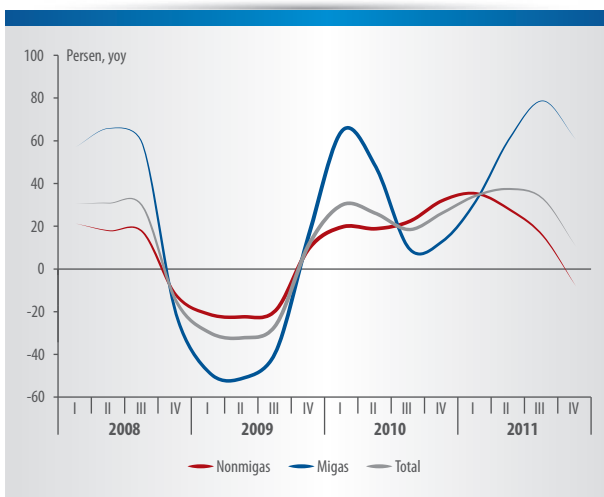
ekspor produk pertanian sangat rendah, antara lain sebagai dampak dari rendahnya tingkat produksi seiring dengan faktor cuaca yang kurang kondusif dan adanya kebijakan pengenaan bea keluar, seperti pada biji kakao, untuk mendorong proses hilirisasi di dalam negeri. Kinerja nilai ekspor yang meningkat didukung oleh kenaikan volume ekspor nonmigas, sedangkan volume ekspor minyak dan gas mengalami penurunan. Peningkatan volume ekspor nonmigas sejalan dengan naiknya kegiatan produksi dan penambahan kapasitas di sektor-sektor tersebut seperti industri minyak kelapa sawit serta tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sementara itu, nilai ekspor migas juga mengalami kenaikan meskipun terdapat permasalahan di sisi produksi. Secara nominal, ekspor minyak mengalami peningkatan sebesar 29,3% dari 15,7 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi 20,3 miliar dolar AS pada tahun 2011. Kenaikan ekspor minyak tersebut lebih karena pengaruh faktor harga yang meningkat. Secara volume, ekspor minyak mentah justru lebih rendah dari tahun sebelumnya sebagai dampak dari produksi minyak mentah nasional yang menurun. Produksi minyak mentah nasional menurun dari rata-rata 0,945 juta barel per hari pada tahun 2010 menjadi sekitar 0,902 juta barel per hari pada tahun laporan. Kondisi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur minyak yang semakin tua, sedangkan pembukaan sumur-sumur baru relatif masih terbatas. Selain itu, penurunan produksi minyak yang disebabkan oleh adanya berbagai kendala seperti gangguan teknis dan *unplanned shutdown*. Nilai ekspor gas pada periode laporan juga meningkat menjadi 18,0 miliar dolar AS, dari 13,0 miliar dolar AS pada tahun 2010. Volume ekspor gas mengalami penurunan karena adanya pengalihan kontrak ekspor

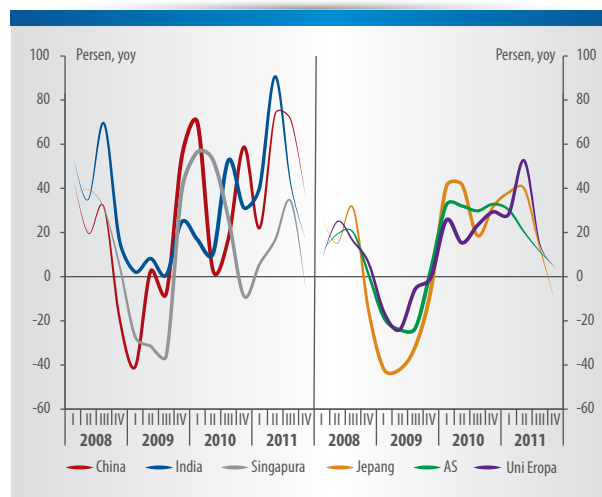
yang sudah habis masa berlakunya untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Ekspor migas terutama masih ditujukan ke beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Kuatnya ekspor pada tahun laporan juga dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global. Harga komoditas global, terutama harga minyak, cenderung meningkat sebagai dampak dari krisis geopolitik yang terjadi di Timur Tengah sehingga mengganggu pasokan minyak dunia (Grafik 4.3). Kenaikan harga minyak juga dipengaruhi oleh aktivitas spekulatif, yang menjadikan komoditas minyak sebagai *safe haven asset* di saat terjadinya gejolak di pasar keuangan dunia. Sementara itu, harga komoditas nonmigas juga meningkat cukup tinggi, khususnya di awal tahun, meskipun kemudian melambat pada semester II 2011. Peningkatan harga komoditas nonmigas terutama terjadi pada komoditas karet, minyak sawit, dan batubara, seiring dengan masih kuatnya permintaan dunia khususnya dari negara-negara Asia.

Kemampuan dalam memanfaatkan perdagangan intraregional (*intra-regional trade*) di kawasan Asia memperkuat pertumbuhan ekspor Indonesia. Ketika permintaan eksternal dari negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang mengalami penurunan, diversifikasi pasar menjadi bantalan bagi kinerja ekspor. Diversifikasi pasar tujuan ekspor terutama ditujukan ke negara-negara *emerging markets* Asia seperti China dan India yang pertumbuhan ekonominya masih relatif tinggi didukung oleh permintaan domestiknya yang kuat. Hal itu juga semakin diperkuat dengan karakteristik komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut yang terutama digunakan untuk konsumsi domestik,



Grafik 4.3 Indeks Harga Ekspor Indonesia



Grafik 4.4. Pertumbuhan Ekspor Menurut Negara Tujuan

seperti energi dan komoditas pangan, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan volume perdagangan dunia. Pertumbuhan ekspor pada tahun laporan ke negara-negara *emerging markets* Asia seperti China dan India mencatat peningkatan (Grafik 4.4). Dengan perkembangan tersebut, pangsa ekspor ke negara-negara *emerging markets* Asia tersebut terus mengalami kenaikan.

Meskipun nilai tukar rupiah mengalami apresiasi, namun secara riil masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara kawasan sehingga turut mendukung kuatnya kinerja ekspor Indonesia. Selama tahun laporan, perkembangan nilai tukar yang bergerak stabil mendukung daya saing ekspor Indonesia. Pada tahun 2011, apresiasi nominal rupiah rata-rata mencapai 3,6%, melambat dari tahun 2010 yang tercatat sebesar 14,1%. Apresiasi nilai tukar nominal tersebut relatif lebih tinggi dari apresiasi yang juga terjadi di berbagai negara di kawasan. Namun secara riil, nilai tukar rupiah masih cukup kompetitif sehingga mampu mendukung kinerja ekspor.

Dari sisi daya saing, komoditas ekspor yang berbasis sumber daya alam masih memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Berdasarkan indikator *Revealed Comparative Advantage* (RCA), komoditas ekspor yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi khususnya komoditas berbasis sumber daya alam, seperti minyak sawit mentah (CPO), batubara, dan karet masih tumbuh positif di tengah gejolak ekonomi global (Tabel 4.3). Namun, kondisi itu menjadi tantangan yang perlu dicermati mengingat komoditas berbasis sumber daya alam tersebut memiliki nilai tambah yang relatif kecil dan pasokannya kurang elastis dalam merespons meningkatnya permintaan.

PERKEMBANGAN IMPOR

Impor barang tahun 2011 tumbuh cukup tinggi terutama didorong oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kebutuhan konsumsi dan investasi. Nilai impor (cif) pada tahun laporan tercatat sebesar 176,4 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 30,3%. Impor kelompok bahan baku/penolong dan barang modal tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan investasi dan produksi di dalam negeri (Tabel 4.4). Pertumbuhan impor kelompok bahan baku/penolong terutama didorong oleh kelompok barang makanan/minuman dan bahan pasokan untuk industri. Sementara itu, pertumbuhan impor kelompok barang konsumsi juga cukup tinggi, meskipun lebih rendah dari tahun lalu, sejalan dengan peningkatan konsumsi nasional. Impor pada periode laporan terutama masih didominasi oleh barang-barang yang berasal dari Singapura, China, dan Jepang terutama berupa impor kelompok barang modal dan bahan baku/barang penolong.

Impor minyak dan gas mengalami peningkatan akibat rendahnya tingkat produksi migas domestik di tengah meningkatnya laju konsumsi. Impor BBM dan LPG meningkat seiring dengan kuatnya laju pertumbuhan perekonomian domestik. Selain volume yang meningkat, impor migas tersebut juga dipicu oleh faktor kenaikan harga yang cukup signifikan. Impor minyak mentah terutama berasal dari kawasan Timur Tengah dengan jenis minyak seperti *ALC (Arab Light Crude)*, dan sisanya berasal dari Brunei, China, dan Malaysia. Sementara itu, peningkatan impor produk minyak, terutama dalam bentuk BBM, juga tidak terhindarkan sebagai dampak dari terus menurunnya produksi minyak mentah nasional di saat laju konsumsi BBM

Tabel 4.3. Daya Saing Komoditas Ekspor Nonmigas

Persen

Komoditas	Pertumbuhan Volume (yoy)		Pangsa terhadap Ekspor Nonmigas	
	2010	2011**	2010	2011**
Batubara	26,9	21,8	13,7	16,6
Minyak Sawit Mentah	-3,0	2,1	10,5	10,7
Tekstil	12,0	-2,6	8,9	8,3
Peralatan Listrik	17,8	-0,5	9,9	8,1
Produk Kimia	18,9	15,7	6,9	7,8
Karet	20,6	9,2	5,7	7,2
Tembaga	3,1	-35,3	7,5	5,3
Mesin dan Mekanik	15,1	-3,7	5,5	5,3
Kertas	8,6	1,6	4,3	3,5

■ RCA > 1 daya saing kuat

■ RCA < 1 atau mendekati 0, daya saing sangat lemah

Sumber: UN Comtrade (diolah)

***) Angka sangat sementara

Tabel 4.4. Perkembangan Impor (c.i.f)

Rincian ¹⁾	Nilai (juta dolar AS)		Pangsa (%)		Pertumbuhan (%)	
	2010	2011**	2010	2011**	2010	2011**
Barang Konsumsi ²⁾	16.826	23.261	12,4	13,2	58,4	38,2
Bahan Baku/Bahan Penolong ²⁾	92.098	119.785	68,1	67,9	45,6	30,1
Barang Modal ²⁾	24.983	32.361	18,5	18,3	28,7	29,5
Lainnya ²⁾	1.417	948	1,0	0,5	175,4	-33,1
Total Impor	135.323	176.355	100,0	100,0	44,3	30,3
Nonmigas	108.026	135.922	79,8	77,1	39,5	25,8
Minyak	26.101	38.725	19,3	22,0	64,4	48,4
Gas	1.196	1.708	0,9	1,0	146,9	42,8

¹⁾ Berdasarkan kategori ekonomi (Broad Economic Category/BEC)

²⁾ Termasuk migas

** Angka sangat sementara

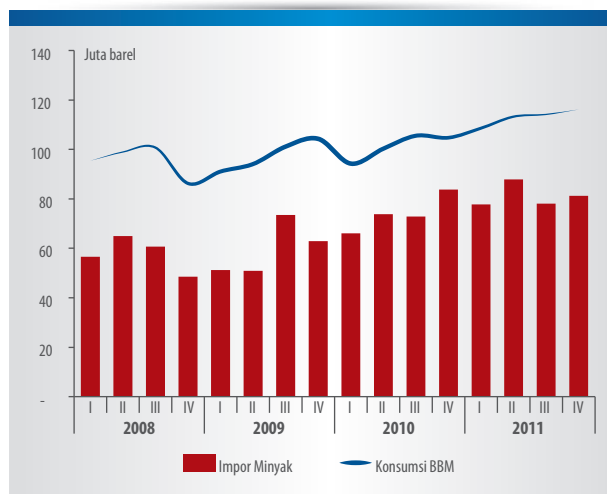
semakin meningkat (Grafik 4.5). Konsumsi BBM pada periode laporan meningkat menjadi 450,5 juta barel dari 404,9 juta barel pada tahun 2010, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Peningkatan konsumsi BBM terutama disebabkan oleh tingginya penggunaan BBM oleh sektor transportasi.

NERACA JASA, PENDAPATAN, DAN TRANSFER BERJALAN

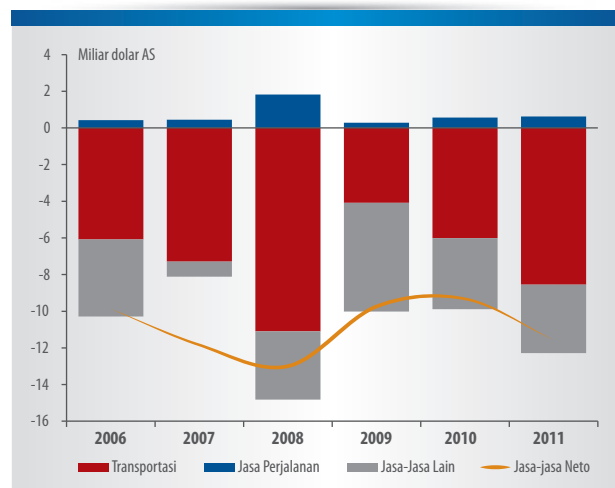
Neraca perdagangan jasa mengalami kenaikan defisit sejalan dengan peningkatan ekonomi domestik. Defisit pada tahun 2011 mencapai 11,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan defisit 9,3 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Peningkatan defisit tersebut terutama karena melebarnya defisit jasa transportasi seiring dengan kenaikan impor barang, baik migas maupun nonmigas (Grafik 4.6). Sementara

itu, jasa perjalanan masih mencatat surplus ditopang oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2011 mencapai rekor tertinggi yakni sebesar 7,7 juta kunjungan, didukung oleh banyaknya agenda berskala internasional yang diselenggarakan di dalam negeri. Wisman tersebut terutama berasal dari Singapura, Jepang, dan Belanda, dengan tujuan utama masih terkonsentrasi pada tiga wilayah utama, yaitu Bali, Jakarta, dan Batam.

Defisit neraca pendapatan meningkat signifikan, dipicu oleh kenaikan transfer laba (*profit transfer*) perusahaan asing di Indonesia maupun imbal hasil dari investasi portofolio. Defisit neraca pendapatan meningkat dari 20,8 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi 25,7 miliar dolar AS pada tahun 2011. Tingginya transfer laba perusahaan asing menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh investor asing



Grafik 4.5. Impor Minyak dan Konsumsi BBM



Grafik 4.6. Perkembangan Neraca Jasa

dalam berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan di Indonesia dalam tahun laporan. Peningkatan tersebut terutama dicapai oleh perusahaan-perusahaan pada sektor-sektor utama seperti sektor migas dan sektor pertambangan lainnya. Sementara itu, peningkatan imbal hasil pada investasi portofolio sejalan dengan masih cukup tingginya posisi kepemilikan asing pada instrumen-instrumen investasi portofolio, kecuali posisi kepemilikan asing pada SBI yang telah jauh berkurang sebagai dampak dari penerapan kebijakan masa endap minimum 6 bulan (*6-month holding period*) sejak bulan Mei 2011.

Surplus neraca transfer berjalan mengalami penyusutan terutama karena meningkatnya pembayaran remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) sedangkan penerimaan remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak mencatat peningkatan. Surplus neraca transfer berjalan menurun menjadi 4,2 miliar dolar AS pada tahun 2011 antara lain karena meningkatnya pembayaran remitansi oleh TKA menjadi sebesar 2,1 miliar dolar AS. Di sisi lain, penerimaan remitansi TKI masih relatif sama dengan tahun sebelumnya yakni sekitar 6,7 miliar dolar AS. Remitansi TKI yang relatif tetap tersebut terutama disebabkan oleh turunnya jumlah penempatan TKI selama tahun 2011. Penurunan tersebut antara lain disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI oleh Pemerintah ke beberapa negara penempatan, seperti Saudi Arabia dan Malaysia. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membenahi sistem perekrutan dan pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya untuk sektor informal. Meskipun mengalami penurunan jumlah penempatan, penerimaan remitansi TKI relatif stabil karena adanya peningkatan gaji serta adanya pergeseran komposisi TKI

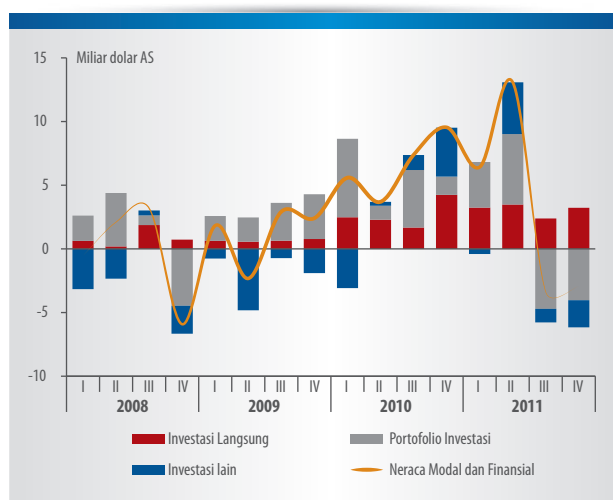
di beberapa negara penempatan dari sektor informal ke sektor formal.

4.3 TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL

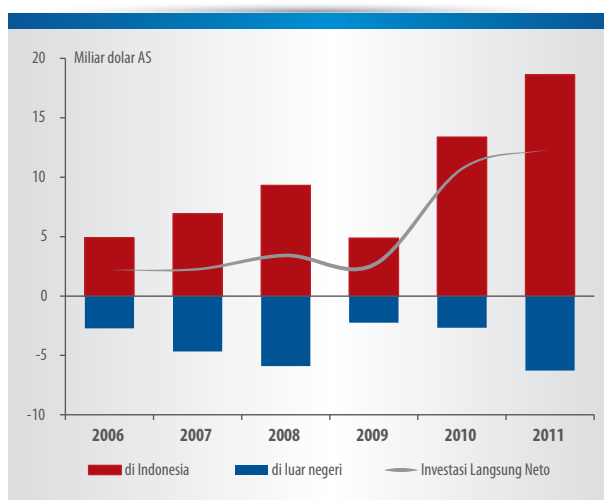
Transaksi modal dan finansial tahun 2011 mencatat surplus sebesar 14,0 miliar dolar AS terutama didukung oleh surplus transaksi investasi langsung. Surplus tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya (26,6 miliar dolar AS) akibat lebih kecilnya surplus transaksi investasi portofolio. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada tahun laporan memiliki struktur yang lebih baik, terlihat dari dominasi surplus investasi langsung yang jauh melampaui surplus investasi portofolio (Grafik 4.7). Kondisi itu menyebabkan struktur aliran modal masuk menjadi lebih berkesinambungan sehingga mampu menjadi bantalan (*cushion*) untuk mendukung tetap kuatnya kinerja NPI.

INVESTASI LANGSUNG

Kuatnya daya tahan dan membaiknya prospek ekonomi Indonesia meningkatkan kepercayaan investor asing sehingga mendorong semakin meningkatnya peran investasi langsung dalam struktur aliran modal masuk. Surplus investasi langsung asing atau FDI meningkat menjadi 18,2 miliar dolar AS pada tahun 2011, sehingga peran investasi langsung asing dalam aliran modal masuk jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, di sisi aset, aliran investasi langsung Indonesia ke luar negeri meningkat menjadi 7,7 miliar dolar AS pada tahun 2011. Dengan perkembangan tersebut, investasi langsung neto pada



Grafik 4.7. Transaksi Modal dan Finansial



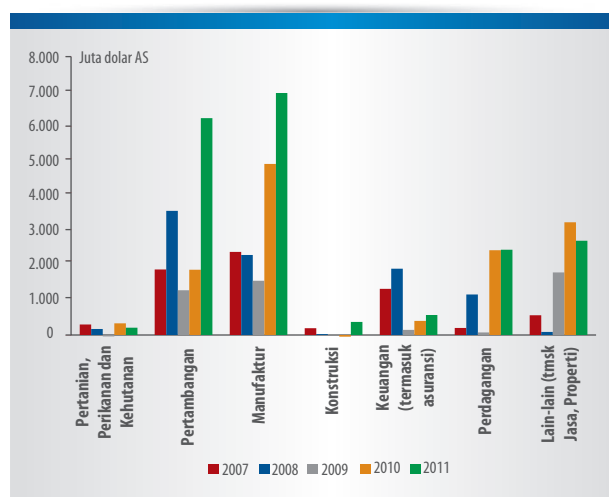
Grafik 4.8. Perkembangan Investasi Langsung

tahun laporan tercatat sebesar 10,4 miliar dolar AS (Grafik 4.8).

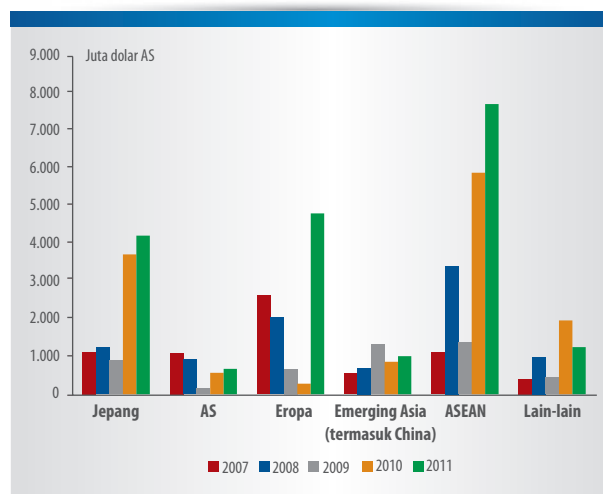
Industri manufaktur dan pertambangan masih menjadi sektor utama investasi langsung asing pada periode laporan. Investasi langsung asing pada sektor industri manufaktur tercatat sebesar 7,4 miliar dolar AS (Grafik 4.9). Adapun investasi langsung asing pada sektor pertambangan meningkat menjadi sebesar 4,2 miliar dolar AS, setelah pada tahun 2010 hanya sebesar 1,9 miliar dolar AS. Tingginya eskpektasi harga minyak dan harga komoditas pertambangan lainnya menjadi insentif bagi para investor untuk meningkatkan investasi langsung asing pada kedua sektor tersebut.

Berdasarkan negara asal investasi, kontributor utama aliran masuk investasi langsung asing, yaitu investor Jepang dan negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Singapura. Pangsa investasi Jepang mencapai 25,9% dari total investasi langsung asing pada periode laporan, atau sebesar 4,7 miliar dolar AS. Adapun pangsa investasi negara-negara di kawasan ASEAN mencapai 45,5%, atau mencapai 8,3 miliar dolar AS (Grafik 4.10).

Meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia juga tercermin dari peringkat investasi yang terus membaik. Sepanjang tahun laporan, berbagai lembaga pemeringkat menaikkan peringkat Indonesia, dan bahkan pada akhir tahun 2011 Indonesia kembali mencapai status peringkat layak investasi. Pencapaian tersebut semakin meningkatkan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia sehingga ke depan aliran



Grafik 4.9. Investasi Langsung Asing Menurut Sektor Ekonomi



Grafik 4.10. Investasi Langsung Asing Menurut Negara Asal

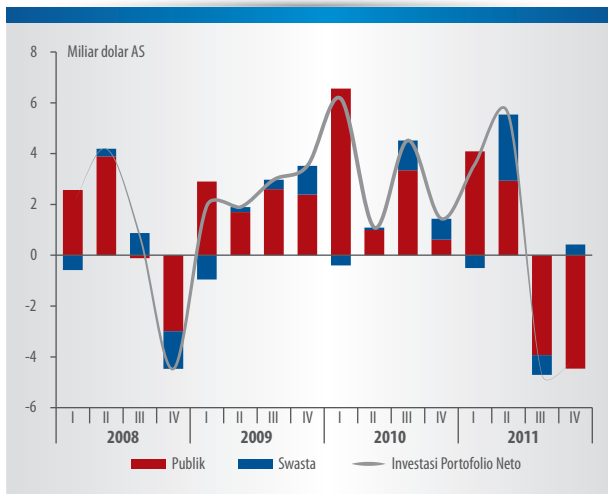
investasi langsung asing diprakirakan akan semakin meningkat.

INVESTASI PORTOFOLIO

Transaksi investasi portofolio mengalami penurunan tajam, terutama pada paruh kedua periode laporan, akibat terkena imbas gejala perekonomian global. Aliran masuk investasi portofolio asing (sisi kewajiban) berkurang dari 15,7 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi 5,6 miliar dolar AS pada tahun 2011. Dalam periode yang sama, investasi portofolio Indonesia di luar negeri (sisi aset) turun dari 2,5 miliar dolar AS menjadi 1,4 miliar dolar AS. Dengan demikian, secara neto, investasi portofolio pada tahun laporan mencatat surplus sebesar 4,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun sebelumnya sebesar 13,2 miliar dolar AS.

Akumulasi surplus investasi portofolio asing (sisi kewajiban) yang terjadi sepanjang semester I 2011 mengalami penyusutan tajam pada paruh kedua akibat sentimen negatif yang bersumber dari gejala di pasar keuangan (Grafik 4.11). Penurunan tajam investasi portofolio asing terutama terjadi pada instrumen surat utang sektor publik, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah.

Transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh asing pada tahun 2011 mencatat aliran keluar neto (*net outflows*) sebesar 5,4 miliar dolar AS. Kondisi tersebut dipicu oleh gejala di pasar keuangan global sehingga menyebabkan adanya penyesuaian portofolio asing ke *safe haven asset* (denominasi dolar), besarnya SBI jatuh tempo yang tidak diperpanjang, dan diberlakukannya



Grafik 4.11. Investasi Portofolio

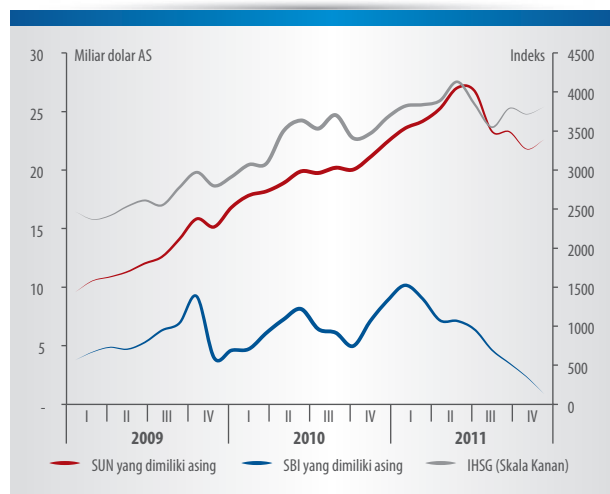
kebijakan masa endap minimum untuk SBI oleh Bank Indonesia menjadi 6 bulan (*6-month holding period*) sejak Mei 2011. Penerapan kebijakan masa endap minimal SBI tersebut telah mengurangi sifat likuid SBI sehingga berdampak pada rendahnya aliran masuk modal asing pada instrumen tersebut. Dengan perkembangan tersebut, pangsa investor asing dalam kepemilikan SBI menyusut dari 27,45% pada akhir tahun 2010 menjadi 6,51% pada akhir tahun 2011.

Kepemilikan asing pada SBN Rupiah pada periode laporan juga mengalami penurunan tajam. Porsi kepemilikan asing pada SBN Rupiah sempat mencatat peningkatan tajam dari 29,9% pada bulan Desember 2010 menjadi sebesar 35,0% pada pertengahan September 2011. Porsi tersebut merupakan porsi tertinggi selama tahun 2011, didukung oleh relatif tingginya imbal hasil, kesinambungan fiskal yang terjaga, dan kondisi makroekonomi yang stabil. Namun, terjadinya penyesuaian portofolio asing ke *safe haven asset* terutama pada pertengahan September hingga awal Oktober 2011 menyebabkan terjadinya pelepasan kepemilikan SBN Rupiah oleh investor asing. Dengan adanya penyesuaian tersebut, porsi kepemilikan asing pada SBN Rupiah turun kembali menjadi sebesar 29,8%. Dengan perkembangan tersebut, SBN Rupiah selama tahun 2011 hanya mencatat aliran masuk neto sebesar 3,2 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatat aliran masuk neto sebesar 9,7 miliar dolar AS. Meski demikian, adanya persepsi positif terhadap prospek fundamental ekonomi Indonesia mendorong permintaan investor asing terhadap *global bond* dan *SUKUK* valas yang diterbitkan Pemerintah tetap tinggi. Pada periode

laporan, Pemerintah menerbitkan *global bond* dan *SUKUK* valas masing-masing sebesar 2,5 miliar dolar AS dan 1,0 miliar dolar AS.

Di sektor swasta, gejolak pasar keuangan global juga berdampak pada kinerja pasar saham domestik. Kondisi tersebut terefleksikan dalam pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berfluktuasi sepanjang tahun laporan (Grafik 4.12). Prospek positif kinerja saham pada paruh pertama tahun 2011 mendorong derasnya aliran masuk modal asing sehingga IHSG mencatat rekor tertinggi yakni sebesar 4.130 pada bulan Juli 2011. Namun, sentimen negatif akibat gejolak perekonomian dunia pada akhir triwulan III 2011 mengakibatkan investor asing melakukan penyesuaian portofolionya di pasar saham, yang menyebabkan pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah. Dengan perkembangan tersebut, transaksi asing di instrumen saham sepanjang tahun 2011 mengalami aliran keluar neto sebesar 0,3 miliar dolar AS, setelah pada periode tahun 2010 mencatat aliran masuk neto sebesar 2,1 miliar dolar AS.

Secara sektoral, melemahnya kinerja IHSG terutama disebabkan oleh tekanan jual pada saham-saham sektor pertambangan, infrastruktur, dan pertanian, yang masing-masing terkoreksi sebesar 22,7%, 14,6%, dan 6,1%. Pelemahan pada saham sektor pertambangan antara lain dipengaruhi oleh ekspektasi koreksi harga minyak dan komoditas bahan tambang lainnya seiring dengan perkiraan penurunan permintaan dunia terhadap komoditas tersebut. Namun, saham beberapa sektor lainnya, seperti sektor konsumsi dan aneka industri, masih menunjukkan peningkatan didukung oleh stabilnya pertumbuhan konsumsi nasional.

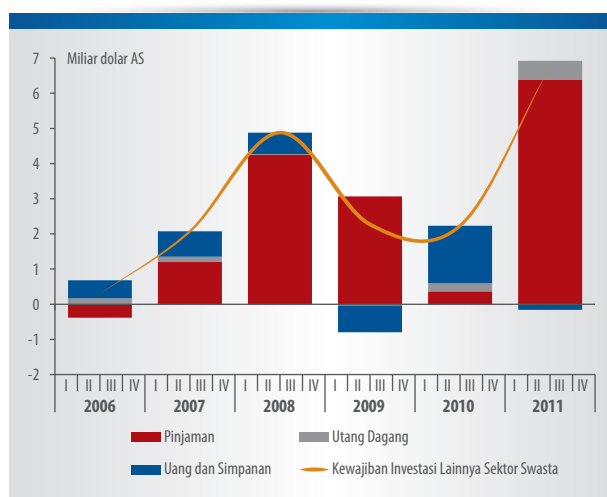


Grafik 4.12. IHSG dan Posisi Kepemilikan SBI dan SUN oleh Asing

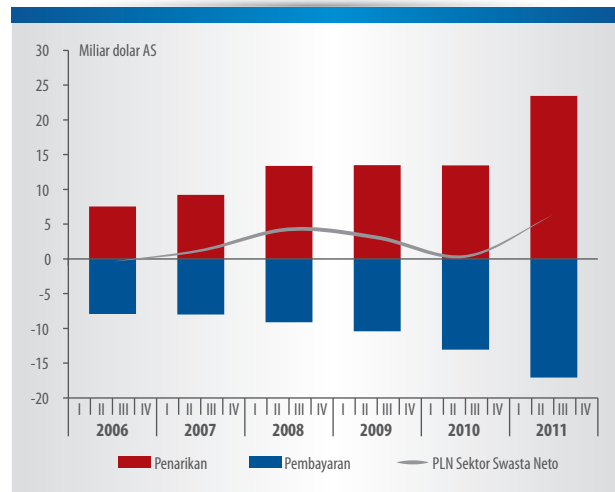
INVESTASI LAINNYA

Transaksi investasi lainnya mengalami defisit karena meningkatnya penempatan dana simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri. Transaksi investasi lainnya pada tahun laporan mengalami defisit sebesar 0,6 miliar dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus 2,3 miliar dolar AS. Defisit tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan dana simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor nonmigas. Namun, defisit investasi lainnya yang lebih tajam dapat tertahan oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri (PLN) swasta sebagai dampak dari tingginya kebutuhan pembiayaan di dalam negeri (Grafik 4.13).

Kenaikan pinjaman luar negeri terutama terjadi pada sektor swasta. Surplus investasi lainnya sektor swasta meningkat menjadi 9,0 miliar dolar AS. Peningkatan investasi lainnya sektor swasta tersebut terutama disebabkan oleh melonjaknya penarikan PLN menjadi 24,4 miliar dolar AS (Grafik 4.14). Meskipun pembayaran PLN sektor swasta juga mengalami peningkatan, namun secara neto PLN sektor swasta masih mencatat surplus yang cukup tinggi yakni sebesar 7,5 miliar dolar AS. Meningkatnya pembiayaan sektor swasta yang berasal dari PLN tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang semakin meningkat, juga didukung oleh relatif stabilnya kurs rupiah sepanjang tahun laporan sehingga dapat terhindar dari risiko nilai tukar. Di sektor publik, rasio utang luar negeri pemerintah menurun sejalan dengan turunnya penarikan pinjaman luar negeri.



Grafik 4.13. Kewajiban Investasi Lainnya Sektor Swasta

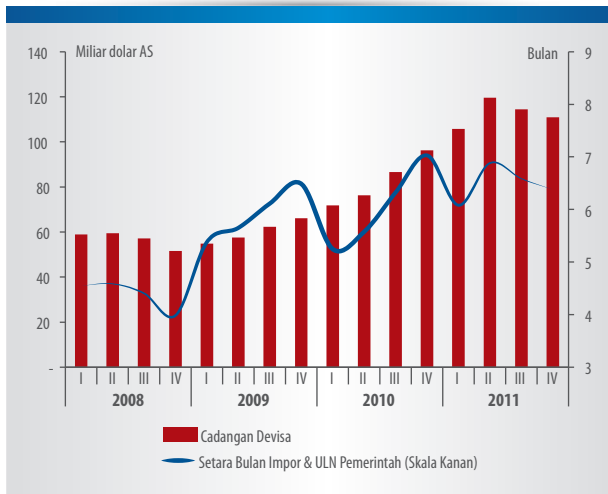


Grafik 4.14. Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Sektor Swasta

Transaksi investasi lainnya sektor publik mengalami defisit 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2011, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus 1,8 miliar dolar AS. Defisit tersebut terutama akibat turunnya penarikan PLN pemerintah, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, yang masing-masing tercatat hanya sebesar 1,6 miliar dolar AS dan 1,9 miliar dolar AS. Rendahnya penarikan PLN tersebut disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan pembiayaan Pemerintah antara lain terkait rendahnya realisasi defisit APBN dan masih tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan. Adapun pembayaran PLN pemerintah pada tahun laporan sebesar 5,5 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.

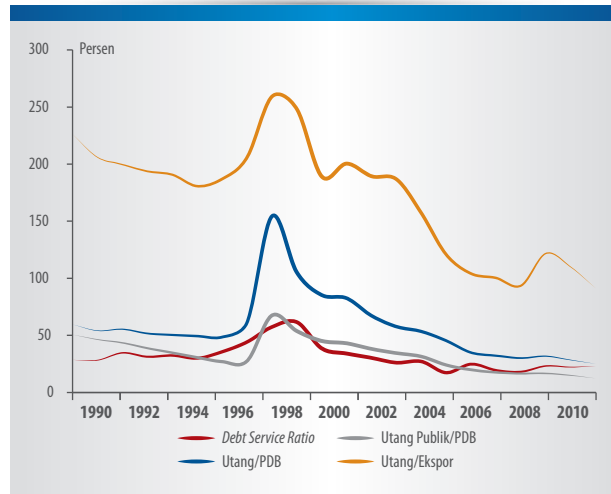
4.4 CADANGAN DEvisa DAN INDIKATOR KERENTANAN EKSTERNAL

Di tengah gejolak pasar uang valas, cadangan devisa masih dalam posisi aman. Posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2011 mencatat peningkatan hingga mencapai 110,1 miliar dolar AS (Grafik 4.15). Posisi cadangan devisa sempat mencapai rekor tertingginya pada Agustus 2011, yakni sebesar 124,6 miliar dolar AS, didorong oleh derasnya aliran modal asing khususnya pada semester I 2011. Namun, posisi cadangan devisa kemudian mengalami penurunan terkait dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya pada paruh kedua 2011, akibat adanya gejolak eksternal yang dipicu oleh krisis utang pemerintah di Eropa dan terhambatnya proses pemulihan ekonomi di AS.



Grafik 4.15. Perkembangan Cadangan Devisa

Sejalan dengan kinerja NPI 2011 yang relatif kuat, berbagai indikator kerentanan eksternal terpantau mengalami perbaikan (Grafik 4.16). Di sisi solvabilitas, rasio posisi ULN terhadap PDB dan rasio posisi ULN terhadap ekspor menurun masing-masing menjadi 26,5% dan 96,8%. Sementara rasio pembayaran ULN



Grafik 4.16. Indikator Kerentanan Eksternal

terhadap ekspor (*debt service ratio*) relatif stabil sekitar 22,5%. Di sisi likuiditas, rasio posisi cadangan devisa terhadap ULN jangka pendek meningkat menjadi 2,4. Adapun rasio posisi cadangan devisa terhadap impor masih dalam posisi aman karena mampu memenuhi 6,7 bulan impor.





Bab V

NILAI TUKAR



NILAI TUKAR

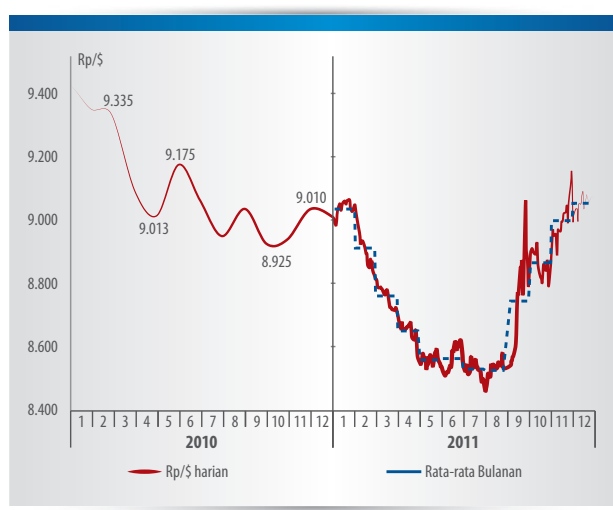


Nilai tukar rupiah pada tahun 2011 secara rata-rata menguat, sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara regional. Dari sisi domestik, penguatan nilai tukar tersebut terutama didukung oleh kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, indikator risiko yang relatif stabil, serta imbal hasil aset rupiah yang tinggi sehingga mendorong minat investor asing untuk melakukan investasi di pasar keuangan domestik. Sementara dari sisi eksternal, kinerja nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh fluktuasi aliran modal asing yang diwarnai oleh dinamika dan kebijakan ekonomi global. Pada semester I 2011, pelonggaran moneter negara-negara maju berdampak pada semakin melimpahnya likuiditas global, dan dengan semakin melebarnya perbedaan suku bunga antara negara maju dengan negara berkembang, mendorong masuknya aliran modal ke kawasan Asia termasuk Indonesia. Kondisi ini mendorong nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatannya yang telah terjadi pada tahun 2010. Namun pada triwulan III 2011, meningkatnya faktor ketidakpastian yang muncul akibat krisis utang di Eropa dan permasalahan pemulihan ekonomi AS memicu sentimen negatif dan menyebabkan keluarnya aliran modal asing dari Indonesia. Sejak periode tersebut nilai tukar rupiah cenderung melemah disertai dengan volatilitas yang meningkat.



5.1 KINERJA NILAI TUKAR

Pada tahun 2011, penguatan nilai tukar rupiah diwarnai oleh beberapa koreksi terkait dengan meningkatnya ekspektasi inflasi pada awal tahun dan meningkatnya risiko ekonomi global yang berlanjut hingga akhir tahun. Pada tahun 2011, rupiah secara rata-rata menguat sebesar 3,56% dari Rp9.080 per dolar AS menjadi Rp8.768 per dolar AS. Namun, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global berdampak pada tertahannya penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi hingga akhir semester I 2011. Pada akhir tahun, rupiah ditutup melemah 0,64% menjadi Rp9.068 per dolar AS dibandingkan dengan Rp9.010 per dolar AS pada akhir 2010 (Grafik 5.1). Perkembangan serupa juga tercermin pada tingkat volatilitas nilai tukar rupiah yang terus

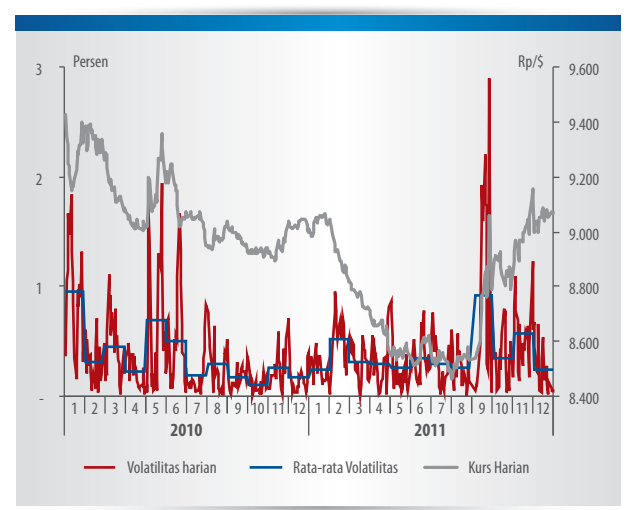


Grafik 5.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

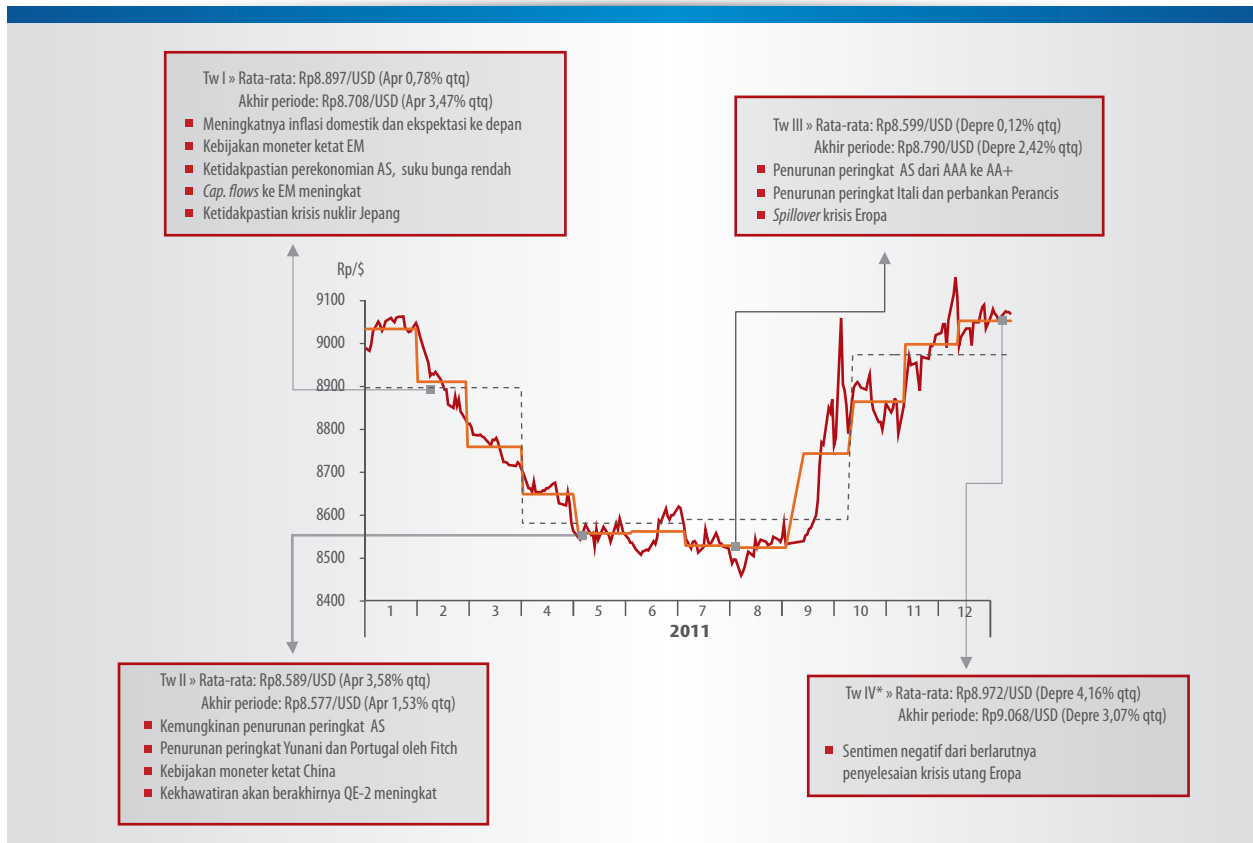
menurun hingga pertengahan tahun mencapai 0,32%, selanjutnya meningkat pada semester II menjadi 0,43%. Secara rata-rata tahunan, volatilitas pada tahun 2011 menjadi 0,38% meningkat dibandingkan dengan 0,35% pada tahun 2010 (Grafik 5.2).

Kuatnya prospek ekonomi domestik dan menariknya imbal hasil investasi rupiah mendorong penguatan nilai tukar yang terjadi hampir sepanjang semester I 2011. Kekhawatiran terhadap peningkatan ekspektasi inflasi berhasil diredam. Pada awal tahun, tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi yang sempat meningkat memunculkan kekhawatiran investor nonresiden sehingga melakukan penyesuaian kepemilikannya di investasi portofolio rupiah. Namun, respons kebijakan Bank Indonesia dalam meredam peningkatan ekspektasi inflasi berupa kenaikan BI Rate sebesar 25 bps pada bulan Februari 2011 berdampak positif terhadap perkembangan nilai tukar yang terus menguat hingga akhir semester I 2011. Di sisi lain, di tengah faktor ketidakpastian global yang tinggi, perkembangan makroekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang terjaga, kesinambungan fiskal dan utang luar negeri yang terkelola dengan baik serta stabilnya kondisi pasar keuangan di Indonesia mendorong terus meningkatnya aliran masuk modal asing baik di Surat Berharga Negara (SBN) maupun saham.

Meningkatnya faktor risiko global yang terjadi pada semester II 2011 kembali memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Ketidakpastian kondisi global yang meningkat terutama terkait dengan rambatan krisis utang dan fiskal kawasan Eropa, penurunan peringkat kredit AS oleh Standard and Poor's (S&P) terkait dengan ketidaksinambungan keuangan pemerintah AS, dan



Grafik 5.2 Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

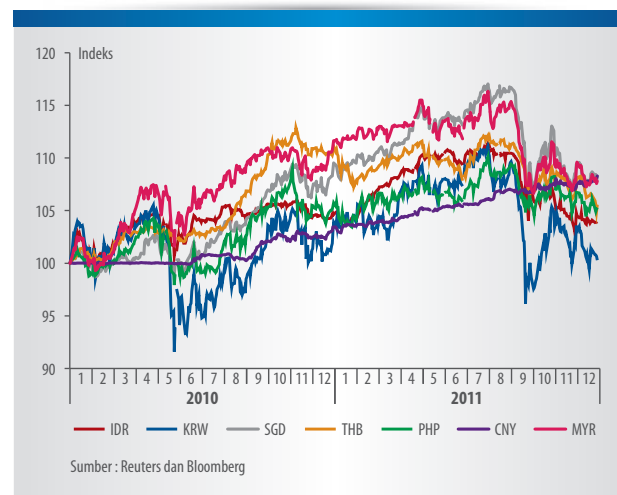


Grafik 5.3 Analisa Rangkaian Kejadian dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

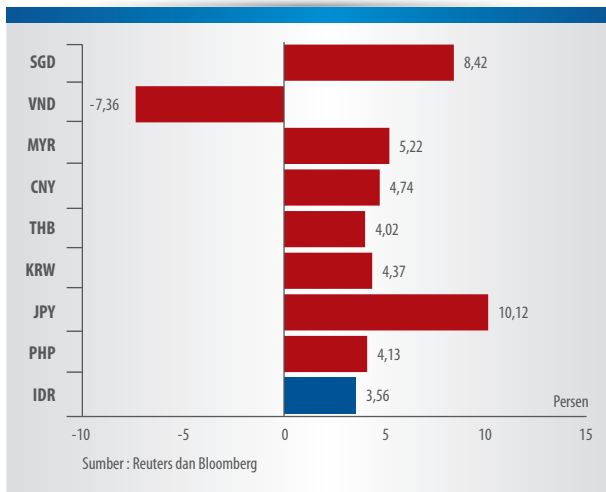
indikasi perlambatan ekonomi dunia yang semakin menguat. Kondisi itu pada gilirannya mengakibatkan investor menyesuaikan investasi portofolio dari negara berkembang ke negara maju yang dipersepsikan lebih aman, seperti investasi portofolio di surat utang pemerintah AS. Di Indonesia, investor asing keluar dari investasi portofolio baik di SBN maupun saham. Sebagai akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan hingga akhir tahun (Grafik 5.3).

Laju penguatan nilai tukar rupiah bergerak dalam skala yang terukur dan sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara regional. Pada tahun 2011, apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, daya saing Indonesia masih cukup kompetitif (Grafik 5.4 dan Grafik 5.5), meskipun apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup besar. Dengan demikian, daya saing Indonesia yang tercermin dari *real effective exchange rate* (REER) secara umum relatif sama dengan negara-negara di kawasan. Meskipun meningkat hingga pertengahan tahun, rata-rata REER kawasan selama tahun 2011 masih mengalami tren menurun seiring dengan melemahnya perkembangan nilai tukar terhadap dolar AS. Kisaran fluktuasi nilai

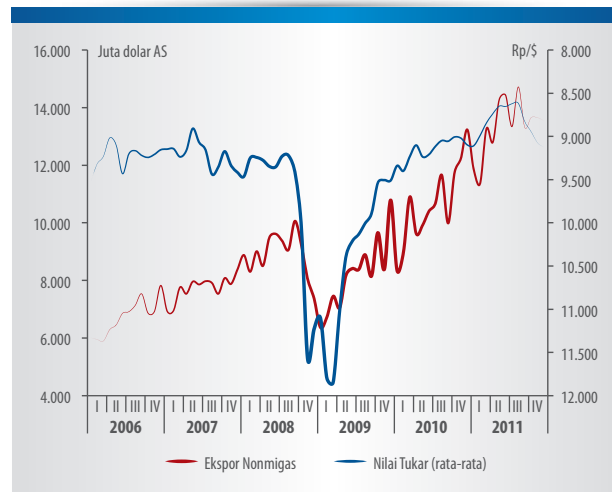
tukar rupiah yang dicapai saat itu juga konsisten dengan keseimbangan internal dan eksternal makro serta kondusif untuk memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi baik di sektor riil maupun keuangan. Kondisi tersebut diiringi oleh perkembangan harga komoditas global berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor nonmigas pada tahun laporan. (Grafik 5.6).



Grafik 5.4 Nilai Tukar terhadap Dolar AS



Grafik 5.5 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan



Grafik 5.6 Nilai Tukar Rupiah dan Ekspor Nonmigas

5.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI

Kestabilan nilai tukar rupiah selama tahun 2011 didukung oleh fundamental domestik ekonomi yang terus membaik di tengah meningkatnya ketidakpastian dan risiko ekonomi dunia. Dari sisi eksternal, akses likuiditas global pasca pelonggaran kebijakan moneter dan injeksi likuiditas beberapa bank sentral dunia pada masa krisis tahun 2008 dan terus berlanjutnya program pembelian aset oleh beberapa bank sentral tetap menjadi sumber aliran dana ke negara berkembang. Kebijakan suku bunga rendah di negara maju guna mendorong pertumbuhan ekonomi menyebabkan investor mencari lokasi penempatan dana yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Beberapa negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, yang fundamental ekonominya lebih baik menjadi tujuan utama penempatan dana global itu. Kondisi itu juga diperkuat dengan imbal hasil investasi di pasar keuangan yang menarik sehingga pada gilirannya memberikan dampak rambatan terhadap apresiasi rupiah.

Dalam perkembangannya, dinamika perekonomian global sempat memberikan tekanan terhadap rupiah. Penurunan peringkat kredit Portugal dan Yunani oleh Fitch pada April dan Mei 2011 memudarkan optimisme atas prospek ekonomi global yang tumbuh pada awal tahun. Tekanan krisis kemudian meluas ke Italia dan Spanyol pada bulan September 2011 yang juga diperburuk dengan penurunan peringkat kredit AS oleh Moody's. Kondisi tersebut selanjutnya memicu

penarikan investasi portofolio dari sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, dan menimbulkan tekanan depresiasi terhadap mata uang domestik.

Fluktuasi dan pelemahan rupiah yang terjadi dapat dikelola dengan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Tetap positifnya kondisi fundamental makroekonomi domestik dan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang selama beberapa tahun mencatatkan surplus merupakan penopang kekuatan (*cushion*) nilai tukar terhadap berbagai tekanan eksternal. Sejalan dengan NPI yang mencatat surplus, cadangan devisa terus meningkat mencapai 110,1 miliar dolar AS pada akhir tahun 2011 yang turut memperkuat kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah. Jumlah cadangan devisa Indonesia cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik impor maupun pembayaran utang luar negeri jangka pendek pemerintah serta untuk mengantisipasi pembalikan arus modal asing, khususnya dalam bentuk investasi portofolio.

Perkembangan fundamental makroekonomi domestik yang terus membaik juga berdampak positif terhadap membaiknya indikator investasi pada instrumen keuangan rupiah. Beberapa indikator risiko menunjukkan perkembangan yang membaik selama tahun 2011 sebagaimana tercermin pada peningkatan peringkat Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional dan peningkatan *country risk index*. Lembaga pemeringkat internasional S&P pada tanggal 8 April 2011 menaikkan *long-term foreign currency rating* Indonesia dari BB menjadi BB+, dengan prospek positif. Sementara itu, *sovereign rating* RI untuk *long-term local currency* tidak berubah, tetap

Tabel 5.1 *Sovereign Rating* Indonesia (Per Desember 2011)

	MOODY'S	S&P	FITCH	R&I	JCR
Investment Grade	Aaa	AAA	AAA	AAA	AAA
	Aa1	AA+	AA+	AA+	AA+
	Aa2	AA	AA	AA	AA
	Aa3	AA-	AA-	AA-	AA-
	A1	A+	A+	A+	A+
	A2	A	A	A	A
	A3	A-	A-	A-	A-
	Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+
	Baa2	BBB	BBB	BBB	BBB
	Baa3	BBB-	BBB- (Stable)	BBB-	BBB- (Stable)
Non-Investment Grade	Ba1 (Stable)	BB+ (Pos)	BB+	BB+ (Pos)	BB+
	Ba2	BB	BB	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-	BB-	BB-
	B1	B+	B+	B+	B+
	B2	B	B	B	B
	B3	B-	B-	B-	B-
	Caa	CCC	CCC	CCC	
	Caa2	CCC	CCC	CCC	CCC
	Caa3	CCC-	CCC-	CCC-	
	Ca	CC	CC	CC+	CC
	C	C	C	CC	C
		D	D	CC-	D

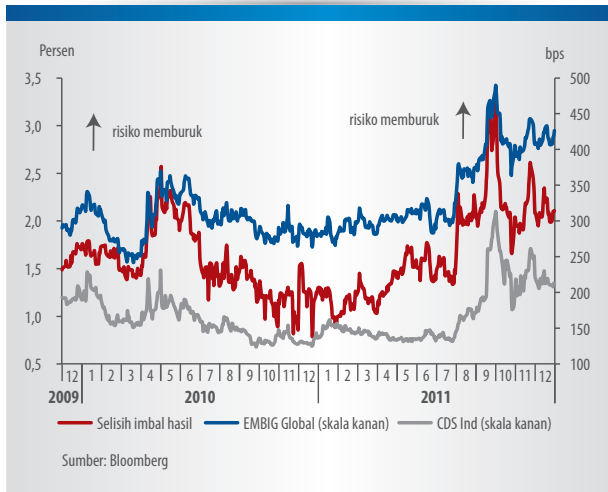
Indonesia
R & I = Rating and Investment Information, Inc.
JCR = Japan Credit Rating Agency, Ltd.

di tingkat BB+ dengan prospek positif. Peningkatan peringkat ini, membawa *sovereign rating* Indonesia berdasarkan penilaian S&P menjadi 1 *notch* lagi menuju *investment grade* (peringkat layak investasi). Kepercayaan terhadap prospek perekonomian domestik terus menguat sebagaimana tercermin dari masuknya Indonesia pada kelompok layak investasi (*investment grade*). Pada akhir tahun 2011, Fitch kembali meningkatkan peringkat menjadi layak investasi BBB- dengan prospek stabil. Sebelumnya Fitch memberikan *up grade sovereign* Indonesia menjadi BB+ dengan prospek positif pada tanggal 24 Februari 2011 (Tabel 5.1).

Ketidakpastian kondisi ekonomi global mendorong meningkatnya indikator persepsi risiko di Indonesia. Pada paruh pertama 2011, berbagai indikator risiko terus menunjukkan perbaikan. Indikator *Credit Default Swap* (CDS) pada paruh pertama 2011 terus menurun dan bahkan sempat mencapai 125,19 (Grafik 5.7). Sementara itu, indikator risiko lainnya yaitu selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah Indonesia dan

US T-Note terus turun hingga akhir semester I 2011 menjadi 1,57%. Membaiknya berbagai indikator risiko tersebut juga didukung oleh kondusifnya imbal hasil rupiah yang tercermin pada selisih negatif antara *NDF rate (offshore)* dengan *forward rate* dalam negeri (*onshore*).

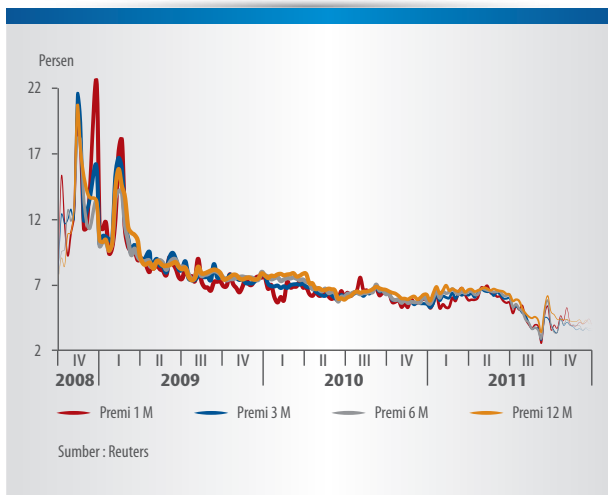
Pada triwulan III 2011, berbagai indikator risiko memburuk seiring dengan terus meningkatnya ketidakpastian terhadap krisis utang dan fiskal di negara maju dan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global yang memburuk. CDS ditutup menjadi 217, lebih tinggi dari 128,25 pada akhir tahun 2010. Secara *point to point* (ptp), selisih imbal hasil antara surat utang Indonesia dan US T-Note juga mengalami kenaikan menjadi 2,65% (ptp) dari 1,63% pada tahun 2010 (Grafik 5.7). Sementara itu, adanya pengalihan aset yang terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian global berdampak pada *spread NDF rate* dan *forward rate* yang kembali menjadi positif. Kondisi premi swap berbagai tenor yang sempat terus turun juga mengalami kenaikan di akhir tahun (Grafik 5.8).



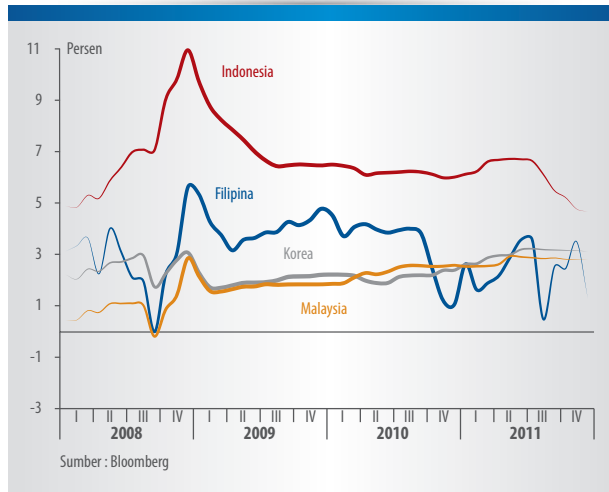
Grafik 5.7 Indeks Risiko dan Selisih Imbal Hasil

Dalam skala kawasan, investasi di aset rupiah masih memberikan keuntungan yang lebih kompetitif. Indikator imbal hasil investasi di aset rupiah yang tercermin dari selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri (*Uncovered Interest Parity* - UIP) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan regional Asia (Grafik 5.9). Bahkan jika memperhitungkan premi risiko, daya tarik investasi dalam rupiah masih tetap tinggi. Hal itu tercermin dari tren indikator *Covered Interest Parity* (CIP) yang masih lebih tinggi dari negara kawasan (Grafik 5.10).

Perkembangan nilai tukar selama tahun 2011 yang bergerak dalam skala yang terukur tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Terpeliharanya kestabilan nilai tukar merupakan hasil dari kebijakan moneter dan perbankan Bank Indonesia serta didukung oleh fiskal

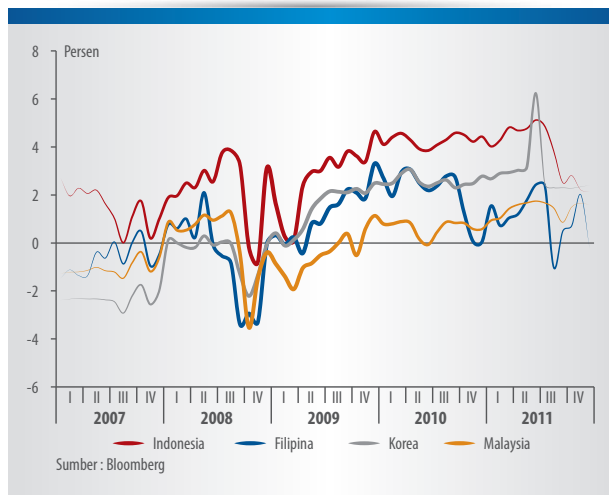


Grafik 5.8 Premi Swap



Grafik 5.9 Uncovered Interest Parity (UIP)

dan utang luar negeri yang dikelola dengan baik. BI Rate diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan. Untuk memperkuat upaya penurunan inflasi tersebut, Bank Indonesia juga membuka ruang yang lebih besar bagi penguatan nilai tukar rupiah seiring dengan derasnya aliran masuk modal asing dan kecenderungan penguatan nilai tukar negara-negara kawasan (Boks 5.1). Menghadapi tingginya ketidakpastian dan kerentanan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial melalui kebijakan pengelolaan aliran modal asing yang telah ditempuh tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar derasnya aliran masuk modal asing, khususnya yang berjangka pendek dan cenderung spekulatif, tidak menimbulkan dampak yang berlebihan pada penguatan nilai tukar rupiah, akses likuiditas domestik, dan peningkatan



Grafik 5.10 Covered Interest Parity (CIP)

risiko instabilitas di pasar keuangan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memberlakukan pembatasan posisi harian pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan sebesar maksimum 30% dari modal bank pada Januari 2011, menaikkan GWM valuta asing dari sebelumnya 1% menjadi 5% pada bulan Maret 2011 dan kemudian menjadi 8% pada bulan Juni 2011, serta memperpanjang masa endap kepemilikan SBI dari sebelumnya minimum 1 bulan menjadi minimum 6 bulan (*six month holding period*) pada Mei 2011. Sementara itu, untuk meminimalkan ketergantungan terhadap aliran modal jangka pendek, meningkatkan kesinambungan pasokan devisa di pasar valas domestik dan mendorong pendalaman pasar valas, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan penarikan devisa utang luar negeri (DULN) melalui Bank Devisa di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan pada 3 Oktober 2011 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2012. Kebijakan DHE dan DULN tersebut masih tetap dalam koridor Undang-undang Lalu Lintas Devisa No. 24 tahun 1999.

5.3 PERKEMBANGAN PASAR VALUTA ASING DI DOMESTIK

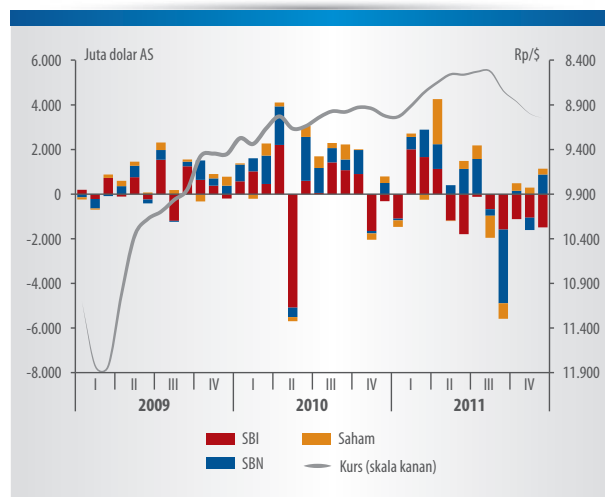
Perkembangan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh pasokan di pasar valas yang mengalami surplus selama semester I dan defisit di semester II. Selama semester I 2011 baik pelaku asing maupun domestik mencatat pasokan valas neto masing-masing sebesar 6,32 miliar dolar AS dan 961 juta dolar AS. Dengan demikian, secara keseluruhan pasar valas domestik pada semester I 2011 mengalami surplus sebesar 7,3 miliar dolar AS. Hal itu sejalan dengan aliran masuk modal asing pada investasi portofolio rupiah di antaranya saham dan SBN. Kondisi surplus di pasar valas domestik mendorong apresiasi rupiah. Sementara itu, selama semester II 2011 baik pelaku domestik maupun asing mencatat permintaan valas neto masing-masing sebesar 4,28 miliar dolar AS dan 9,69 miliar dolar AS. Secara keseluruhan pasar valas domestik pada semester II 2011 mengalami defisit sebesar 13,97 miliar dolar AS sehingga mendorong depresiasi rupiah.

Pembelian valas oleh korporasi domestik terus meningkat sejalan dengan pola akhir tahun guna pembayaran ULN dan kebutuhan impor sejalan dengan ekspansi ekonomi domestik. Sementara itu, di sisi pelaku asing, pasokan valas terus meningkat hingga Agustus 2011 dan mulai terkoreksi di bulan-bulan selanjutnya. Dengan demikian, secara keseluruhan,

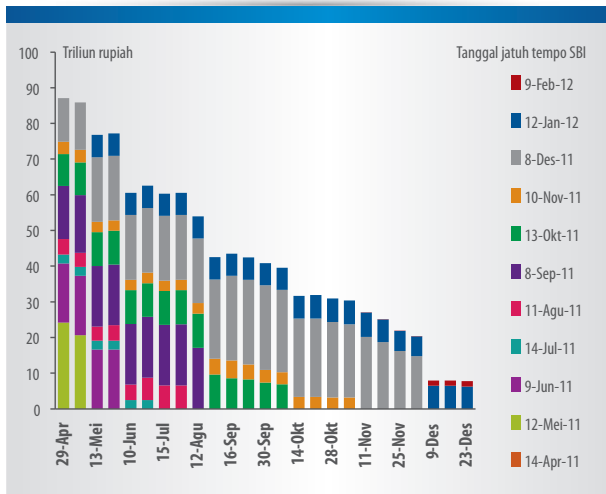
pasar valas domestik pada tahun 2011 mengalami defisit sebesar 6,69 miliar dolar AS. Dari sisi volume transaksi, rata-rata harian perdagangan valas mengalami peningkatan ke kisaran rata-rata 2,9 miliar dolar AS per hari, atau melebihi tahun lalu maupun kisaran level sebelum krisis pada tahun 2008.

Manajemen aliran modal asing oleh Bank Indonesia dan perkembangan risiko ekonomi global mendorong kepemilikan asing di SBN tetap meningkat sedangkan kepemilikan di SBI menurun. Masih menariknya imbal hasil investasi portofolio rupiah mendorong peningkatan signifikan penempatan asing di SBN hingga akhir semester I 2011. Dibandingkan dengan akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar 21,7 miliar dolar AS, penempatan asing di SBN sempat mencatat level tertingginya sebesar 29,3 miliar dolar AS pada awal Agustus 2011 sebelum akhirnya turun menjadi 23,1 miliar dolar AS akibat adanya penyesuaian portofolio asing ke *safe haven asset* (denominasi Dolar) (Grafik 5.11).

Sementara itu, adanya kebijakan Bank Indonesia sebagai upaya pendalaman pasar uang dan mengurangi tekanan pembalikan yang tiba-tiba (*sudden reversal*) melalui kebijakan masa endap kepemilikan SBI berhasil mengurangi aliran masuk ke SBI dan menggeser penempatan modal asing ke SBN. Kepemilikan asing di SBI menurun sesuai jatuhnya waktunya menjadi sebesar 860 juta dolar AS dibandingkan dengan 6,1 miliar dolar AS pada tahun 2010 (Grafik 5.12). Dengan perkembangan tersebut, selama tahun 2011 pelaku nonresiden membukukan aliran keluar neto dari instrumen rupiah sebesar 747,99 juta dolar AS, sehingga porsi investor asing dalam SBN relatif tetap

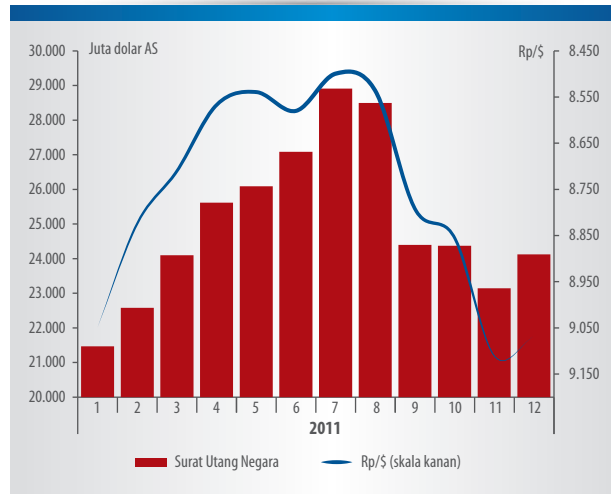


Grafik 5.11 Aliran Dana Nonresiden pada Portofolio Rupiah



Grafik 5.12 Jatuh Tempo Kepemilikan Nonresiden di SBI

yaitu sekitar 29% dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan porsi investor asing dalam SBI menurun



Grafik 5.13 Kepemilikan Nonresiden di SBN

dari 27,45% pada 2010 menjadi 6,51% pada akhir 2011 (5.13).

BOKS 5.1 | PERAN NILAI TUKAR DALAM KERANGKA KERJA *INFLATION TARGETING* YANG FLEKSIBEL

Sejak penerapannya pada tahun 2005, kerangka kerja *Inflation Targeting* (ITF) di Indonesia telah dapat melalui berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan-tantangan tersebut diawali dengan *mini crisis* pada tahun 2005, kemudian krisis global pada tahun 2008, hingga periode aliran masuk modal asing yang deras pascakrisis global serta diakhiri dengan tekanan aliran keluar modal asing pada tahun 2011. Berkat respons dan koordinasi kebijakan yang baik, semua tantangan tersebut dapat dilewati dengan baik oleh perekonomian Indonesia. Selain itu, pengalaman menghadapi krisis global selama ini memberi pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan moneter. Pertama, dalam perekonomian terbuka, kebijakan moneter dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga instrumen yang digunakan perlu berupa bauran instrumen (*instrument mix*). Kedua, krisis global menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi juga dapat bersumber dari sektor keuangan. Ketiga, perlunya secara jelas menempatkan posisi nilai tukar dalam kerangka ITF.

Berbagai pelajaran tersebut mendorong perlunya penyempurnaan strategi ITF ke depan. Penyempurnaan tersebut juga sebagai jawaban atas tuntutan *stakeholders* terhadap peningkatan kredibilitas Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi. Berdasarkan hasil kajian, penerapan ITF yang fleksibel merupakan format yang ideal untuk perekonomian Indonesia.

Dalam ITF klasik, sistem nilai tukar mengambang bebas merupakan pilihan optimal karena dengan asumsi bekerjanya teori "*uncovered interest rate parity*" (UIP), nilai tukar akan berperan sebagai *shock absorber* atas gejolak dalam perekonomian. Dalam kondisi tersebut, perubahan suku bunga kebijakan diharapkan dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar, baik melalui jalur permintaan domestik maupun melalui jalur finansial, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi. Namun demikian, dalam lingkungan pasar keuangan yang terintegrasi secara global, peran nilai tukar cenderung bergerak berbeda dengan asumsi dasar yang digunakan

dalam ITF. Dalam kaitan itu, nilai tukar cenderung bergerak secara eksogen dan dalam beberapa momen bahkan menjadi *shock amplifier* dalam perekonomian. Dengan kondisi demikian, kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan menjadi tidak cukup kuat dalam memengaruhi nilai tukar.

Pergeseran peran nilai tukar dalam perekonomian tersebut menyebabkan perannya dalam kerangka ITF bergeser pula. Dalam konteks ITF yang fleksibel tersebut, salah satu hal yang penting untuk diperjelas yaitu peranan nilai tukar. Pertama, munculnya keinginan untuk mengarahkan nilai tukar berada di level yang optimal dari sudut pandang makroekonomi. Hal itu dilatarbelakangi oleh besarnya pengaruh nilai tukar terhadap harga-harga domestik (*exchange rate pass through*) dan perannya terhadap utang luar negeri. Dalam kondisi tersebut, meskipun ITF dan sistem nilai tukar mengambang secara formal dianut namun bank sentral melakukan intervensi di pasar valas untuk mengurangi ketidakstabilan di pasar keuangan. Kedua, perlunya peran nilai tukar masuk secara eksplisit dalam fungsi reaksi bank sentral (*policy rule*). Banyak negara *emerging markets* enggan untuk membiarkan nilai tukar bergerak secara penuh meskipun telah mengadopsi ITF (Roger et al, 2009). Hal tersebut terutama terjadi pada negara-negara dengan nilai tukar sebagai jangkar kebijakan. Demikian pula, Mohanty dan Klau (2005) juga menemukan bahwa kebanyakan penganut ITF mempertimbangkan nilai tukar dalam penentuan *stance* kebijakan moneter. Meskipun demikian, beberapa studi mengemukakan belum perlunya memasukkan nilai tukar dalam fungsi reaksi kebijakan seperti Taylor (2001), Mishkin dan Schmidt-Hebbel (2001), Edwards (2006), dan Batini et al. (2007).

Pengelolaan nilai tukar dalam kerangka ITF juga ditunjang oleh kebijakan terkait aliran modal asing. Tahapan pertama kebijakan dalam menghadapi aliran masuk modal asing mencakup intervensi dan akumulasi cadangan devisa. Warjiyo (2005) menyebutkan bahwa intervensi merupakan

alat yang dapat membantu kebijakan moneter, menstabilkan ekspektasi pasar serta membatasi pergerakan nilai tukar jangka pendek yang tidak berdasar. Dalam penerapan ITF yang fleksibel, intervensi diarahkan untuk mencari solusi yang lebih akomodatif dengan tidak membiarkan nilai tukar sepenuhnya mengambang bebas mengikuti mekanisme pasar. Sementara itu, akumulasi cadangan devisa dilakukan untuk *self insurance*. Hal itu sangat penting untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya pembalikan aliran modal asing. Selain itu, jumlah cadangan devisa yang optimal dan dipandang cukup oleh dunia internasional membantu upaya pencapaian peringkat layak investasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya pendanaan untuk pembangunan. Tahapan berikutnya ialah *capital flow management* (CFM). Kebijakan CFM diterapkan jika kebijakan konvensional tidak dapat mengatasi aliran masuk modal asing dan perekonomian tersebut memenuhi kondisi nilai tukar yang tidak *undervalued*, cadangan devisa lebih dari cukup, dan ekonomi dalam kondisi *overheating*. Umumnya, kebijakan CFM bersifat sementara dan digunakan untuk mengatasi risiko spesifik yang terkait jenis aliran modal tertentu atau karena sifatnya yang jangka pendek. Dengan demikian, CFM tidak menghalangi jenis aliran modal yang lebih stabil, berjangka panjang, dan produktif. Terdapat dua jenis kebijakan CFM, (i) CFM tanpa diskriminasi terhadap nonresiden dan seringkali disebut dengan istilah makroprudensial; dan (ii) CFM dengan diskriminasi terhadap nonresiden dan umumnya digolongkan sebagai *capital control*.

Dalam implementasinya, Bank Indonesia telah melaksanakan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan aliran modal asing dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Hal itu terutama terlihat pada periode pascakrisis global 2008 ketika perekonomian Indonesia menghadapi tekanan apresiasi nilai tukar rupiah cukup kuat. Kebijakan stabilisasi nilai tukar mengandalkan intervensi dan diarahkan untuk

menjaga stabilitas eksternal dan internal di tengah aliran masuk modal asing dan tekanan apresiasi. Kebijakan tersebut juga sebagai antisipasi terhadap pembalikan aliran modal dengan menjaga level cadangan devisa yang memadai untuk memenuhi impor, kewajiban valuta asing dan *self insurance*.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan aliran modal asing dilakukan melalui beberapa kebijakan makroprudensial. Pertama, kebijakan *month holding period* (MHP) SBI yang diberlakukan sejak bulan Juli 2010 mewajibkan pembeli SBI, baik di pasar primer maupun di pasar sekunder, memegang kepemilikan SBI selama minimal waktu tertentu. Kedua, Term Deposit rupiah diperkenalkan sejak Juli 2010 untuk mengelola likuiditas secara lebih permanen sekaligus mengelola pergerakan investasi portofolio dalam instrumen moneter. Ketiga, pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank yang ditujukan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola PLN jangka pendek bank serta mendorong PLN bank ke arah jangka panjang. Keempat, giro wajib minimum (GWM) valuta asing yang dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan valuta asing selama 2011 dinaikkan secara bertahap menjadi 5% pada bulan Maret dan 8% pada bulan Juni. Kelima, kerjasama bank sentral lintas negara yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan serta melengkapi kerjasama keuangan internasional yang ada seperti Chiang Mai Inisiatif Multilateralisasi (CMIM) antar negara-negara anggota ASEAN+3 yang efektif berlaku sejak 24 Maret 2010 dan perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan People's Bank of China. Berbagai kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ditengah gejolak ekonomi global selama tahun 2011.





Bab VI

INFLASI



INFLASI



Inflasi tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup tajam di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi IHK menurun mencapai 3,79% (yoy), jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (6,96%) dan berada di bawah sasaran inflasi $5\% \pm 1\%$. Penurunan inflasi yang rendah tersebut terjadi di hampir seluruh daerah dan membawa inflasi Indonesia memasuki kisaran inflasi negara-negara kawasan. Dari berbagai faktor yang memengaruhinya, pencapaian tingkat inflasi rendah tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah yang tercermin dari kinerja berbagai komponen inflasi IHK sepanjang 2011. Inflasi inti cukup stabil pada tingkat yang relatif rendah yaitu 4,3%, ditopang oleh kapasitas perekonomian yang memadai, penguatan nilai tukar rupiah yang mampu meredam dampak inflasi dari tingginya harga komoditas internasional, dan terkendalinya ekspektasi inflasi. Sementara itu, laju inflasi volatile food yang pada tahun sebelumnya mencapai 17,74% menurun tajam menjadi 3,37%, didukung oleh terjaganya pasokan dan upaya stabilisasi harga oleh Pemerintah. Selain itu, rendahnya tekanan inflasi juga bersumber dari tidak diterapkannya kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga komoditas strategis seperti BBM bersubsidi dan Tarif Tenaga Listrik sehingga inflasi administered prices terjaga pada level yang rendah (2,78%).



6.1 KINERJA INFLASI

Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2011 melanjutkan tren penurunan inflasi sejak sepuluh tahun terakhir. Walaupun sering mengalami gejolak yang cukup besar, yang terutama bersumber dari gejolak harga bahan pangan dan permasalahan harga BBM, inflasi terus mengalami kecenderungan penurunan (Grafik 6.1). Demikian halnya dengan inflasi tahun 2011 yang menurun tajam, tidak terlepas dari permasalahan harga bahan pangan yang menurun baik akibat dari cukup melimpahnya pasokan maupun adanya koreksi harga. Namun, walaupun tidak sedalam inflasi bahan makanan, penurunan inflasi secara umum hampir terjadi di setiap kelompok barang. Pada tahun 2011 perlambatan inflasi

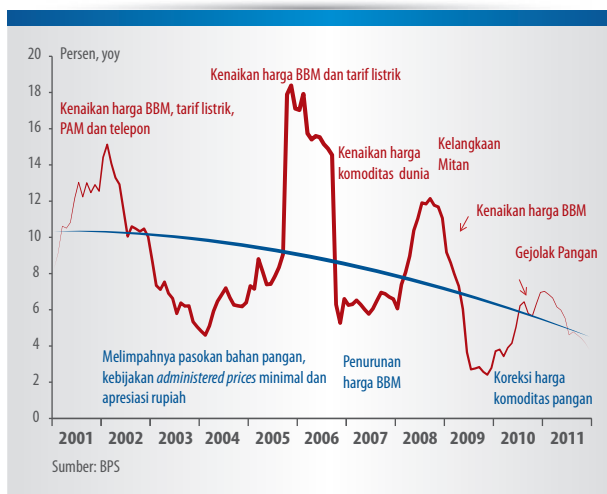
terjadi hampir di semua kelompok, kecuali kelompok sandang, kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan komponen disagregasi dan perkembangan historis inflasi IHK tersebut, kinerja inflasi pada tahun 2011 memperkuat indikasi penurunan tren inflasi ke depan (Grafik 6.2).¹

Perkembangan inflasi tahun 2011 diawali oleh tekanan yang tinggi namun kemudian terus melambat sampai dengan akhir tahun. Tekanan inflasi pada awal tahun diwarnai oleh tingginya ekspektasi inflasi, tekanan harga bahan pangan domestik yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan dan hambatan distribusi, serta iklim yang kurang kondusif. Kondisi tersebut juga diperburuk oleh faktor global, terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas pangan global. Melanjutkan perkembangan di akhir tahun 2010, selama triwulan I 2011 inflasi masih berada di level yang tinggi, mendekati 7%, yang antara lain dipicu oleh tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi inti (Grafik 6.3). Selain itu, ekspektasi inflasi untuk keseluruhan tahun 2011 juga masih tinggi, sekitar 6,5%-6,8%.² Tingginya ekspektasi inflasi antara lain dipicu oleh wacana pembatasan konsumsi BBM yang telah berlangsung sejak tahun 2010 dan tren kenaikan harga komoditas global, termasuk harga energi pada periode tersebut.

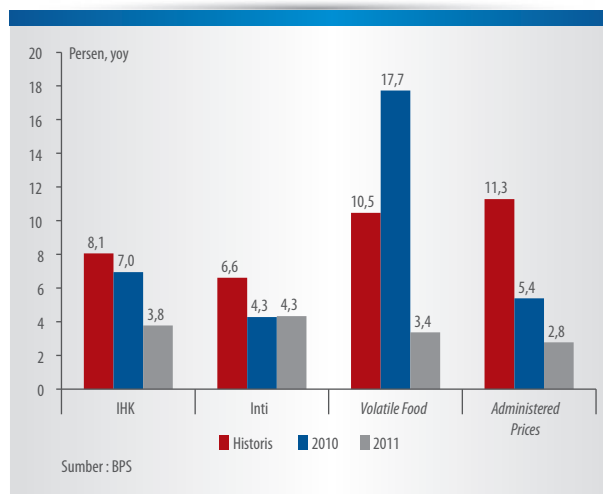
Periode selanjutnya ditandai oleh deflasi yang cukup besar pada musim panen terkait membaiknya pasokan kelompok bahan pangan. Pada semester pertama,

1 Rata-rata periode tahun 2002 sampai 2010 (termasuk periode kenaikan harga BBM)

2 *Consensus forecast* Januari-April 2011



Grafik 6.1. Analisa Rangkaian Kejadian Inflasi IHK



Grafik 6.2. Kinerja Inflasi

Tabel 6.1. Perkembangan Inflasi IHK Periode Prakrisis dan Pascakrisis

Persen

Periode	Prakrisis (1991-1997)	Pascakrisis (2000-2011)*	Pascakrisis (2000-2011)**
Rata-rata	8,26	7,97	6,45
Standar Deviasi	1,84	3,98	2,75

*) Memasukkan periode kenaikan harga BBM.

**) Mengeluarkan periode dampak langsung dan lanjutan kenaikan harga BBM, yaitu kenaikan yang dilakukan pada Januari 2002, Oktober 2005, Mei dan Juni 2008.

Sumber: BPS, diolah

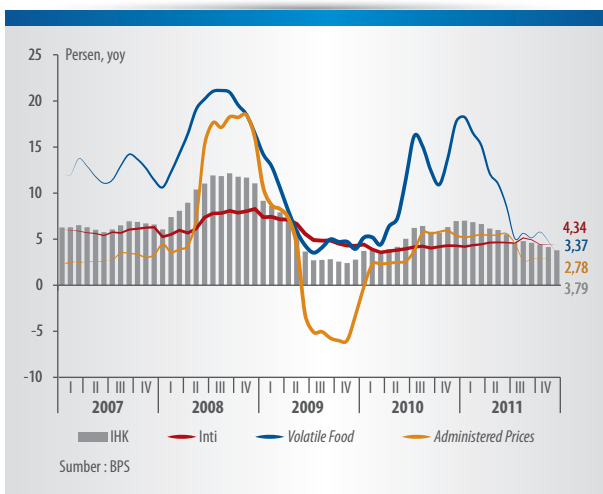
terjadi deflasi IHK sebanyak dua kali, yakni pada bulan Maret (-0.32%,mtm) dan April (-0.31%,mtm), yang lebih besar dari rata-rata historisnya (Grafik 6.4). Sementara itu, kelompok *volatile food* mengalami deflasi selama Februari-April, lebih panjang dari polanya 1-2 bulan, dan lebih besar dari pola deflasi di bulan panen (Maret dan April). Perkembangan tersebut menyebabkan laju inflasi selama semester pertama hanya mencapai 1,06% (ytd), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2,42% (ytd).

Memasuki semester II hingga akhir tahun, perkembangan inflasi dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang memburuk. Selama semester II 2011, sesuai polanya, intensitas tekanan inflasi cenderung meningkat. Dampak dari terhambatnya pemulihan ekonomi global sempat meningkatkan harga emas secara cukup signifikan sehingga mendorong inflasi inti bulan Agustus mencapai 1,09% (mtm), jauh di atas rata-rata periode stabil, sekitar 0,4% (mtm). Namun, harga emas segera terkoreksi secara signifikan yang diikuti oleh koreksi yang signifikan pula dari tarif angkutan selama dua bulan berturut-turut pasca-Idul Fitri. Hal tersebut menyebabkan inflasi inti bergerak di luar pola normal bulannya.

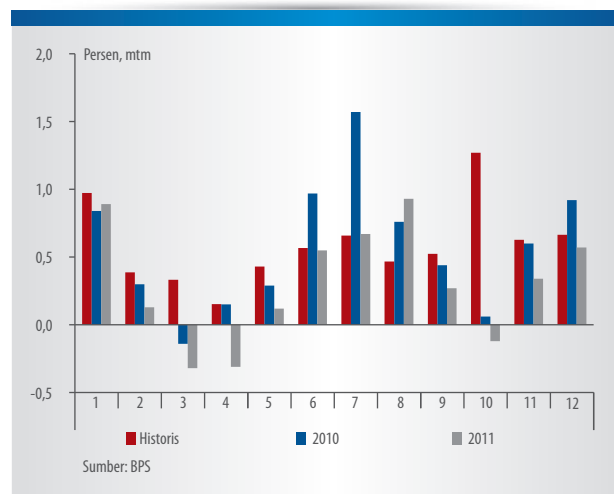
Sementara itu, deflasi kelompok *volatile food* kembali terjadi di bulan September-Oktober. Sejalan dengan perkembangan inflasi kelompok *volatile food*, inflasi pada bulan Ramadhan/Idul Fitri pada tahun laporan hanya mencapai 1% (mtm), cukup rendah dibandingkan dengan pola historisnya, di atas 1%. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK keseluruhan tahun hanya mencapai 3,79%.

Dilihat dari kelompok barang, penurunan tekanan inflasi IHK tahun 2011 didukung oleh rendahnya kontribusi kelompok bahan makanan. Kondisi ini berbeda dari pola historisnya yang menunjukkan kelompok pangan secara umum memberikan sumbangan inflasi terbesar. Pada periode laporan, kelompok bahan makanan hanya memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,84%, jauh menurun dari historisnya.³ Kawasan Jawa, yang merupakan sentra komoditas pangan, mengalami penurunan tertinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya dengan mencatat inflasi 3,43%, lebih rendah dari tahun 2010 (6,71%). Panen komoditas bumbu-

3 Rata-rata inflasi akhir tahun untuk kelompok bahan makanan dari tahun 2003-2010 mencapai 1,92% dan pada tahun 2010 sebesar 3,34% (yoy).



Grafik 6.3. Perkembangan Inflasi

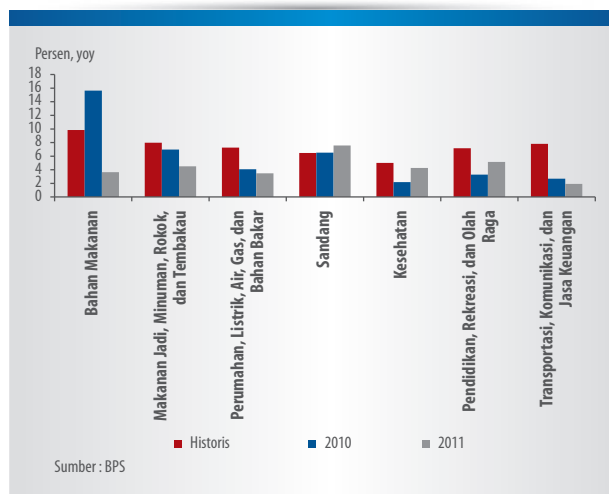


Grafik 6.4. Inflasi IHK Bulanan

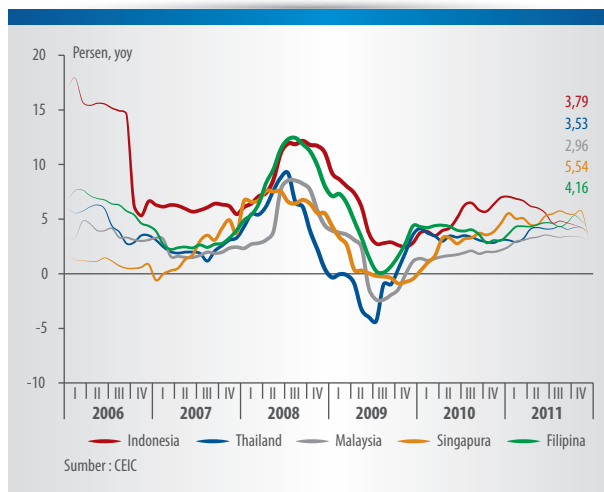
bumbuan dan padi yang berlangsung sesuai dengan targetnya di sentra produksi Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat mendukung kecukupan pasokan, terutama untuk wilayah yang terdekat dengan lokasi wilayah sentra produksi.

Kontribusi inflasi yang menurun juga terjadi pada hampir semua kelompok barang, kecuali kelompok sandang dan pendidikan (Grafik 6.5). Penyumbang inflasi didominasi oleh kelompok sandang yaitu emas perhiasan, terutama pada periode Agustus-September, akibat tertahannya pemulihan ekonomi global. Adanya tambahan dampak gejolak emas tersebut di tengah siklus perayaan hari keagamaan Ramadhan-Idul Fitri mendorong inflasi Agustus 2011 menjadi sebesar 0,93% (mtm), tertinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya selama satu dekade terakhir. Sementara itu, untuk kelompok pendidikan, terjadi peningkatan jasa biaya pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT)/Akademi seiring dimulainya tahun ajaran baru (awal triwulan III 2011). Kenaikan inflasi pendidikan pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama dalam empat tahun sebelumnya. Di level PT/akademi, inflasi yang tinggi lebih banyak terjadi di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Sementara itu, untuk level Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ke bawah, inflasi tinggi banyak terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa.

Dibandingkan dengan empat negara di kawasan, yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup tajam. Selama satu dekade terakhir, inflasi Indonesia selalu merupakan yang tertinggi di kawasan. Namun, pada tahun 2011,



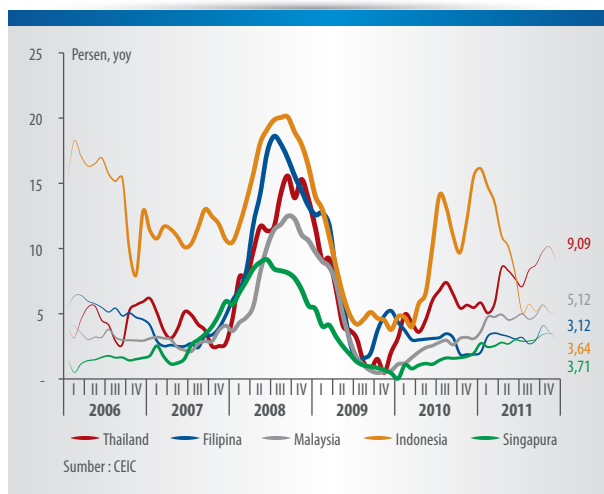
Grafik 6.5. Inflasi IHK Berdasarkan Kelompok Barang



Grafik 6.6. Inflasi IHK Negara Kawasan

terjadi fenomena penurunan inflasi yang signifikan di Indonesia, sementara untuk empat negara kawasan, masih mencatat laju inflasi yang meningkat (Grafik 6.6). Kendati menurun, tingkat inflasi Indonesia dan Filipina masih terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi ketiga negara lainnya di kawasan. Adanya perbaikan pada sisi pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang disokong dari produksi lokal maupun dukungan impor, mendorong penurunan harga yang ekstrim di kelompok pangan domestik (Grafik 6.7). Tingkat inflasi kelompok pangan Indonesia yang menjadi komponen *volatile food*, memasuki triwulan III 2011, turun ke level yang sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah dari pola historisnya dalam kondisi normal.

Penurunan inflasi secara nasional diikuti oleh berkurangnya disparitas inflasi antardaerah. Dari



Grafik 6.7. Inflasi Bahan Pangan Negara Kawasan

semua daerah di Indonesia, tercatat 64 kota dengan pencapaian tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 6.2).⁴ Inflasi di banyak daerah, pada tahun 2011, lebih rendah daripada pola historis dan inflasi tahun 2010.⁵ Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2009, tingkat inflasi tersebut masih lebih tinggi karena koreksi yang tajam setelah kenaikan harga BBM tahun 2008. Penurunan tingkat inflasi terdramatisasi terjadi pada Kawasan Jawa dan Sumatera masing-masing dari 6,71 % dan 7,83% menjadi 3,43% dan 3,98%. Lebih lanjut, disparitas inflasi antardaerah juga relatif berkurang. Kesenjangan inflasi antardaerah pada tahun 2011, yang digambarkan dengan nilai standar deviasi inflasi tahunan, menunjukkan penurunan menjadi 1,2 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,7. Mengecilnya angka kesenjangan inflasi tersebut mengindikasikan kecenderungan sebagian besar inflasi di daerah sudah berada di sekitar inflasi nasional.

Rendahnya inflasi pada tahun laporan masih menyisakan beberapa permasalahan struktural. Lebih rendahnya inflasi seluruh kelompok disagregasi IHK dan inflasi bulan Ramadhan/Lebaran dibandingkan dengan historisnya pada tahun laporan menunjukkan keseriusan Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola

stabilitas ekonomi makro. Namun, beberapa perkembangan harga masih perlu dicermati, khususnya inflasi beras dan pendidikan. Inflasi beras, walaupun mengalami perlambatan dari 30,45% pada tahun 2010 menjadi 10,47% pada tahun 2011, masih lebih tinggi dari historisnya yang rata-rata lebih rendah dari 10%. Inflasi sektor pendidikan terus menunjukkan peningkatan di tengah besarnya anggaran pendidikan dalam APBN. Perkembangan tersebut menambah beberapa persoalan struktural yang masih dihadapi dalam pengelolaan stabilitas harga, seperti keterbatasan lahan untuk menambah produksi pangan, permasalahan distribusi, kesenjangan informasi antarpelaku, distorsi struktur pasar dan keterbatasan penambahan kapasitas produksi. Berbagai program Pemerintah dalam mendukung kegiatan infrastruktur seperti UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Berbagai Program Pemerintah, Program Penjaminan Infrastruktur dan peluncuran *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mendukung pencapaian inflasi yang rendah ke depan.

6.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI

FAKTOR EKSTERNAL

Tekanan dari faktor eksternal, khususnya harga komoditas global, dapat dimitigasi oleh apresiasi rupiah. Kenaikan harga global dan inflasi negara mitra

4 BPS melakukan Survei Biaya Hidup tahun 2007 di 66 kota untuk menghitung inflasi.

5 Rata-rata inflasi tahun 2003-2010

Tabel 6.2. Perkembangan Inflasi IHK di Daerah

Persen, yoy

Kawasan	Inflasi			
	Rata-rata 2003-2010	2009	2010	2011
Sumatera	8,55	2,44	7,83	3,98
Sumatera Bagian Utara	8,85	2,72	7,79	3,64
Sumatera Bagian Tengah	7,96	1,93	7,85	4,25
Sumatera Bagian Selatan	8,84	2,75	7,86	4,03
Jawa	7,55	2,73	6,71	3,43
Jawa Bagian Barat	7,90	2,27	6,46	3,20
Jawa Bagian Tengah	7,46	3,26	6,96	2,86
Jawa Bagian Timur	7,32	3,41	7,10	4,28
Jakarta	7,42	2,34	6,21	3,97
KTI	8,22	3,91	7,56	4,21
Bali Nusa Tenggara	7,78	4,39	9,05	4,85
Kalimantan	8,51	3,95	8,14	5,35
Sulawesi Maluku Papua	7,89	3,67	6,40	2,92

Sumber: BPS, diolah

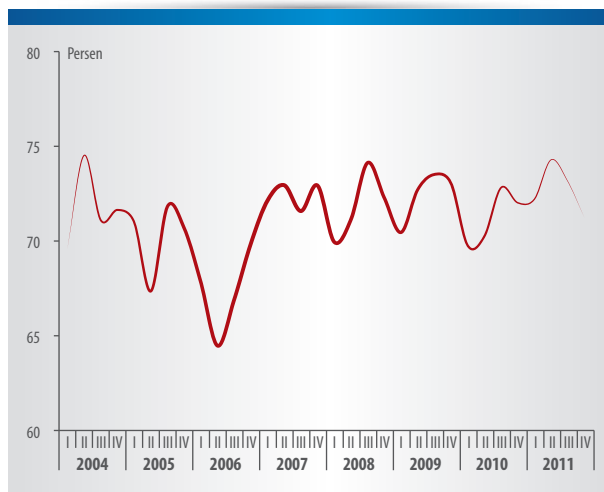
dagang yang meningkat selama semester I 2011 tidak memberikan dampak signifikan pada pergerakan harga komoditas domestik terkait. Transmisi perkembangan harga global yang minimal pada komoditas domestik terkait, tercermin dari perkembangan inflasi inti yang relatif stabil pada level yang rendah sebesar 4,34 % (Grafik 1. Boks 1). Kondisi ini didukung oleh penguatan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar 3,6% (rata-rata), walaupun di akhir tahun sedikit terdepresiasi akibat masih berlangsungnya ketidakpastian pemulihan ekonomi global. Dampak *imported inflation* (inflasi terkait harga barang-barang impor) hanya terbatas pada gejolak harga komoditas emas yang memiliki bobot cukup besar dalam keranjang IHK dan inflasi inti kelompok papan terkait perkembangan harga energi.⁶

Kenaikan harga emas global diikuti dengan peningkatan harga emas domestik. Memasuki triwulan III 2011, emas perhiasan mengalami gejolak harga terkait tingginya permintaan sebagai sarana lindung nilai menyusul pemburukan ekonomi global. Sepanjang tahun 2011 emas mencatat kenaikan harga hingga 15,75%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 14,7% dan rata-ratanya sekitar 11%, meskipun pada penghujung tahun emas mengalami koreksi yang mendorong rendahnya inflasi inti bulanan. Kenaikan harga emas perhiasan di tiap daerah bervariasi lebih dari 10%, namun rata-rata lebih tinggi dari kenaikan harga emas perhiasan tahun sebelumnya. Kenaikan harga emas perhiasan domestik juga didukung oleh kenaikan daya beli masyarakat di daerah yang cukup merata.

INTERAKSI PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Meningkatnya permintaan masih dapat direspons secara memadai oleh sisi penawaran sehingga perkembangan harga-harga masih terkendali. Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan indeks produksi dalam Survei Produksi (SP) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan kapasitas terpakai dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah level 80% (Grafik 6.8). Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar industri masih mempunyai ruang untuk meningkatkan produksi untuk mengimbangi peningkatan permintaan sebagaimana tercermin dari tingginya pertumbuhan sektor industri pada tahun laporan (6,1%). Kondisi itu mengindikasikan kesenjangan output (*output gap*)

⁶ Bobot emas dalam keranjang IHK dengan SBH 2007 di tahun dasar sebesar 1,43%. Namun, bobot tersebut meningkat signifikan akibat gejolak harga sepanjang tahun 2011 sehingga menjadi 2,39% pada Desember 2011.



Grafik 6.8. Kapasitas Utilisasi

masih negatif yang didukung oleh meningkatnya laju pertumbuhan investasi sejak krisis global tahun 2008.

Indikator lain yang mencerminkan peningkatan permintaan domestik adalah peningkatan permintaan properti. Peningkatan permintaan di sektor properti tersebut, khususnya bangunan tempat tinggal, telah mendorong kenaikan harga mencapai 4,13%, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 2,91%, namun belum mengindikasikan tekanan inflasi yang berlebihan. Peningkatan harga tersebut juga masih di bawah kenaikan harga pada periode sebelum krisis tahun 2008 yang berada di kisaran 8%. Hal yang sama terjadi pula pada kategori properti komersial, yang mengalami kenaikan harga hingga 13,01%, meningkat dari tahun lalu sebesar 0,2%.⁷ Selain karena peningkatan permintaan, peningkatan harga di sektor properti juga didorong oleh peningkatan harga-harga komoditas bahan bangunan terutama semen dan besi, seiring meningkatnya harga energi. Peningkatan permintaan di sektor properti juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 23,3% untuk KPR/KPA, meningkat dari tahun lalu sebesar 13,64%. Kenaikan juga terjadi pada kredit konstruksi sebesar 18,56% naik dari tahun lalu sebesar -0,9%. Namun, perkembangan harga properti di Indonesia sejauh ini masih menunjukkan peningkatan yang wajar, dengan respons yang masih positif dari sisi penawarannya.

Dilihat dari sisi spasial, meskipun daya beli masyarakat tetap kuat, hal tersebut relatif tidak diikuti peningkatan harga yang berlebihan di daerah. Pada awal tahun, daya beli masyarakat di daerah menguat seiring

⁷ Survei Harga Properti Residensial

meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 yang rata-rata naik sekitar 9%. Namun, kenaikan tersebut berpengaruh minimal terhadap inflasi karena struktur pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang eceran lebih dipengaruhi oleh komponen biaya input dibandingkan dengan biaya tenaga kerja.⁸

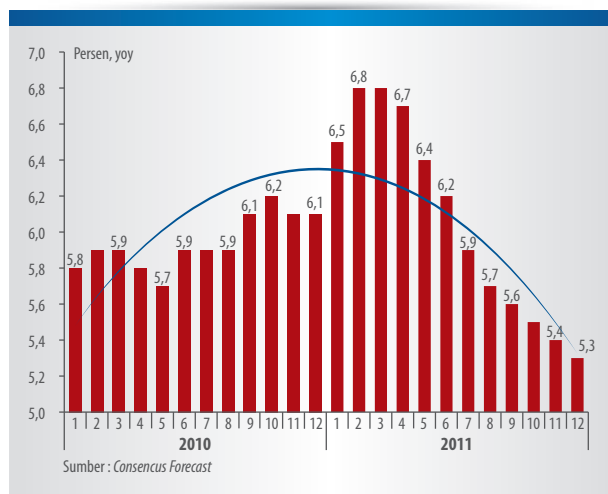
EKSPEKTASI INFLASI

Ekspektasi inflasi terus menurun. Di awal tahun ekspektasi inflasi sempat tercatat tinggi mendekati 7% terkait tingginya harga komoditas global baik pangan maupun energi (grafik 6.9). Memasuki pertengahan hingga akhir tahun, sejalan dengan respons kebijakan moneter di awal tahun, turunnya tekanan inflasi dari kelompok *volatile food*, dan tidak adanya realisasi kebijakan *administered prices* strategis terkait energi, ekspektasi inflasi terus menunjukkan penurunan, yaitu di sekitar 5%. Perkembangan tersebut juga menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan ekspektasi inflasi untuk tahun 2011 yang terjadi di tahun 2010 yang mendekati angka 6%. Ekspektasi inflasi yang menurun tercermin juga dari hasil survei penjualan eceran untuk 6 bulan yang akan datang (Grafik 6.10).

FAKTOR CUACA

Cuaca yang kondusif turut menyokong keberlanjutan kecukupan pasokan bahan pangan sehingga berdampak positif dalam menjaga kestabilan harga. Berbeda dengan kondisi cuaca tahun lalu yang cenderung basah, pada musim kemarau kali ini yang relatif lebih panjang

8 Survei Bank Indonesia, 2011



Grafik 6.9. Ekspektasi Inflasi 2011

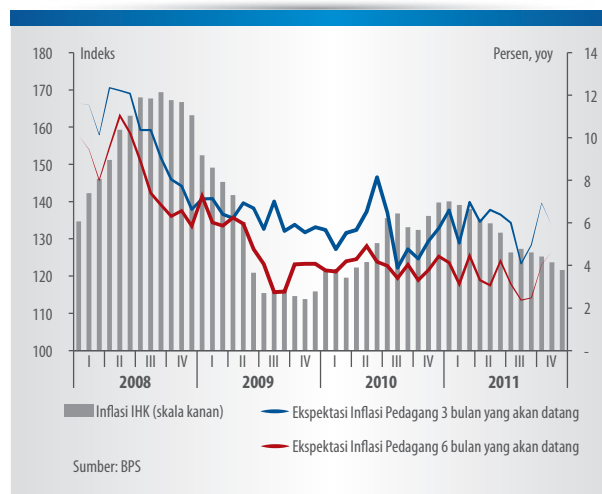
memberi dampak positif pada capaian produksi beberapa komoditas aneka bumbu (khususnya bawang merah) dan sayur-mayur di sebagian besar daerah sentra produksi. Hal tersebut tercermin pada pasokan sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta yang cenderung meningkat dan merata di setiap bulannya. Pada saat memasuki siklus Ramadhan-Hari Raya, pasokan dapat tetap terjaga, sehingga gejolak harga dapat ditahan dan inflasi kelompok *volatile food* lebih rendah daripada pola musimannya.

FAKTOR KEBIJAKAN

Pencapaian tingkat inflasi tahun 2011 yang rendah tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Kedua pihak bersama-sama menerapkan berbagai kebijakan yang mampu mengendalikan ekspektasi inflasi serta mendorong peningkatan kapasitas perekonomian. Secara khusus, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk menghindari tekanan inflasi dari sisi eksternal. Sementara, Pemerintah berperan dalam pengendalian harga secara langsung baik terhadap komoditas yang tergolong dalam *administered prices* maupun pengendalian pasokan barang, terutama bahan pangan. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi baik di level pusat maupun daerah melalui forum TPI dan TPID.

Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Menghadapi dinamika perekonomian selama tahun 2011, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi dan sistem



Grafik 6.10. Ekspektasi Inflasi Pedagang- Survei Pedagang Eceran

keuangan di tengah tingginya volatilitas aliran modal asing. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk membawa inflasi pada sasaran yang ditetapkan.

Selama semester I 2011, ekonomi domestik dihadapkan pada tantangan tekanan inflasi yang meningkat dibarengi dengan arus modal asing yang terus masuk. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI Rate diiringi dengan kebijakan yang memberikan ruang bagi penguatan rupiah yang lebih besar untuk membantu meredam tekanan inflasi yang bersumber dari eksternal (*imported inflation*). Namun, besarnya penguatan rupiah tersebut masih dalam skala yang terukur secara relatif terhadap mata uang regional. Memasuki akhir triwulan III 2011, perekonomian domestik diwarnai dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh krisis utang negara maju yang berdampak pada pembalikan arus modal. Dengan kondisi demikian, tekanan di pasar keuangan termasuk terhadap nilai tukar semakin kuat. Menghadapi tekanan tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah untuk menghindari tekanan inflasi dari pelemahan nilai tukar rupiah yang lebih dalam.

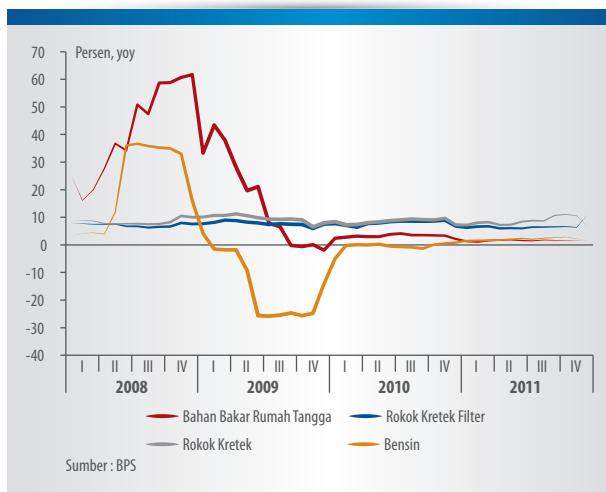
Sejalan dengan keyakinan akan tetap rendahnya tekanan inflasi dan untuk mengantisipasi potensi dampak perlambatan ekonomi global terhadap perlambatan ekonomi domestik, pada triwulan IV 2011 Bank Indonesia menempuh langkah antisipatif dengan menurunkan BI rate. Kebijakan BI rate tersebut sejalan dengan upaya pengelolaan ekspektasi inflasi yang diperkuat juga oleh strategi komunikasi yang intensif. Diseminasi hasil keputusan RDG mengenai berbagai kebijakan yang telah diambil dilakukan Bank Indonesia secara intensif melalui berbagai media. Langkah ini dilakukan untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat mengenai prospek makroekonomi dan arah kebijakan moneter ke depan. Kebijakan moneter juga diperkuat dengan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas perbankan. Beberapa kebijakan makroprudensial tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar yang pada gilirannya berdampak terhadap penurunan *imported inflation* dan peningkatan volume impor barang modal untuk perbaikan kapasitas produksi domestik.

Kebijakan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Dari sisi kebijakan fiskal, peningkatan anggaran untuk stabilisasi harga, khususnya untuk komoditas energi dan pangan efektif dalam menjaga pasokan bahan makanan serta menahan penerapan kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggaran subsidi energi meningkat dari Rp139,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp255,6 triliun pada tahun 2011, yang turut memengaruhi terkendalinya inflasi di tengah peningkatan harga minyak dunia. Terkait harga komoditas energi lainnya, yakni bahan bakar rumah tangga, juga hanya memberikan dampak minimal terhadap inflasi, meskipun program konversi minyak tanah masih berlangsung, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Sementara itu, subsidi non-energi menurun dari Rp52,8 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp41,9 triliun di tahun 2011. Namun, penurunan subsidi non-energi diiringi dengan peningkatan anggaran cadangan stabilisasi pangan (Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dari sekitar Rp 2,7 triliun (2010) menjadi Rp 3,6 triliun (2011)).⁹ Kebijakan pemerintah di bidang harga hanya memberikan tekanan inflasi relatif minimal, terbatas hanya dari kenaikan cukai rokok sebesar 5% pada Januari 2011, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya (15%) (Grafik 6.11).

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mengatasi tekanan inflasi, yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan. Upaya untuk menjaga kecukupan pasokan telah ditempuh oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, antara lain dengan mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi gangguan iklim, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi proses produksi pertanian, pemberian subsidi bagi pengadaan benih dan pupuk, penyediaan anggaran cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih unggul serta memperbaiki distribusi dan struktur pasar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana khusus untuk ketahanan pangan (termasuk mengganti biaya produksi petani yang gagal panen). Namun, mempertimbangkan bahwa produksi domestik belum optimal, maka dalam rangka stabilisasi harga pangan, tambahan pasokan dari

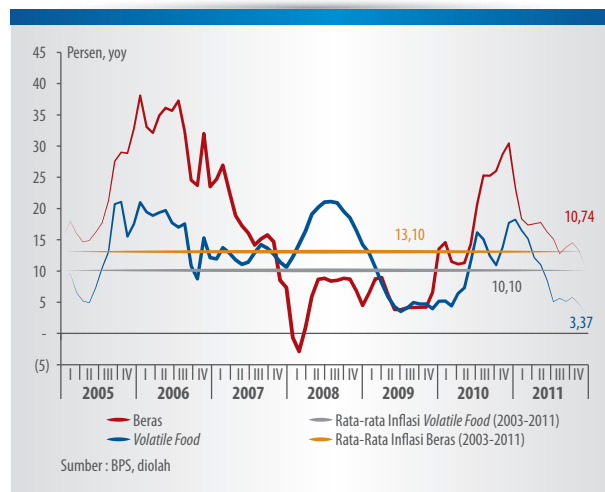
9 Penurunan anggaran subsidi non-energi menurun karena adanya relokasi sebagian anggaran yaitu, Kredit Usaha Rakyat, Cadangan Benih Nasional, Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan, Bantuan Langsung Benih Unggul dan Bantuan Langsung Pupuk ke pos Belanja Lain-lain



Grafik 6.11. Inflasi Beberapa Komoditas Administered Prices

impor masih diperlukan.¹⁰ Terkait penambahan pasokan impor, Pemerintah mengeluarkan ijin impor sebesar 1,9 juta ton kepada Bulog agar dapat memerankan fungsinya secara optimal dalam menjaga stabilitas harga beras domestik. Selain Bulog, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, turut menjaga stabilitas harga antara lain melalui pembelian bawang di saat panen. Pemerintah juga mensosialisasikan kebijakan mengendalikan konsumsi beras dengan mendorong konsumsi karbohidrat alternatif. Selain menjaga kecukupan pasokan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk menjaga

10 ARAM III BPS dipublikasikan pada Oktober 2011, produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2011 menjadi 65,38 juta ton menurun dibandingkan dengan capaian produksi tahun sebelumnya yakni 66,47 juta ton



Grafik 6.12. Inflasi Volatile Food dan Beras

stabilitas harga, yakni berupa Operasi Pasar, pasar murah dan penyaluran raskin hingga 13 kali. Operasi pasar pada tahun ini mencapai sekitar 400.305 ton¹¹, terutama dilakukan menjelang akhir tahun, sejalan dengan semakin terbatasnya pasokan. Operasi pasar pada tahun 2011 tersebut sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya¹². Selain itu, dilakukan pula percepatan kegiatan penyaluran raskin menjadi bulan Maret dari semula direncanakan dimulai pada bulan April. Seluruh upaya tersebut mampu meredam gejolak harga bahan pangan (Grafik 6.12). Inflasi beras tahun 2011 hanya memberikan sumbangan yang moderat sebesar 0,54%, menurun dari tahun

11 Posisi tanggal 26 Januari 2012

12 Operasi Pasar pada Desember meningkat hingga 29% dibandingkan dengan November

Tabel 6.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi Komoditas Kelompok Volatile Food

Komoditas	Desember 2011		
	Inflasi (% yoy)	Kontribusi (% yoy)	Kontribusi (% mtm)
Inflasi			
Beras	10,74	0,54	0,12
Telur ayam	8,92	0,07	0,03
Minyak sayur	4,60	0,06	0,00
Daging sapi	6,73	0,06	0,00
Daging ayam	3,70	0,05	0,03
Cabe merah	-15,82	-0,11	0,09
Cabe rawit	-48,60	-0,16	0,01
Bawang merah	-33,21	-0,18	-0,03
Bawang putih	-47,55	-0,19	-0,01

Sumber: BPS

sebelumnya sebesar 1,26% (Tabel 6.3). Rendahnya inflasi *volatile food* juga tidak terlepas dari peran kebijakan Pemerintah daerah (Pemda).

Besarnya operasi pasar untuk beras tahun ini dilakukan di berbagai daerah secara gencar atas usulan Pemda.¹³ Selain itu, beberapa Pemda juga melakukan program sosialisasi pengendalian konsumsi beras. Untuk melindungi harga beras yang jatuh saat panen, beberapa Pemda juga mengalokasikan sejumlah anggaran untuk melakukan pembelian di tingkat petani dengan harga yang lebih baik. Ketika harga cabe meningkat tajam pada tahun 2010, beberapa Pemda mendorong warganya menanam cabe sehingga produksi cabe melimpah pada tahun 2011 dan mendorong rendahnya harga cabe.

13 Hampir di seluruh wilayah di Indonesia kecuali Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Papua dan Maluku.

Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi

Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi terus dilanjutkan melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi di level nasional maupun daerah (TPI/TPID). Penguatan koordinasi tersebut ditujukan guna mengatasi permasalahan, khususnya di sisi pasokan dan distribusi, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas harga. Dalam hal ini termasuk juga permasalahan tentang kekakuan harga dan tata niaga yang kurang efisien (Lihat Boks 6.1).

Dinamika inflasi di Indonesia masih diwarnai oleh pengaruh berbagai guncangan yang terjadi di sisi pasokan. Faktor alam, seperti bencana, musim kering berkepanjangan dan hama, serta terhambatnya distribusi masih menjadi pemicu terjadinya gejolak harga di Indonesia. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan dalam kegiatan ekonomi nasional, seperti masih rendahnya keterhubungan antardaerah, ketergantungan produktivitas pangan terhadap faktor cuaca, dan berbagai kendala struktural lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah strategis di bidang harga, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan cukai rokok, kerap diikuti kenaikan inflasi yang cukup signifikan.

Dalam kondisi di atas, untuk mencapai sasaran inflasi diperlukan sinergi yang lebih baik antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral. Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh langkah bersama untuk memperkuat koordinasi dengan membentuk tim dalam suatu kerangka kerja pengendalian inflasi. Keberadaan tim ini menjadi wadah koordinasi kebijakan yang intensif di antara seluruh elemen anggotanya sehingga pada gilirannya tim ini dapat menghasilkan rumusan opsi kebijakan yang terbaik. Di tingkat pusat, tim khusus ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005 dan dikenal sebagai Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI). Keanggotaan TPI terdiri dari Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bulog.

Selama tahun 2011, kegiatan TPI difokuskan pada pemantauan potensi tekanan inflasi dari bahan pangan dan energi bersubsidi serta mengusulkan berbagai rekomendasi pengendalian harga pada

kedua komoditas tersebut. Pada awal tahun 2011, inflasi *volatile food* masih tinggi, antara lain didorong oleh kenaikan harga komoditas beras dan cabe, sehingga forum koordinasi difokuskan pada penanganan komoditas cabe. Sejalan dengan harga beras yang masih terus berada di level tinggi selama tahun 2011, rapat TPI beberapa kali difokuskan pada pembahasan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Terkait dengan hal tersebut, pada beberapa forum diajukan rekomendasi terkait kebijakan perberasan seperti operasi pasar, kebijakan pengamanan pasokan dan tinjauan terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras. Perkembangan inflasi beras menunjukkan penurunan dari level yang sangat tinggi pada akhir tahun 2010 yaitu 30,45%, secara gradual menurun hingga mencapai 10,74% pada akhir tahun 2011. Namun, dengan keterbatasan produksi beras yang antara lain karena pengaruh cuaca, secara umum harga beras masih bertahan di level yang tinggi.¹ Sementara itu, untuk mengurangi potensi pembengkakan beban subsidi akibat tingginya harga minyak internasional, sepanjang tahun 2011 muncul berbagai opsi kenaikan harga maupun pembatasan volume BBM bersubsidi baik yang akan diimplementasikan pada tahun 2011 maupun tahun 2012. Wacana kenaikan Tarif Tenaga Listrik juga muncul sebagai kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2012. Apabila kebijakan kenaikan *administered prices* harus dilakukan oleh Pemerintah, Tim merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalkan dampak lanjutan terhadap kenaikan harga barang lainnya, antara lain dengan pengaturan waktu implementasi kebijakan dan strategi komunikasi dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.

Pada tahun 2011, TPI juga melakukan pembahasan mengenai sasaran inflasi tahun 2013-2015. Terkait penyusunan sasaran inflasi, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia tentang Mekanisme Penetapan Sasaran,

1 ARAM III, BPS

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004, proses dan persiapan penetapan sasaran inflasi untuk tahun 2013 ke depan perlu dilakukan pada tahun 2011. Untuk memenuhi amanat tersebut, pembahasan secara intensif untuk merumuskan usulan sasaran inflasi telah dilakukan dalam forum TPI di tingkat teknis pada Oktober 2011, sementara di tingkat pengarah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2011. Berdasarkan pembahasan tersebut disepakati sasaran inflasi tahun 2013-2015 yang direkomendasikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia direncanakan dapat diumumkan kepada publik pada triwulan I 2012 setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Proses penetapan sasaran inflasi yang lebih awal tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya sasaran inflasi dalam perumusan kebijakan moneter dan pembentukan ekspektasi inflasi serta komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga ke depan. Sasaran inflasi yang diusulkan telah mempertimbangkan karakteristik inflasi, proyeksi dan risiko inflasi ke depan, kredibilitas dan transmisi kebijakan moneter, serta adanya upaya untuk secara bertahap menurunkan tingkat inflasi (disinflasi) tetap kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pada tahun 2012, potensi tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok pangan dan energi. Dari kelompok pangan, potensi tekanan terutama bersumber dari komoditas beras, sejalan dengan masih adanya kendala dalam pemupukan cadangan beras pemerintah (CBP) yang bersumber dari dalam negeri. Sementara itu, dari kelompok energi, potensi tekanan berasal dari rencana kebijakan energi dari Pemerintah. Mempertimbangkan kondisi tersebut, program kerja pada tahun 2012 akan difokuskan pada perumusan rekomendasi kebijakan untuk pengendalian inflasi dari komoditas tersebut, antara lain melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, kegiatan tim juga akan diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi terutama pada periode-periode permintaan meningkat, pada perayaan hari keagamaan dan masa pakeklik. Terkait penetapan sasaran inflasi tahun 2013-2015, pengumuman kepada publik diharapkan akan dapat terlaksana pada triwulan I 2012 yang dibarengi FGD untuk pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti temuan dari berbagai daerah, rapat koordinasi antara TPI dan Komite Kebijakan Nasional (Pokjanas) TPID akan semakin intensif dilakukan.

Dalam perkembangannya, strategi untuk memperkuat koordinasi kebijakan diperluas hingga ke tingkat Pemerintah Daerah melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Hal ini ditempuh mengingat bahwa pencapaian sasaran inflasi tidak akan terlepas dari perkembangan inflasi di daerah. Secara teknis, inflasi nasional merupakan pembobotan dari inflasi yang terjadi di 66 kota yang menjadi basis pemantauan harga dengan bobot kota di luar Jakarta mencapai 77%. Dalam kaitan ini, keberadaan TPID di berbagai daerah menjadi sangat strategis, terlebih di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Peran TPID menjadi mitra kerja bagi TPI dalam merumuskan pilihan solusi kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Inisiatif pembentukan TPID yang dimulai sejak tahun 2008 terus memperoleh dukungan yang positif dan hingga akhir tahun 2011 tercatat telah terbentuk sebanyak 65 TPID.² Perkembangan yang cukup pesat ini mencerminkan semakin besarnya kesadaran daerah untuk berpartisipasi menjaga stabilitas inflasi bagi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Besarnya komitmen daerah untuk turut berpartisipasi menjaga stabilitas harga tertuang dalam Agenda Jakarta 2011 yang merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II TPID yang diselenggarakan pada 16-17 Maret 2011. Penyelenggaraan Rakornas II TPID juga ditandai oleh penguatan kerjasama antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemkeno), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung stabilitas harga di daerah guna pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.³ Kerjasama tersebut dilanjutkan dengan membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID pada tanggal 14 Juli 2011 melalui penandatanganan Perjanjian

2 Hingga akhir tahun 2011 tersisa Kota Watampone yang masih diijak untuk dapat membentuk TPID.

3 Nota Kesepahaman antara Kemkeno Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kemendagri No. MOU-01/M.EKON/03/2011, 13/I/GBI/DKM/NK, 300-194 Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011.

Kerjasama (PKS).⁴ Pokjanas TPID difungsikan sebagai sarana untuk memayungi sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah pusat.

Berbagai forum pertemuan dan diskusi dalam TPID telah menghasilkan serangkaian rekomendasi kebijakan yang mendukung stabilisasi harga. Secara umum, TPID menekankan pada upaya peningkatan pemantauan harga dan perbaikan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sejumlah rekomendasi yang telah dihasilkan oleh TPID seperti mendorong pelaksanaan operasi pasar di sejumlah daerah dan perbaikan mekanisme operasi penyaluran beras oleh Bulog – termasuk perlunya mempertimbangkan kesesuaian jenis beras dengan karakteristik konsumsi daerah berdampak positif terhadap upaya stabilisasi harga beras. Perhatian terhadap upaya peningkatan produksi tani juga menjadi bagian penting yang dilakukan oleh TPID antara lain dengan memfasilitasi pemberian bantuan sarana produksi tani. Sejumlah TPID juga memperkuat kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dan instansi lainnya untuk menjaga

kelancaran distribusi barang, antara lain dengan meminimalkan aksi spekulasi atau penimbunan, merekomendasikan perpanjangan waktu pengoperasian pelabuhan disertai penambahan fasilitas bongkar muat. TPID di berbagai daerah juga mendorong penerapan strategi komunikasi yang lebih baik guna mengelola ekspektasi masyarakat terhadap stabilitas harga.

Ke depan, kegiatan TPID diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun mulai menyentuh pada solusi yang bersifat struktural. Beberapa pertemuan koordinasi TPID antardaerah telah menghasilkan berbagai catatan penting terkait perbaikan struktural yang menjadi prioritas kerja, baik bagi Pokjanas TPID maupun bagi TPID secara keseluruhan. Untuk tahun 2012, prioritas kerja tersebut adalah sebagai berikut: (i) pengembangan pusat informasi harga untuk meminimalkan kesenjangan informasi antarpelaku ekonomi (*asymmetric information*) dan meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar; (ii) melakukan kajian yang komprehensif tentang model cadangan pangan daerah yang optimal guna mendukung penguatan ketahanan pangan daerah dan; (iii) penyusunan payung hukum dan pedoman kerja baku untuk mendorong peningkatan efektivitas peran TPID serta meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama, baik antardaerah maupun Pusat-Daerah.

4 PKS antara Kemenko Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kemendagri No.13/D.I.M.EKON.07/2011, 13/I/DpG/DKM/SPK, 900/2361/V/BANGDA tanggal 14 Juli 2011